

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui proses migrasi dan intoleransi kaum Puritan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat atau pemikiran dengan keyakinan yang mereka anut. Hal ini ditinjau menurut pandangan masyarakat Amerika pada abad ke -19 dan abad ke -20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi kaum Puritan dari Inggris ke Amerika terjadi karena mereka menentang sikap pemerintah dan gereja yang tidak demokratis. Setelah berada di Massachusetts, Amerika untuk menemukan kebebasan terhadap keyakinan yang mereka anut menyebabkan mereka mengeksploitasi kebebasan orang lain sehingga demokrasi yang dituntut oleh mereka menjadi sebuah paradoks.

Hawthorne dan Miller mengkritik sikap kaum Puritan yang mengusir, memburu, bahkan menghukum gantung orang-orang yang tidak sependapat dengan keyakinan yang mereka anut. Sikap seperti ini dianggap bertentangan dengan Ideologi Bangsa Amerika yaitu demokrasi, kesamaan kedudukan, dan kebebasan sebagaimana yang tercantum dalam Declaration of Independence. Kedua sastrawan ini pun menginterpretasikan suatu sikap tentang agama bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda meskipun terhadap agama yang sama. Sebab itu intoleransi kaum Puritan menunjukkan suatu sikap tirani dalam negara yang menghargai demokrasi dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan.



Penerbit **PUTRA SURYA SANTOSA**

 penerbitputrasuryasantosa

 penerbit_putrasuryasantosa

ISBN 978-623-494-220-0



Dahniar Th. Musa
INTOLERANSI AMERIKA DI MASA LALU

Dahniar Th. Musa



INTOLERANSI AMERIKA DI MASA LALU

Tirani dalam sebuah Negara Demokrasi

Editor: Ali Audah, MA.

INTOLERANSI AMERIKA DI MASA LALU:

Tirani dalam sebuah Negara Demokrasi

Dahniar Th. Musa



PUTRA SURYA SANTOSA

INTOLERANSI AMERIKA DI MASA LALU:

Tirani dalam sebuah Negara Demokrasi

Penulis:
Dahniar Th. Musa

Editor:
Ali Audah, MA.

Layout: & Cover:
Tim PSS

Cetakan pertama, **April 2024**

ISBN: 978-623-494-220-0

Diterbitkan Oleh:

CV. PUTRA SURYA SANTOSA

Alamat: Perum Permata Godean 1 C3, Desa Sidokarto RT. 02/05
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

E-mail: putrasuryasantosa@gmail.com

HP : 0812-1603-3775 - Website: www.putrasuryasantosa.com

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis

Pelanggaran Hak Cipta diatur

Pasal 113 ayat (3), dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku dengan judul *INTOLERANSI AMERIKA DI MASA LALU : Tirani dalam sebuah Negara Demokrasi* dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini sepatutnya disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan baik materiil maupun spiritual selama proses penyusunan buku ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi perbaikan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, 15 April 2024

Dahniar Th. Musa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Peran Sastra dalam Refleksi Historis Kaum Puritan Amerika.....	11
Bab 3 Kemunculan Gerakan Puritanisme.....	21
Bab 4 Migrasi Kaum Puritan	41
BAB 5 Budaya Kaum Puritan.....	45
Bab 6 Kehidupan Beragama Kaum Puritan di Amerika	55
Bab 7 The Scarlet Letter:	65
Bab 9 The Crucible: Situasi Kehidupan Beragama Kaum Puritan Massachusetts di Masa Kolonial	85
Bab 10 Kesimpulan	101
Daftar Pustaka	105

BAB 1

Pendahuluan

Pengertian Intoleransi

Dalam American Heritage Dictionary of the English Language dikatakan bahwa “*intolerant as not tolerant; unwilling to tolerate other’s opinions, beliefs, etc*” dan *intolerance* berarti “*the quality or condition of being intolerant*” (1992: 945). Lebih lanjut lagi diterangkan bahwa *religious intolerance* adalah “*not respecting the fundamental human right of other people to hold religious beliefs that are different from your own.*”

Kalimat “tidak menghormati hak asasi manusia orang lain untuk menganut keyakinan agama yang berbeda dengan agamanya” mengandung gagasan kegagalan dalam menghormati aspek inti hak asasi manusia—kebebasan untuk menganut keyakinan agama yang berbeda tanpa diskriminasi atau prasangka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat universal dan melekat yang dimiliki oleh semua individu tanpa memandang latar belakang, keyakinan, atau karakteristiknya. Salah satu hak mendasar tersebut adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang mencakup hak untuk mengamalkan, menganut, dan mengekspresikan agama atau keyakinan seseorang dengan cara yang sesuai dengan ketertiban umum, moralitas, dan hak orang lain.

Frasa “tidak menghormati” menekankan kurangnya rasa hormat atau pertimbangan terhadap keyakinan dan praktik orang lain. Hal ini berimplikasi pada kegagalan dalam mengakui keberagaman dan pluralitas pandangan agama yang ada di masyarakat. Menghormati hak orang lain untuk menganut keyakinan agama yang berbeda berarti mengakui otonomi mereka dan memberi mereka

ruang untuk mengekspresikan keyakinannya tanpa menghadapi diskriminasi, penindasan, atau paksaan.

Istilah “hak asasi manusia yang mendasar” berarti bahwa hak untuk menganut keyakinan agama pilihan seseorang bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh entitas atau pemerintah tertentu, namun melekat pada diri manusia. Ini adalah hak penting yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahannya, memastikan perlakuan yang adil terhadap individu terlepas dari afiliasi agama mereka.

Dalam frasa “keyakinan agama yang berbeda dengan keyakinan Anda” terkandung makna perlunya merangkul keberagaman dan menumbuhkan budaya toleransi dan saling pengertian. Konvensi ini menekankan bahwa masyarakat harus diperbolehkan untuk mengikuti keyakinan dan praktik mereka tanpa melanggar hak orang lain. Dengan menerima dan menghormati sudut pandang agama yang berbeda, masyarakat dapat meningkatkan keharmonisan, hidup berdampingan, dan saling menghormati di antara anggotanya.

Akar Intoleransi Kaum Puritan

Prinsip –prinsip teologis yang berdasarkan konsep predestinasi yang keras dan tegas yang disertai berbagai perlakuan kejam yang dilakukan oleh kaum Puritan disebut *intoleransi*. Intoleransi kaum Puritan terhadap keyakinan lain merupakan salah satu masalah yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah Amerika. Mereka sangat tidak toleran terhadap keyakinan lain yang ada di Massachusetts, Connecticut; bahkan di seluruh daerah koloni lainnya yang berada di Amerika.

Konsep predestinasi dalam Puritanisme ini memiliki dampak signifikan terhadap intoleransi kaum Puritan di Amerika Serikat selama masa kolonial. Predestinasi adalah doktrin teologis Puritan yang menyatakan bahwa Tuhan

telah menentukan sebelumnya siapa yang akan diselamatkan (orang-orang yang dipilih) dan siapa yang akan binasa (orang-orang yang ditolak) sejak sebelum dunia diciptakan. Dalam konteks sejarah Puritan, doktrin predestinasi mempengaruhi intoleransi mereka dalam beberapa cara berikut:

1. *Konsep Eksklusivitas*: Doktrin predestinasi menciptakan pandangan eksklusif bahwa hanya sedikit orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, sementara sebagian besar orang dipilih untuk kebinasaan. Ini menyebabkan kaum Puritan melihat diri mereka sebagai kelompok yang terpilih, yang membentuk "remnant" atau sisa yang diberkati oleh Tuhan. Pandangan ini dapat mengakibatkan pandangan merendahkan terhadap kelompok lain yang bukan bagian dari komunitas Puritan, karena mereka diasumsikan sebagai orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan.
2. *Tindakan Proselitisme*: Dalam usaha untuk memastikan bahwa lebih banyak orang termasuk dalam kelompok yang dipilih, kaum Puritan melakukan tindakan proselitisme yang intensif. Mereka berusaha untuk mengkristenkan masyarakat sekitar mereka dan membentuk masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Puritan. Ini bisa berarti upaya keras untuk mengubah orang-orang lain agar mereka mengikuti ajaran Puritan. Kelompok seperti kaum Quaker yang memiliki ajaran berbeda menjadi sasaran utama dari upaya ini dan seringkali menghadapi intoleransi sebagai akibatnya.
3. *Pengawasan Moralitas*: Doktrin predestinasi juga memengaruhi cara kaum Puritan melihat moralitas. Mereka percaya bahwa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda keselamatan dengan hidup yang saleh dan moral. Oleh karena itu, mereka menekankan tata nilai moral yang ketat dan mengawasi perilaku

masyarakat mereka dengan cermat. Ini menciptakan lingkungan yang cenderung otoriter dan memimpin kepada tindakan intoleransi terhadap siapa pun yang dianggap melanggar norma moral Puritan.

4. *Justifikasi Intoleransi*: Para pemimpin Puritan sering menggunakan konsep predestinasi untuk membenarkan tindakan intoleransi mereka. Mereka bisa berargumen bahwa mereka harus menghentikan pengajaran atau praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran Puritan karena hal itu dapat membahayakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dengan demikian, intoleransi terhadap kelompok-kelompok seperti kaum Quaker atau orang yang dituduh bidat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan demi keselamatan rohani masyarakat.

Doktrin predestinasi adalah landasan teologis yang kuat bagi kepercayaan kaum Puritan dalam eksklusivitas dan moralitas yang ketat. Ini memengaruhi pandangan mereka terhadap kelompok lain dan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong intoleransi terhadap mereka selama masa kolonial di Amerika Serikat. Mereka berkeinginan untuk menjadikan New England sebagai sebuah kota di atas bukit yang akan menjadi sangat terkenal di seluruh dunia karena kesetiaan yang teguh pada keyakinan akan ajaran Kristen yang benar.

Para ahli sejarah mengatakan “*the Puritan exodus to America as a heroic effort to preserve the ‘pure’ Christian faith*” (Henretta et al., 1877: 48). Istilah “Kaum Puritan” mengacu pada sekelompok Protestan Inggris pada abad ke-16 dan ke-17 yang berupaya memurnikan Gereja Inggris dari apa yang mereka pandang sebagai sisa-sisa agama Katolik dan apa yang mereka anggap sebagai praktik korup. Mereka memegang keyakinan yang kuat mengenai keyakinan dan praktik keagamaan mereka, menekankan kesederhanaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip alkitabiah. Di mata mereka, Gereja Inggris telah

menyimpang dari cita-cita tersebut, sehingga mendorong keputusan mereka untuk berangkat ke Amerika.

Pernyataan Henretta di atas merangkum perspektif sejarah tentang migrasi Kaum Puritan dari Inggris ke Amerika pada abad ke-17. Penafsiran ini mencirikan perjalanan mereka sebagai upaya yang sulit dan berani yang bertujuan untuk menjaga apa yang mereka anggap sebagai bentuk iman Kristen yang murni.

Kata "eksodus" membangkitkan gambaran migrasi atau keberangkatan yang signifikan, yang sejalan dengan narasi alkitabiah tentang bangsa Israel yang meninggalkan Mesir menuju Tanah Perjanjian. Dalam konteks ini, penggunaan kata "eksodus" menunjukkan sebuah gerakan kolektif dan terarah yang dilakukan oleh kaum Puritan, didorong oleh visi dan misi bersama untuk membangun komunitas keagamaan di Amerika yang akan mematuhi apa yang mereka anggap sebagai penafsiran agama Kristen yang lebih asli dan setia. .

Karakterisasi migrasi ini sebagai "heroik" menekankan tantangan dan risiko yang dihadapi kaum Puritan dalam upaya mereka mencapai kebebasan dan kemurnian beragama. Hal ini menggambarkan mereka sebagai individu pemberani yang bersedia menanggung kesulitan, meninggalkan tanah air mereka, dan menghadapi ketidakpastian wilayah baru dan asing untuk menegaskan apa yang mereka yakini sebagai iman Kristen yang sejati.

Penyebutan pelestarian iman Kristen yang 'murni' menggarisbawahi keyakinan mendalam kaum Puritan terhadap penafsiran mereka terhadap agama Kristen. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai pemelihara doktrin Kristen yang asli dan tidak berubah, dan memandang migrasi ke Amerika sebagai langkah penting untuk memastikan kelanggengan keyakinan mereka, bebas dari apa yang mereka anggap tidak murni atau

menyimpang. Narasi ini menggambarkan perjalanan mereka sebagai upaya gagah berani untuk membangun masyarakat di mana keyakinan agama mereka dapat berkembang tanpa kompromi.

Menurut keyakinan kaum Puritan mereka telah melakukan perjanjian dan sekaligus menyerahkan diri secara ikhlas kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan yang mereka inginkan. Bila ada yang melanggar perjanjian tersebut, Tuhan akan memberikan hukuman tidak hanya kepada orang yang melanggar janji tersebut, melainkan juga terhadap seluruh anggota masyarakat.

Seorang sejarawan terkenal yang mengkaji sejarah Amerika, terutama masa kolonial, dan kontribusinya sangat berarti dalam memahami peran kaum Puritan dalam perkembangan awal Amerika adalah Perry Miller. Salah satu teori utama yang dikemukakan oleh Miller adalah bahwa pemerintah Massachusetts dan Connecticut pada masa itu bisa disebut sebagai pemerintah diktator, walaupun mereka tidak dikendalikan oleh seorang tiran, golongan ekonomi, atau golongan politik tertentu. Sebaliknya, mereka merupakan pemerintah yang dikuasai oleh kaum Puritan yang dianggap sebagai orang-orang suci dan berjiwa baru.

Pemerintah di Massachusetts dan Connecticut pada masa kolonialisme didominasi oleh kaum Puritan yang tiba di Amerika dengan visi moral yang kuat. Mereka memandang diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan yang harus mengikuti perintah-Nya. Hal ini mengakibatkan pemerintah mereka menjadi pemerintahan yang sangat otoriter dan keras, karena hukum-hukum dan kebijakan mereka didasarkan pada keyakinan moral dan agama. Kaum Puritan ini memandang diri mereka sebagai pemimpin spiritual dan memiliki otoritas kuat dalam menentukan kebijakan dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari di koloni-koloni tersebut.

Konsep pemerintah yang dimiliki oleh kaum Puritan ini sangat unik dan berbeda dari pemerintah di negara-negara lain pada masa itu. Mereka menganggap diri mereka sebagai komunitas orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menciptakan masyarakat yang saleh dan moral. Oleh karena itu, pemerintah mereka dianggap sebagai "milik orang suci dan berjiwa baru" atau kaum saleh, karena mereka berusaha menjalankan prinsip-prinsip moral dan agama dalam pemerintahan mereka. Meskipun ini menghasilkan pemerintahan yang otoriter, hal ini juga membentuk dasar bagi perkembangan budaya dan nilai-nilai yang mendalam dalam sejarah Amerika.

Barang siapa tidak berpegang pada cita-cita yang diidamkan kaum saleh, atau barangsiapa percaya bahwa Tuhan telah memfirmankan asas-asas lain, atau barang siapa menginginkan agar dalam hal kepercayaan, akhlak dan dalam pemilihan wadah keagamaan, orang haruslah diberi kebebasan untuk menentukan sendiri, maka orang-orang itu dipersilakan untuk meninggalkan New England. Mereka boleh saja kembali asalkan mereka bersedia untuk tidak menyebarkan pandangan pribadi mereka. Apabila mereka membicarakan pandangan mereka secara terbuka dengan orang lain, atau berperilaku menurut kepercayaan mereka, maka mereka akan diasingkan, dan bahkan seperti yang telah dilakukan terhadap empat orang anggota aliran Quaker, mereka dihukum gantung di lapangan terbuka kota Boston.

Keempat orang anggota aliran Quaker yang dihukum gantung di lapangan terbuka di kota Boston pada masa kolonialisme Amerika Serikat era kaum Puritan dikenal sebagai "Quaker Martyrs" atau "Makluk Boston." Peristiwa ini terjadi pada tahun 1659 dan 1660. Mereka adalah:

1. William Robinson: Ia adalah seorang Quaker Inggris yang datang ke koloni Massachusetts untuk menyebarkan ajaran Quaker. Robinson ditangkap dan diadili atas dakwaan mengganggu perdamaian

dan kesusilaan. Ia menolak menggantungkan dirinya pada hukum Puritan yang bertentangan dengan keyakinannya.

2. Marmaduke Stephenson: Stephenson juga merupakan seorang Quaker Inggris yang tiba di koloni Massachusetts. Seperti Robinson, ia juga ditangkap dan diadili atas keyakinannya. Stephenson bersama dengan Robinson menolak menggantungkan diri pada peraturan-peraturan Puritan.
3. Mary Dyer: Mary Dyer adalah seorang Quaker yang sebelumnya telah diusir dari Massachusetts karena keyakinannya. Namun, ia kembali ke koloni tersebut untuk mendukung Robinson dan Stephenson. Mary Dyer juga ditangkap dan diadili.
4. William Leddra: Leddra adalah seorang Quaker Inggris lainnya yang datang ke Massachusetts dan juga ditangkap serta diadili atas keyakinannya.

Keempat orang ini diadili oleh otoritas koloni Massachusetts Bay yang dipimpin oleh Gubernur John Endecott. Mereka menolak tunduk pada perintah pengadilan yang memerintahkan mereka untuk menggantungkan diri atau dieksekusi. Akibatnya, keempatnya dihukum mati dan digantung di lapangan terbuka di kota Boston pada tahun 1660.

Penghukuman dan eksekusi ini menunjukkan betapa kerasnya pemerintahan Puritan terhadap kelompok-kelompok agama yang dianggap mengganggu otoritas mereka. Meskipun saat itu Quaker adalah salah satu kelompok minoritas yang mengalami perlakuan keras, seiring berjalannya waktu, toleransi agama meningkat di koloni-koloni Amerika dan Quaker menjadi salah satu kelompok agama yang dihormati dan berpengaruh di masa mendatang.

Dari sudut pandang kaum Puritan, itulah cara yang baik untuk menyingkirkan mereka (McClosky et al., 1984 : 22).

Pernyataan tersebut di atas jelas menunjukkan adanya intoleransi kaum Puritan terhadap keyakinan lain yang berada di daerah tersebut. Mereka terlalu fanatik dengan kebenaran akan ajaran agama mereka, yang menimbulkan sikap intoleransi terhadap ajaran agama lain. Bila mereka menerapkan prinsip toleransi, akan menimbulkan terjadinya penyimpangan terhadap kemurnian ajaran agama mereka, bertambahnya orang-orang yang tidak beriman dan munculnya aliran-aliran sesat (Werkmeister, 1949 : 19).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akar intoleransi Kaum Puritan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. *Keyakinan dalam Kesucian dan Pembersihan:* Kaum Puritan sangat menekankan kesucian dan kebersihan dalam kehidupan rohani dan sosial mereka. Mereka melihat diri mereka sebagai "kota di atas bukit," sebuah masyarakat yang dipilih oleh Tuhan untuk memberikan contoh moral yang ketat. Dalam pandangan mereka, kelompok-kelompok seperti kaum Quaker yang memiliki keyakinan dan praktik agama yang berbeda dapat dianggap sebagai "kontaminasi" terhadap kesucian mereka. Oleh karena itu, tindakan kekerasan bisa dilihat sebagai upaya untuk membersihkan komunitas mereka dari apa yang mereka pandang sebagai ancaman terhadap kesucian dan moralitas.
2. *Keyakinan dalam Kebenaran Doktrin:* Kaum Puritan sangat yakin bahwa doktrin agama mereka adalah satu-satunya kebenaran yang benar. Mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk memahami dan mengikuti ajaran-Nya dengan benar. Kelompok seperti kaum Quaker yang memiliki pandangan agama yang berbeda dianggap sebagai orang yang menyimpang atau sesat. Dalam pandangan ini, tindakan kekerasan dapat dianggap sebagai upaya untuk "mengoreksi" atau menghilangkan

- pandangan yang dianggap salah.
3. *Upaya untuk Mempertahankan Otoritas Gereja:* Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Puritan, dan otoritas gereja digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Kaum Quaker dan kelompok-kelompok lain yang menolak tunduk pada otoritas gereja Puritan dianggap sebagai ancaman terhadap konsistensi doktrin gereja dan otoritas gereja itu sendiri. Tindakan kekerasan, seperti pengusiran atau penindasan terhadap mereka, bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga kekuatan dan otoritas gereja Puritan.
 4. *Pandangan Eksklusif terkait Predestinasi:* Doktrin predestinasi yang kuat dalam Puritanisme menghasilkan pandangan eksklusif yang menganggap bahwa hanya sedikit orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kaum Quaker yang memiliki ajaran berbeda dianggap sebagai orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan masyarakat Puritan. Tindakan kekerasan bisa dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kelompok-kelompok yang dipandang sebagai "dapat binasa."

Berdasarkan kemurnian ajaran mereka itulah, mereka berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka ke tanah perjanjian yaitu Amerika.

Bab 2

Peran Sastra dalam Refleksi Historis Kaum Puritan Amerika

Karya sastra memainkan peran penting dalam menjelaskan peristiwa sejarah Puritanisme di Amerika Serikat, memberikan wawasan tentang keyakinan, perjuangan, dan transformasi masyarakat komunitas keagamaan ini. Karya-karya ini berfungsi sebagai sumber utama berharga yang memungkinkan pembaca mempelajari pola pikir kaum Puritan dan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang konteks sejarah mereka. Selain itu, sastra Puritan berfungsi sebagai jendela untuk melihat keprihatinan teologis dan moral masyarakat. Karya sastra ini menyoroti semangat keagamaan yang menjadi ciri gerakan Puritan, menggambarkan bagaimana konsep teologis memengaruhi kehidupan sehari-hari dan struktur masyarakat di koloni. Sastra puritan juga menangkap ketegangan dan konflik yang terjadi di masyarakat. Lebih jauh lagi, karya sastra berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan sehari-hari, adat istiadat, dan tantangan yang dihadapi kaum Puritan.

Kesimpulannya, karya sastra sangat diperlukan dalam menjelaskan peristiwa sejarah Puritanisme di Amerika Serikat. Mereka menawarkan pemahaman yang bertekstur dan bernuansa tentang keyakinan, struktur masyarakat, dan tantangan kaum Puritan. Berbagai karya sastra ini dapat memberikan pandangan komprehensif dan multi-dimensi tentang sejarah Puritan, memperkaya apresiasi kita terhadap kompleksitas dalam komunitas keagamaan yang berpengaruh ini.

Kekuatan Karya Sastra

Seorang penyair Amerika yang paling vokal, Walt Whitman menyerukan bahwa “sastra merupakan cerminan bangsa” (Budianta, 2000 : 73). Penegasan Walt Whitman bahwa “sastra adalah cerminan suatu bangsa” merangkum pemahaman mendalam tentang hubungan timbal balik antara ekspresi sastra dan identitas kolektif suatu masyarakat. Dalam mengemukakan sudut pandang ini, Whitman menggarisbawahi gagasan bahwa sastra berfungsi sebagai cermin yang mencerminkan beragam aspek karakter, nilai, dan aspirasi suatu bangsa. Konseptualisasi ini menyiratkan bahwa kata-kata tertulis, baik dalam bentuk puisi, prosa, atau genre sastra lainnya, merangkum dan mengartikulasikan semangat suatu masyarakat, merangkum pengalaman dan etos budaya bersama.

Terlebih lagi, pernyataan Whitman menunjukkan keyakinan pada kekuatan sastra untuk menangkap dan melestarikan esensi suatu bangsa sepanjang waktu. Dengan mengkarakterisasi sastra sebagai cermin, Whitman menyiratkan bahwa sastra tidak hanya mencerminkan keadaan masyarakat saat ini tetapi juga mempunyai kapasitas untuk mengabadikan kesadaran kolektif suatu bangsa untuk generasi mendatang. Dalam pengertian ini, sastra menjadi gudang sejarah, cita-cita, dan norma-norma masyarakat suatu bangsa, sehingga generasi berikutnya dapat memperoleh wawasan tentang warisan budaya dan lintasan perkembangan pendahulunya.

Selain itu, pernyataan Whitman membawa seruan tersirat kepada para penulis untuk memikul tanggung jawab sosial dalam upaya kreatif mereka. Jika sastra memang berfungsi sebagai cermin bangsa, maka sastrawanlah yang menjadi arsitek media reflektif tersebut, yang membentuk dan memengaruhi citra yang ditampilkan. Perspektif ini mendesak para penulis untuk menyadari peran mereka sebagai penjaga budaya, secara

aktif terlibat dan berkontribusi pada pembentukan narasi nasional. Dengan demikian, pernyataan Whitman melampaui sekadar klaim deskriptif tentang hubungan antara sastra dan suatu bangsa; hal ini berkembang menjadi seruan preskriptif bagi para penulis untuk dengan cermat membentuk dan merefleksikan dimensi beragam masyarakat mereka melalui karya sastra mereka.

Dalam artikelnya tentang Kekerasan dalam Sastra Amerika, Ida Rochani Adi mengemukakan juga bahwa karya sastra merupakan suatu produk dari refleksi (*mirror image*) dari kehidupan manusia yang mengalami peristiwa-peristiwa tersebut (Sumijati As., 2001: 88). Pernyataan tersebut di atas menegaskan bahwa yang dimaksud “cermin” bukanlah semata-mata menjiplak kenyataan yang ada, melainkan hal ini merupakan sebuah proses kreatif pengarang yang berdasarkan kenyataan yang ada untuk menciptakan sesuatu yang baru (Luxemburg et al., 1984: 17).

Dalam proses kreatif ini terdapat interaksi dinamis antara imajinasi dan realitas dalam ranah penciptaan sastra sehingga penulis perlu mengambil inspirasi dari aspek nyata dari lingkungan sekitar, pengalaman, dan kondisi masyarakat, dan menggunakan elemen-elemen ini sebagai bahan mentah untuk sintesis imajinatif ide-ide baru, narasi, dan ekspresi artistik. Kreativitas tidak terlepas dari kenyataan, melainkan merupakan konfigurasi ulang dan transformasi inovatif. Dalam ketergantungan proses kreatif pada realitas yang ada, peran observasi dan keterlibatan dengan dunia dalam asal usul karya sastra menjadi penting. Penulis tidak terisolasi dari lingkungannya namun secara aktif memahami, menafsirkan, dan merespons berbagai aspek realitas. Keterlibatan ini berfungsi sebagai landasan bagi tindakan kreatif, di mana pengarang memanipulasi, menafsirkan ulang, dan mengekstrapolasi elemen-elemen yang dapat diamati di lingkungannya untuk menghasilkan komposisi sastra yang orisinal dan imajinatif sehingga muncul

hubungan dialektis antara tradisi dan inovasi dalam upaya kreatif.

Dengan mengaitkan proses kreatif pada realitas yang ada, penulis terlibat dalam konteks budaya dan sosial yang membentuk karya mereka. Tindakan kreatif, kemudian, menjadi dialog dinamis dengan tradisi, ketika pengarang menavigasi ketegangan antara unsur-unsur yang diwariskan dalam lingkungan budaya mereka dan keharusan untuk menghasilkan sesuatu yang inovatif. Perspektif mengenai proses kreatif ini mengundang pemahaman yang berbeda tentang negosiasi antara kesinambungan dan perubahan dalam sastra, menyoroti bagaimana pengarang merangkai benang konvensi dan kebaruan ke dalam struktur karya mereka.

Karya Sastra Era Kolonial

Fenomena sosial yang terjadi di Massachusetts, Connecticut, dan wilayah kolonial Inggris lainnya di Amerika pada masa kolonial sangat mempengaruhi karya sastra Amerika. Para penulis terkemuka pada masa itu menyampaikan pengalamannya melalui novel, drama, puisi, dan film. Karya-karya sastra pada masa itu merangkum pesan-pesan moral yang beragam, menyikapi berbagai aspek kehidupan manusia pada periode sejarah tertentu yang berkorelasi langsung dengan norma dan adat istiadat pada masa itu. Ekspresi artistik para penulis ini tidak hanya mencerminkan pengalaman pribadi mereka tetapi juga sebagai komentar terhadap norma-norma masyarakat dan praktik budaya yang lazim pada masa kolonial.

Selain itu, sastra yang dihasilkan selama periode ini memainkan peran penting dalam membentuk lanskap budaya dan moral masyarakat Amerika. Karya-karya para penulis terkenal ini memberikan sebuah lensa yang melaluinya pembaca dapat mengkaji dan memahami nilai-nilai masyarakat dan tradisi pada era kolonial. Narasi yang

dijalin oleh tokoh-tokoh sastra ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, menawarkan wawasan tentang kompleksitas keberadaan manusia dan interaksi yang rumit antara pilihan individu dan harapan masyarakat. Akibatnya, sastra Massachusetts, Connecticut, dan wilayah kolonial lainnya menjadi bukti hubungan dinamis antara sastra dan budaya, yang menyoroti dampak mendalam fenomena sosial terhadap ekspresi sastra pada masa itu.

Selain mencerminkan nuansa masyarakat pada masa kolonial, karya sastra Massachusetts, Connecticut, dan wilayah kolonial lainnya di Amerika menggarisbawahi keterkaitan sastra dengan norma dan adat istiadat yang berlaku pada masa itu. Melalui berbagai bentuk sastra seperti novel, drama, puisi, dan film, para penulis menyampaikan kekayaan pengalaman manusia, menjalin kisah-kisah individu dengan narasi masyarakat yang lebih luas. Pesan moral yang terkandung dalam karya sastra ini berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan nilai-nilai masyarakat kolonial dan sarana transmisi pengetahuan budaya lintas generasi. Dengan demikian, sastra pada periode ini berdiri sebagai bukti jaringan rumit pengaruh antara fenomena sosial dan ekspresi artistik, yang menggambarkan hubungan simbiosis antara sastra dan lingkungan budaya di mana ia diproduksi.

The Scarlet Letter

Nathaniel Hawthorne, seorang penulis keturunan Puritan, mendalami lingkungan sosial dan komunal komunitas Puritan selama masa kolonial melalui novel terkenalnya, "The Scarlet Letter", yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1850-an. Narasinya merupakan eksplorasi yang menarik terhadap lanskap budaya dan moral masyarakat Puritan, menawarkan kepada pembaca gambaran rumit tentang norma-norma masyarakat, semangat keagamaan, dan konsekuensi dari penyimpangan dari konvensi yang sudah ada. Terlahir dalam keluarga dengan akar Puritan, Hawthorne menghadirkan perspektif

unik dalam karyanya, memberikan gambaran sekilas tentang seluk-beluk komunitas yang dibentuk oleh kode moral dan keyakinan agama yang ketat.

"The Scarlet Letter" berfungsi sebagai lensa sastra yang digunakan Hawthorne untuk meneliti konsekuensi pelanggaran norma-norma sosial di Amerika Puritan. Protagonis novel ini, Hester Prynne, menjadi perwujudan simbolis dari penilaian masyarakat dan kemunafikan moral saat dia bergulat dengan dampak melahirkan anak di luar nikah. Hawthorne, dengan memanfaatkan warisan Puritannya, menavigasi interaksi kompleks antara pilihan individu dan penilaian kolektif masyarakat yang berakar kuat pada doktrin agama. Novel ini terungkap sebagai eksplorasi bernuansa ketegangan antara otonomi pribadi dan ekspektasi moral yang membatasi yang dipaksakan oleh cita-cita Puritan.

Kontribusi sastra Hawthorne melampaui batas-batas kata-kata tertulis, karena "The Scarlet Letter" telah diadaptasi ke dalam sinema Amerika, menunjukkan relevansi dan kemampuan adaptasi yang bertahan lama dari eksplorasinya terhadap masyarakat Puritan. Transisi dari novel ke film memungkinkan khalayak yang lebih luas untuk terlibat dengan narasi Hawthorne, memperkuat dampak komentarnya terhadap norma-norma Puritan dan implikasinya terhadap individu dalam komunitas. Media visual memungkinkan penggambaran dinamika masyarakat secara jelas, menghidupkan narasi Hawthorne dan mengundang pemirsa untuk merefleksikan tema-tema abadi yang tertanam dalam pengalaman Puritan.

Adaptasi karya Hawthorne ke dalam film juga menggarisbawahi daya tarik abadi terhadap narasi yang menyelidiki kompleksitas ekspektasi masyarakat dan agensi individu. Dengan menerjemahkan novel ke dalam format visual dan sinematik, pendongeng terus mengeksplorasi dan menafsirkan ulang tema "The Scarlet Letter", memastikan resonansinya di berbagai media dan

generasi. Adaptasi lintas media ini mencerminkan warisan abadi eksplorasi Hawthorne terhadap masyarakat Puritan, menunjukkan bagaimana narasinya terus memikat penonton dan menginspirasi keterlibatan kreatif dalam permasalahan moral yang disajikan dalam novel.

Novel "The Scarlet Letter" karya Nathaniel Hawthorne merupakan bukti pengamatan tajamnya terhadap masyarakat Puritan dan kemampuannya menerjemahkan wawasan tersebut ke dalam eksplorasi moralitas, penilaian, dan hak pilihan individu yang tak lekang oleh waktu. Sebagai seorang sastrawan dengan keturunan Puritan, karya Hawthorne tidak hanya mencerminkan warisan kekeluargaan tetapi juga berfungsi sebagai kontribusi sastra yang melampaui bentuk aslinya, menemukan resonansi di ranah perfilman dan memicu perbincangan berkelanjutan tentang persinggungan norma-norma masyarakat dan identitas pribadi.

Pada tahun 1995 film *The Scarlet Letter* pertama kali dipublikasikan dengan pemeran utama Demi Moore dan Gary Oldman. Dalam karyanya ini, Nathaniel Hawthorne memberikan gambaran mengenai ketaatan, kedisiplinan dan ketegasan para tokoh atau pemimpin kaum Puritan di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama pada masa kolonial di Amerika. Prinsip seperti ini dilakukan guna menjaga kemurnian atau kebenaran ajaran Puritan yang mereka anut. Sebab itu secara terang-terangan mereka memburu, menangkap dan mengadili setiap anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap ajaran puritanisme. Pada umumnya para pelanggar hukum tersebut menerima hukuman yang kejam atau berat dari para penguasa di daerah tersebut.

The Crucible

Tema peristiwa tragis yang berulang kali terungkap dalam drama terkenal "The Crucible", yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1950-an dan ditulis oleh penulis

drama terkenal Arthur Miller. Drama tersebut berfungsi sebagai eksplorasi menarik dari pengadilan penyihir Salem, sebuah episode sejarah di Amerika kolonial yang ditandai dengan histeria massal, tuduhan palsu, dan pergolakan masyarakat. Melalui lensa dramatisnya, Miller menyelidiki aspek-aspek gelap dari sifat manusia, menggambarkan bagaimana ketakutan, intoleransi, dan pencarian kekuasaan dapat membawa konsekuensi yang menghancurkan dalam suatu komunitas.

"The Crucible" karya Arthur Miller berfungsi sebagai alegori yang kuat, menarik kesejajaran antara pengadilan penyihir Salem dan semangat anti-komunis di era McCarthy di mana drama tersebut ditulis. Dengan mengaitkan peristiwa-peristiwa sejarah, Miller menyusun sebuah narasi yang melampaui konteks langsungnya, menawarkan komentar abadi tentang bahaya otoritas yang tidak terkendali, terkikisnya kebebasan individu, dan kerugian yang ditimbulkan oleh paranoia masyarakat. Drama tersebut menjadi cermin yang mencerminkan potensi tragedi ketika ketakutan dan kecurigaan mencengkeram suatu komunitas, menggemakan tema universal tentang dampak destruktif dari kepanikan moral terhadap tatanan masyarakat.

Unsur tragis dalam "The Crucible" melampaui latar belakang sejarah, menggali dilema pribadi dan moral yang dihadapi oleh para karakter. Penggambaran Miller tentang individu-individu yang bergulat dengan integritas, kebenaran, dan kesetiaan mereka menambah kompleksitas narasinya. Peristiwa tragis yang terjadi ini menggarisbawahi dampak buruk yang diakibatkan oleh kepatuhan manusia dan konsekuensi dari mengorbankan prinsip-prinsip seseorang di tengah tekanan masyarakat. Melalui perjuangan para karakternya, Miller mengajak penonton untuk merefleksikan rapuhnya landasan etika ketika dihadapkan pada gejolak masyarakat.

Selain itu, relevansi abadi "The Crucible" terletak

pada kemampuannya untuk diterima oleh penonton kontemporer, melampaui konteks sejarah dan budaya spesifik dari penciptaannya. Eksplorasi drama tersebut terhadap tema-tema seperti keadilan, moralitas, dan dampak histeria masyarakat tetap relevan dalam berbagai lanskap sosial-politik. Penggambaran Miller yang luar biasa tentang kondisi manusia mengajak pemirsa untuk mempertimbangkan potensi tragedi dalam struktur masyarakat mereka sendiri dan berfungsi sebagai kisah peringatan terhadap terkikisnya hak-hak individu dalam upaya mencapai kesesuaian kolektif.

Drama "The Crucible" karya Arthur Miller merupakan sebuah eksplorasi tragedi yang menyentuh hati, baik yang bersifat historis maupun abadi. Dengan merangkai persidangan penyihir Salem dan era McCarthy, Miller menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menerangi bab-bab gelap sejarah Amerika tetapi juga berfungsi sebagai komentar universal mengenai kapasitas manusia untuk melakukan ketidakadilan dan konsekuensi buruk dari ketakutan dan intoleransi masyarakat. Gema yang bertahan lama dari drama tersebut menegaskan statusnya sebagai mahakarya tragis yang terus memancing pemikiran dan refleksi tentang rapuhnya landasan moral dalam menghadapi gejolak masyarakat.

Pada tahun 1996 drama ini pun dikembangkan dalam bentuk film dengan pemeran utama Winona Ryder dan Daniel Day Lewis. Film *The Crucible* ini mengungkapkan histeria massa untuk memburu orang-orang yang dituduh mempraktekkan ilmu sihir, yang terjadi di kota Salem pada akhir abad ketujuh belas. Praktek ilmu sihir yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan ajaran puritanisme. Warga masyarakat yang dicurigai melakukan praktek ilmu sihir ditangkap dan diadili berdasarkan hukum Tuhan, kemudian mereka menjalani siksaan berdarah; bahkan sampai dihukum gantung.

Berbagai peristiwa tragis yang menunjukkan intoleransi kaum Puritan pada masa kolonial di Amerika, dapat dilihat melalui peran dan karakter yang muncul dalam film “The Scarlet Letter” dan “The Crucible”. Selain itu pula film merupakan sebuah kebudayaan populer, yang dapat digunakan untuk melihat gambaran mengenai nilai-nilai kehidupan sosial suatu masyarakat tertentu.

Bab 3

Kemunculan Gerakan Puritanisme

Munculnya Puritanisme di Amerika Serikat didorong oleh interaksi yang kompleks antara faktor sejarah, agama, dan sosial. Puritanisme berasal dari Inggris pada akhir abad ke-16 sebagai sebuah gerakan di dalam Gereja Inggris yang berupaya memurnikan praktik-praktiknya dari apa yang dipandang oleh para penganutnya sebagai sisa-sisa Katolik Roma. Lanskap keagamaan di Inggris pada saat itu, yang ditandai dengan ketegangan antara Katolik dan Protestan, menciptakan lingkungan di mana kelompok-kelompok yang berbeda pendapat, termasuk kaum Puritan, mencari otonomi keagamaan.

Salah satu pendorong migrasi kaum Puritan ke Amerika adalah keinginan akan kebebasan beragama. Kaum Puritan menghadapi penganiayaan dan pembatasan praktik keagamaan mereka di Inggris, karena Gereja Inggris yang disponsori negara tidak sepenuhnya sejalan dengan cita-cita reformis mereka. Karena mencari tempat di mana mereka dapat dengan bebas beribadah dan hidup sesuai dengan penafsiran mereka terhadap Alkitab, kaum Puritan bermigrasi ke Dunia Baru, memandangnya sebagai tempat di mana mereka dapat membangun komunitas yang mencerminkan keyakinan agama mereka.

Konsep "Kota di Atas Bukit", yang sering dikaitkan dengan John Winthrop, salah satu pemimpin Puritan, memainkan peran penting dalam memotivasi kaum Puritan untuk membangun komunitas mereka di Amerika. Gagasan ini menyampaikan rasa misi ilahi dan keyakinan bahwa koloni mereka akan menjadi contoh cemerlang dari masyarakat yang saleh. Gagasan untuk menciptakan komunitas yang bermoral lurus dan disiplin merupakan kekuatan pendorong yang kuat bagi kaum

Puritan ketika mereka berupaya membangun cara hidup yang baru dan berbeda di Dunia Baru.

Motivasi ekonomi juga berkontribusi terhadap munculnya Puritanisme di Amerika Serikat. Janjinya peluang ekonomi, termasuk kepemilikan tanah dan peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik, menarik kaum Puritan yang ingin melarikan diri dari kesulitan ekonomi dan kendala sosial di Inggris. Pembentukan komunitas mandiri di Dunia Baru memungkinkan mereka menciptakan masyarakat yang selaras dengan visi mereka tentang cara hidup yang saleh dan rajin.

Pada akhirnya, kemunculan Puritanisme di Amerika Serikat merupakan fenomena yang memiliki banyak aspek, didorong oleh kombinasi cita-cita keagamaan, upaya mencapai kebebasan beragama, visi untuk menciptakan masyarakat teladan, dan motivasi ekonomi. Dampak Puritanisme pada awal koloni Amerika sangat besar, membentuk fondasi budaya, agama, dan sosial yang kemudian menjadi Amerika Serikat.

Gejolak di Eropa

Gerakan Reformasi muncul dan berkembang dalam konteks gerejawi dan kemasyarakatan di Eropa abad pertengahan. Pada dasarnya, gerakan ini mewakili upaya kolektif umat Kristiani untuk mereformasi praktik dan doktrin Gereja Katolik Roma. Selama Abad Pertengahan, hubungan antara gereja dan pemerintah terjalin erat, dengan gereja yang mempunyai pengaruh besar dan, kadang-kadang, menunjukkan kecenderungan otoriter. Banyak anggota masyarakat menyatakan ketidakpuasannya terhadap keadaan gereja, menyoroti isu-isu seperti perilaku munafik para pemimpin gereja dan bawahannya, serta anggapan kurangnya kesopanan. Sentimen yang ada adalah ketidakpuasan, terutama

terhadap ajaran gereja yang terkesan membatasi hubungan langsung antara individu dengan Tuhan yang mereka sembah (Berkhof dan Enklaar, 1983: 119).

Reformasi, yang dimotori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, berupaya mengatasi kekurangan-kekurangan yang dirasakan dalam Gereja Katolik. Sembilan Puluh Lima Tesis Luther, yang dikemukakan pada tahun 1517, menjadi katalisator perdebatan dan perbedaan pendapat yang meluas terhadap praktik-praktik tertentu dalam gereja, khususnya penjualan surat pengampunan dosa. Gerakan ini menganjurkan untuk kembali ke dasar-dasar agama Kristen sebagaimana digambarkan dalam Alkitab, dengan menekankan pentingnya iman, rahmat, dan keterlibatan spiritual individu. Ketidakpuasan terhadap anggapan kemerosotan moral gereja dan keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih langsung dan pribadi dengan Tuhan memicu momentum Reformasi di berbagai lapisan masyarakat Eropa.

Hubungan erat antara gereja dan otoritas politik pada periode ini berarti bahwa Reformasi mempunyai implikasi yang signifikan terhadap lanskap sosial-politik yang lebih luas. Gerakan ini tidak hanya menantang ortodoksi agama tetapi juga struktur kekuasaan yang ada, sehingga mendorong evaluasi ulang peran otoritas gerejawi dalam pemerintahan. Era Reformasi menyaksikan munculnya berbagai denominasi Protestan, masing-masing dengan perspektif dan praktik teologisnya yang berbeda, sehingga semakin mendiversifikasi lanskap keagamaan di Eropa. Diversifikasi ini, pada gilirannya, berkontribusi pada desentralisasi otoritas gerejawi dan menumbuhkan iklim yang memungkinkan interpretasi individu yang lebih besar terhadap keyakinan agama.

Pengamatan Berkhof dan Enklaar bahwa banyak masyarakat yang tidak puas dengan ajaran gereja mencerminkan sentimen ketidakpuasan yang lebih luas

yang memicu Reformasi. Keinginan untuk mendapatkan pengalaman keagamaan yang lebih otentik dan bermakna secara pribadi mendorong individu untuk mencari bentuk ibadah alternatif dan kerangka teologis. Munculnya Protestantisme tidak hanya menandai pergeseran agama tetapi juga menjadi katalisator perubahan sosial, budaya, dan politik yang akan terjadi di seluruh Eropa dan sekitarnya.

Kondisi yang digambarkan dalam pernyataan tersebut menimbulkan berbagai konflik yang melahirkan kelompok oposisi yang ingin berkonfrontasi dengan Gereja Katolik. Gerakan pembaharuan dan reformasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut turut berkontribusi pada situasi yang semakin bergejolak. Masing-masing faksi membawa perspektif dan ideologinya masing-masing, sehingga semakin memperumit keadaan. Akibatnya, otoritas Gereja Katolik Roma, dalam menanggapi ancaman yang dirasakan, terpaksa menekan gerakan-gerakan ini, menghapuskannya dari kancah keagamaan dan sosial (End Van Den, 1986: 188).

Munculnya kelompok oposisi pada periode ini merupakan bukti ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat luas terhadap keadaan Gereja Katolik. Ketika kelompok-kelompok ini mengadvokasi pembaruan dan reformasi, mereka memberikan tantangan terhadap tatanan yang ada, sehingga memicu konfrontasi dengan otoritas gereja. Bentrokan antara gerakan reformis dan Gereja Katolik tidak hanya mencerminkan perbedaan teologis tetapi juga ketegangan sosio-politik, karena kedua belah pihak bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kendali atas narasi dan praktik keagamaan.

Konflik antara kelompok reformis dan Gereja Katolik semakin memperburuk situasi yang kacau. Keberagaman perspektif dalam gerakan-gerakan ini berarti bahwa bentrokan tidak hanya tidak dapat dihindari namun juga terjadi dalam berbagai aspek, mencakup perdebatan

teologis, perbedaan ideologi, dan perebutan otoritas institusional. Gejala yang ditimbulkan oleh konflik-konflik ini menegaskan kompleksitas dinamika keagamaan dan sosial selama periode tersebut, dengan berbagai faksi yang berupaya membentuk arah pemikiran dan praktik keagamaan.

Perjuangan gerakan reformasi ini tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Setelah itu muncullah Martin Luther (1483-1548), seorang rahib Jerman. Ia banyak mengkritik praktek dan ajaran-ajaran kehidupan gereja yang dianggap telah jauh menyimpang dari ajaran Alkitab atau Injil. Luther mengajarkan jabatan pendeta yang diberikan kepada seseorang bukanlah menandakan bahwa orang itu lebih tinggi kelasnya dari orang lain, melainkan jabatan pendeta hanyalah jabatan yang diberikan kepada seseorang karena kemampuannya untuk mengajar dan memimpin orang lain dalam suatu prosesi keagamaan.

Bentrokan antara gerakan reformis Luther dan Gereja Katolik tidak hanya mencerminkan perbedaan teologis tetapi juga ketegangan sosio-politik, karena kedua belah pihak bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kendali atas narasi dan praktik keagamaan. Keberagaman perspektif dalam gerakan-gerakan ini berarti bahwa bentrokan tidak hanya tidak dapat dihindari namun juga terjadi dalam berbagai aspek, mencakup perdebatan teologis, perbedaan ideologi, dan perebutan otoritas institusional. Gejala yang ditimbulkan oleh konflik-konflik ini menegaskan kompleksitas dinamika keagamaan dan sosial selama periode tersebut, dengan berbagai faksi yang berupaya membentuk arah pemikiran dan praktik keagamaan.

Mudahnya gerakan-gerakan reformis ini diberantas secara paksa oleh para penguasa Gereja Katolik, sebagaimana disebutkan oleh End Van Den (1986: 188), menyoroti sifat otoriter dari respons gereja. Penindasan terhadap suara-suara yang berbeda pendapat melalui

pemaksaan dan kekerasan mencerminkan tekad otoritas gereja untuk mempertahankan hegemoni doktrinal dan institusional mereka. Pendekatan ini juga menunjukkan kekuatan politik yang dimiliki oleh Gereja Katolik selama periode tersebut, karena mereka dapat memperoleh dukungan dari para penguasa dan otoritas sekuler lainnya dalam menghilangkan tantangan terhadap dominasinya.

Penindasan paksa terhadap gerakan-gerakan reformis ini mempunyai konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan dan pemikiran keagamaan. Meskipun beberapa gerakan mungkin telah diberantas, ketidakpuasan dan keinginan untuk melakukan reformasi masih ada, sehingga membuka jalan bagi transformasi keagamaan di masa depan. Taktik represif yang digunakan oleh Gereja Katolik juga berkontribusi pada iklim ketakutan dan gentar, mengecilkan perbedaan pendapat secara terbuka dan membuka jalan bagi lingkungan keagamaan yang lebih terkendali.

Martin Luther (1483-1548), seorang biarawan Jerman, muncul sebagai tokoh kunci dalam periode penting dalam sejarah Kekristenan. Luther, yang merasa terganggu dengan apa yang dianggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran alkitabiah dalam praktik dan doktrin Gereja, menjadi kritikus yang vokal. Kritiknya ditujukan pada struktur hierarki Gereja dan penyimpangannya dari prinsip-prinsip yang digariskan dalam Alkitab atau Injil. Luther menganjurkan untuk kembali ke prinsip inti Kekristenan seperti yang terdapat dalam Kitab Suci, menolak tradisi dan praktik tertentu yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab.

Salah satu ajaran fundamental Luther menantang gagasan imamat yang berlaku di Gereja Katolik. Bertentangan dengan kepercayaan yang ada bahwa status imam mengangkat individu ke kelas sosial yang lebih tinggi, Luther menekankan bahwa peran seorang imam harus didasarkan pada kemampuan seseorang untuk

mengajar dan memimpin orang lain dalam proses keagamaan. Penolakan Luther terhadap pemahaman tradisional tentang imamat berakar pada keyakinannya bahwa Gereja telah menyimpang dari ajaran otentik Alkitab. Ia berpendapat bahwa imamat harus menjadi peran yang diberikan kepada individu berdasarkan kompetensi mereka dalam membimbing dan memberi instruksi kepada rekan seiman, bukan sekedar sebutan hierarki yang dikaitkan dengan status sosial.

Dengan membentuk kembali konsep imamat, Luther tidak hanya menantang hierarki sosial dan agama pada masanya tetapi juga meletakkan dasar bagi transformasi yang lebih luas dalam agama Kristen. Penekanannya pada peran imam yang diberikan berdasarkan prestasi dan bukan status sosial berkontribusi pada pemahaman kepemimpinan agama yang lebih demokratis. Pendirian reformis ini memainkan peran penting dalam konteks Reformasi Protestan yang lebih luas, menumbuhkan perspektif baru mengenai otoritas, praktik keagamaan, dan hak individu dalam iman Kristen.

Kritik Luther menyentuh inti struktur hierarki Gereja Katolik, menantang gagasan bahwa individu-individu tertentu secara inheren lebih unggul hanya berdasarkan status imam mereka. Menurut Luther, imamat bukanlah suatu sebutan hierarkis melainkan sebuah peran yang diberikan kepada individu atas kompetensi mereka dalam membimbing dan memberi petunjuk kepada rekan seiman mereka. Perspektif ini mempunyai implikasi besar terhadap dinamika kekuasaan yang ada di dalam Gereja, mempertanyakan legitimasi posisi istimewa para pendeta dan menganjurkan pembagian tanggung jawab keagamaan yang lebih egaliter.

Kritik Luther dan sikap reformisnya meletakkan dasar bagi Reformasi Protestan. Penekanannya pada otoritas kitab suci, penolakan terhadap sakramen-sakramen tertentu, dan pendefinisian ulang peran pendeta

secara signifikan mempengaruhi lintasan agama Kristen. Ajaran Luther tidak hanya menantang tatanan gerejawi yang sudah mapan tetapi juga membuka jalan bagi penafsiran otoritas agama yang lebih demokratis, berkontribusi pada diversifikasi denominasi Kristen dan menumbuhkan pemahaman yang lebih luas tentang lembaga individu dalam praktik keagamaan.

Setiap orang yang percaya dan sudah dibaptis adalah pendeta. Hal ini berarti orang tersebut memiliki iman dan mereka dapat berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa perlu adanya bantuan orang lain sebagai perantara (Horton dan Edwards, 1974:13-14). Gagasan bahwa individu dapat terlibat dalam hubungan langsung dengan Tuhan menunjukkan demokratisasi pengalaman keagamaan, yang memungkinkan umat beriman menjalin hubungan pribadi dengan keyakinan dan ketuhanan mereka tanpa bergantung pada bimbingan atau intervensi orang lain. Perspektif ini menggemakan elemen-elemen tertentu dari teologi Protestan yang muncul selama Reformasi, di mana terdapat penekanan pada keimaman semua orang percaya dan gagasan bahwa setiap individu dapat mendekati Tuhan secara langsung.

Lebih jauh lagi, perspektif ini menantang gagasan bahwa otoritas keagamaan hanya berada di tangan segelintir orang saja. Dengan menyatakan bahwa individu dapat terhubung langsung dengan Tuhan melalui iman mereka, hal ini mendukung gagasan bahwa spiritualitas adalah perjalanan yang sangat pribadi dan individual. Gagasan tentang persekutuan langsung dengan Tuhan mempunyai implikasi tidak hanya pada pemahaman praktik keagamaan tetapi juga pada distribusi otoritas keagamaan dalam suatu komunitas, sehingga mendorong pendekatan yang lebih egaliter terhadap iman dan pengalaman beragama. Dengan demikian baik pendeta maupun bukan pendeta mempunyai status dan derajat yang sama di hadapan Tuhan.

Setelah gelombang awal reformasi agama, muncul tokoh terkemuka lainnya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep teologis yang membentuk Puritanisme: John Calvin (1509–1564). Ia seorang reformator muda, alumni fakultas hukum Universitas Paris di Prancis yang tertarik dengan masalah-masalah teologia. Ia diusir dari tanah airnya karena dianggap sebagai pengikut Luther, kemudian ia pindah ke Jenewa, Swiss dan menjadi pendeta di sana. Pengaruh John Calvin terhadap Puritanisme melampaui masanya, karena ajarannya menjadi inti pemahaman kaum Puritan tentang teologi dan kehidupan Kristen.

Salah satu kontribusi penting Calvin adalah konsep predestinasi, yang menegaskan bahwa Tuhan, dalam kedaulatan-Nya, telah menentukan nasib setiap individu—apakah mereka ditakdirkan untuk diselamatkan atau dikutuk. Prinsip teologis ini sangat mempengaruhi keyakinan dan praktik kaum Puritan, membentuk pemahaman mereka tentang hubungan antara rahmat Tuhan dan keselamatan manusia. Selain itu, penekanan Calvin pada otoritas kitab suci, kedaulatan Tuhan, dan konsep kehidupan Kristen yang berdisiplin sangat sejalan dengan cita-cita Puritan, yang memandu keyakinan agama mereka dan membentuk struktur komunitas Puritan.

Singkatnya, pengaruh John Calvin terhadap Puritanisme sangat besar, dengan konsep teologisnya memberikan landasan yang kuat bagi keyakinan dan praktik Puritan. Ide-idenya, khususnya yang berkaitan dengan predestinasi dan kehidupan Kristen yang berdisiplin, sangat bergema dalam gerakan Puritan, berkontribusi pada kerangka teologis khas yang menjadi ciri Puritanisme pada era ini. Pengaruh Calvin yang bertahan lama terhadap teologi Protestan dan perannya dalam membentuk pemikiran Puritan menyoroti pentingnya Calvin sebagai tokoh kunci dalam sejarah reformasi agama yang lebih luas.

Berkat hasil karyanya mengenai sistematika teologia pertama dan dogmatika Protestan yang lengkap, ia menjadi terkenal di mana-mana dan ajaran-ajarannya mempengaruhi kekristenan di berbagai negara. Berdasarkan hal itu pula maka lahirlah gereja-gereja yang beraliran Calvinis di Swiss, Perancis, Denmark, Belanda, Skotlandia, Jerman Barat, Polandia, Transsylvania (sekarang bagian barat Rumania) dan Hongaria (Berkhof dan Enklaar 1983: 169).

Dampak ajaran Calvin terhadap pendirian gereja-gereja Calvinis di berbagai negara menggarisbawahi universalitas dan kemampuan beradaptasi dari kontribusi teologisnya. Tradisi Calvinis, yang ditandai dengan penekanannya pada predestinasi, kedaulatan Tuhan, dan disiplin kehidupan Kristen, menjadi kekuatan pemersatu komunitas Protestan dalam konteks budaya dan nasional yang berbeda. Kemampuan Calvin dalam mengartikulasikan kerangka teologis yang sistematis dan koheren memungkinkan gagasannya melampaui batas-batas geografis dan menjadi benang merah pemersatu di kalangan penganut Protestan di berbagai belahan Eropa.

Penyebaran gereja Calvinis di berbagai negara juga menyoroti peran teologi dalam membentuk lanskap gerejawi. Warisan teologis Calvin tidak hanya memengaruhi kepercayaan dan praktik masing-masing orang percaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam pelebagaan gereja-gereja yang menganut prinsip-prinsip Calvinis. Pendirian gereja-gereja ini merupakan bukti dampak abadi dari teologi sistematika dan dogmatika Calvin, yang menunjukkan bagaimana ide-ide teologis dapat membentuk komunitas keagamaan dan berkontribusi pada pembentukan tradisi denominasi yang berbeda.

Gereja Anglikan di Inggris pun dipengaruhi oleh ajaran Calvin, meskipun ada beberapa tata cara gereja yang masih mengikuti tradisi gereja Katolik Roma, seperti:

hirarki episkopal, bentuk-bentuk pemujaan dengan segala benda dan hiasannya, pakaian pelindung lengkap (*panopoly*) dalam kirab (prosesi), dan patung-patung. Pakaian seremonial yang komprehensif ini, mirip dengan perlengkapan lengkap yang digunakan dalam prosesi Katolik Roma, melambangkan kesinambungan aspek visual dan simbolik tertentu dari tradisi Katolik dalam Gereja Anglikan. Selain itu, kehadiran patung-patung di ruang ibadah Anglikan menandai kembali dipertahankannya tradisi Katolik dalam Gereja Anglikan. Patung, yang merupakan fitur umum di gereja-gereja Katolik, sering kali memuat representasi orang suci, tokoh alkitabiah, atau ikon agama. Berlanjutnya penggunaan patung di ruang ibadah Gereja Anglikan menunjukkan pelestarian elemen visual tertentu dan praktik kebaktian yang terkait dengan agama Katolik.

Gereja Anglikan, melalui penggabungan elemen visual dan ritual ini, menggambarkan hubungan yang berbeda dengan gagasan Calvinis dan tradisi Katolik, mewujudkan perpaduan khas yang menjadi ciri identitasnya dalam spektrum denominasi Kristen yang lebih luas. Keberadaan Gereja Anglikan seperti ini mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat dan pemahaman yang mengarah kepada pertentangan-pertentangan dengan orang lain yang tidak menyetujui hal ini. Sebab itu muncullah golongan lain yang ingin memurnikan Gereja Anglikan dari pengaruh paham Katolik, misalnya kepemimpinan uskup dan kekuasaan raja di dalam gereja. Mereka itulah yang disebut orang-orang Puritan.

Peziarah dari Inggris ke Tanah Amerika

William Bradford (1590-1657), seorang tokoh berpengaruh di kalangan Puritan dan pemimpin Koloni Plymouth, hidup dari tahun 1590 hingga 1657. Dia adalah salah satu penumpang Mayflower, yang tiba di tempat yang sekarang disebut Massachusetts pada tahun 1620. Bradford

memainkan peran penting dalam tahun-tahun awal Koloni Plymouth, menjabat beberapa masa jabatan sebagai gubernurnya. Oleh karena itu, dia tinggal di koloni Amerika selama tahun-tahun awal pemukiman Puritan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendirian dan pengembangan Koloni Plymouth.

Bradford menciptakan istilah "Peziarah" (*pilgrims*) untuk menggambarkan komunitas Puritan yang terpisah dari Gereja Inggris (Johnson, 1997: 30). Dengan melakukan hal ini, Bradford menangkap esensi perjalanan spiritual kaum Puritan dan pencarian mereka akan kebebasan beragama. Istilah "peziarah" tidak hanya menyampaikan rasa ketaatan beragama tetapi juga menekankan gagasan migrasi yang sakral dan bertujuan, yang mencerminkan keyakinan para peziarah bahwa mereka sedang menjalankan misi ilahi untuk membangun komunitas baru dan suci.

Kaum Puritan, sering disebut sebagai Peziarah, berupaya menciptakan masyarakat baru dan suci yang akan menjadi surga bagi cita-cita keagamaan mereka. Upaya ini mengarah pada pendirian tempat yang kemudian menjadi situs ziarah permanen, yang mewakili perjalanan spiritual berkelanjutan dan bukan perpisahan sementara. Istilah "peziarah" merangkum sifat abadi dari komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip agama dan pembentukan komunitas suci yang berbeda di negeri baru. Rasa ziarah ini melampaui relokasi fisik dan menggarisbawahi pencarian spiritual kaum Puritan yang sedang berlangsung.

Gagasan tentang "ziarah permanen" menunjukkan bahwa kaum Puritan memandang pemukiman mereka di Dunia Baru bukan hanya sebagai relokasi fisik tetapi sebagai perjalanan spiritual yang tiada henti. Konsep ini sejalan dengan keyakinan kaum Puritan dalam upaya berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang benar dan berpusat pada Tuhan. Dengan menciptakan istilah "peziarah" dan menekankan penciptaan komunitas baru

yang sakral, Bradford merangkum aspirasi kaum Puritan untuk membangun masyarakat yang mencerminkan keyakinan agama mereka dan menjadi bukti abadi komitmen mereka kepada Tuhan.

Penggunaan istilah "peziarah" oleh William Bradford ini mencerminkan perjalanan spiritual kaum Puritan dan pemisahan dari Gereja Inggris. Istilah ini mencerminkan inti dari ketaatan agama mereka, pembentukan komunitas baru dan suci, dan sifat abadi dari komitmen mereka untuk menciptakan masyarakat yang berbeda di Dunia Baru. Pilihan bahasa Bradford menyoroti pencarian spiritual kaum Puritan yang sedang berlangsung dan aspirasi mereka untuk membangun situs ziarah permanen yang melambangkan dedikasi mereka yang tak tergoyahkan terhadap cita-cita keagamaan mereka.

Peran Gereja Anglikan

Aktivitas gerakan Puritanisme di Amerika Serikat merupakan hasil perkembangan yang dijalankan oleh kelompok Protestan. Gerakan ini, pada dasarnya, berasal dari tanah Inggris, namun pengaruh terbesarnya justru dirasakan di Amerika. Awal mula munculnya gerakan ini dapat ditelusuri pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I (1558-1603) di Inggris. Pada periode tersebut, masyarakat Inggris sedang menghadapi pergolakan yang cukup signifikan dalam konteks kehidupan beragama.

Kondisi kehidupan beragama yang dahsyat tersebut memainkan peran penting dalam membentuk Puritanisme. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan Gereja Anglikan yang masih mempertahankan unsur-unsur ritual Gereja Katolik. Para Puritan merasa perlu untuk membersihkan dan menyederhanakan praktik keagamaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Dengan demikian, gerakan Puritanisme tidak hanya bersifat sebagai pemisahan diri dari Gereja resmi, tetapi juga sebagai upaya untuk memurnikan ajaran agama sesuai

dengan keyakinan mereka.

Ketika Puritanisme tiba di Amerika Serikat melalui migrasi, gerakan tersebut mendapat kesempatan untuk berkembang lebih bebas tanpa adanya tekanan dari Gereja Inggris. Mereka membawa visi keagamaan mereka ke Amerika, di mana Puritanisme menjadi salah satu kekuatan dominan dalam membentuk karakter keagamaan dan sosial negara tersebut. Dengan demikian, peran Ratu Elizabeth I dan kondisi kehidupan beragama di Inggris memainkan peran krusial dalam lahirnya gerakan Puritanisme yang berakar di Amerika Serikat.

Gereja Inggris berganti dari gereja Katolik menjadi Gereja Protestan dengan pemimpin tertinggi Raja Henry VIII, ayah Ratu Elizabeth I. Pada masa pemerintahan Raja Henry VIII (1509 -1547), ia ingin memutuskan hubungan pernikahannya dengan Catherine dari Aragon. Ia ingin menikah kembali dengan seorang wanita dari lingkungan istananya, Anna Boleyn. Ia pun memohon izin atau persetujuan mengenai hal ini pada Paus, tetapi permintaannya ditolak. Karena itu Henry VIII memutuskan untuk memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma. Ia mendirikan gereja sendiri yaitu gereja Anglikan serta memproklamasikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Anglikan. Pada saat itu Henry VIII pun berkuasa penuh dan menunjuk orang-orang yang duduk di dalam kepengurusan organisasi lembaga gerejanya, sementara itu Paus hanya diakui sebagai Uskup Roma saja.

Segala perlawanan terhadap Raja Henry VIII, ditindas dengan kekerasan. Peristiwa ini menimbulkan berbagai konflik yang mengakibatkan perpindahan besar-besaran ke Amerika dan perang saudara di Inggris. Apa yang dilakukan Raja Henry VIII terhadap Gereja Katolik Roma sebenarnya bukanlah suatu sikap yang mendukung ajaran Protestanisme. Ia pun sebenarnya pernah membela Gereja Katolik Roma ketika Luther menyerangnya. Itulah sebabnya ia tetap mempertahankan kebiasaan Gereja

Katolik Roma, seperti bentuk-bentuk pemujaan dengan segala benda atau hiasan pelengkapannya, pakaian pelindung lengkap dalam kirab atau prosesi dan patung-patung.

Pada masa pemerintahan Raja Edward VI (1547–1553), pengaruh Protestantisme secara bertahap merasuki keberadaan Gereja Anglikan, meskipun dalam waktu yang relatif singkat. Era ini menandai pergeseran ke arah doktrin Protestan di dalam Gereja Inggris. Pemerintahan Raja Edward VI ditandai dengan lingkungan yang lebih ramah terhadap Protestan, dengan upaya untuk memperkenalkan reformasi yang selaras dengan prinsip-prinsip Protestan. Namun, periode pengaruh ini hanya berlalu sebentar, dan peristiwa-peristiwa berikutnya membentuk arah keagamaan Gereja Anglikan.

Kebalikannya terjadi ketika Ratu Mary Tudor naik takhta menyusul pemerintahan Raja Edward VI. Pemerintahan Ratu Mary Tudor, dari tahun 1553 hingga 1558, menandai titik balik yang signifikan bagi Gereja Anglikan. Di bawah kepemimpinannya, Gereja Inggris kembali ke Katolik. Mary Tudor, juga dikenal sebagai "Bloody Mary" karena penganiayaannya terhadap Protestan, berupaya memulihkan tradisi dan doktrin Katolik di dalam Gereja. Pergeseran ini menunjukkan kembalinya praktik Katolik yang lebih tradisional secara singkat namun berdampak besar, menandakan kemunduran sementara bagi pengaruh Protestan yang mulai berkembang pada masa pemerintahan Raja Edward VI.

Pertentangan antara pengaruh Protestan dan Katolik pada masa pemerintahan Edward VI dan Mary Tudor menggambarkan gejolak agama pada masa itu. Perubahan-perubahan ini mencerminkan persaingan kekuatan dalam monarki Inggris, dengan masing-masing penguasa meninggalkan ciri khasnya pada arah Gereja Anglikan. Jeda singkat pengaruh Protestan pada masa

pemerintahan Edward VI dan pembalikannya di bawah pemerintahan Mary Tudor memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keagamaan di Inggris pada pertengahan abad ke-16.

Pada masa pemerintahan Ratu Mary Tudor, umat Protestan di Inggris menghadapi masa yang penuh tantangan dan penindasan. Mary Tudor, juga dikenal sebagai "Bloody Mary", naik takhta dari tahun 1553 hingga 1558 dan berupaya mengembalikan agama Katolik sebagai agama resmi negara tersebut. Di bawah pemerintahannya, umat Protestan dipaksa untuk mengakui otoritas Gereja Katolik. Agama yang dianut oleh raja menjadi agama negara, dan setiap individu diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan pendirian agama resmi tersebut. Penyimpangan dari norma-norma agama yang ditentukan ini dianggap sebagai tindakan penghasutan atau pemberontakan terhadap kerajaan.

Penegakan agama Katolik sebagai satu-satunya agama yang diakui disertai dengan konsekuensi yang parah bagi para pembangkang. Mereka yang menolak arahan agama resmi menghadapi tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan. Penganiayaan terhadap umat Protestan selama periode ini membuat Ratu Mary Tudor mendapat julukan "Bloody Mary" karena tindakan keras yang dilakukan terhadap mereka yang menentang penerapan kembali praktik Katolik. Intoleransi beragama pada masa pemerintahannya menghasilkan iklim di mana keberagaman agama tidak ditoleransi, dan kepatuhan terhadap agama yang ditetapkan negara merupakan suatu keharusan.

Tidak adanya toleransi beragama di bawah pemerintahan Ratu Mary Tudor menggarisbawahi intensnya polarisasi agama pada saat itu. Tindakan keras yang diambil untuk menindas Protestantisme berdampak besar pada kehidupan individu yang berbeda keyakinan. Kurangnya kebebasan beragama pada periode ini

mencerminkan sifat politik agama yang bergejolak dan sejauh mana penguasa dapat mendikte lanskap keagamaan di wilayah mereka. Pergeseran kebijakan agama yang terjadi pada masa pemerintahan Elizabeth I semakin menyoroti gejolak agama di Inggris pada abad ke-16.

Selanjutnya pada saat Ratu Elizabeth I naik tahta (1558- 1603), tekanan terhadap reformasi Protestan pun semakin tidak terkendali. Ia segera memulihkan situasi ini dengan cara menghapus aturan-aturan yang pro Katolik Roma yang dibuat pada saat pemerintahan Ratu Marry Tudor. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. Restorasi Katolikisme: Ratu Mary Tudor berusaha mengembalikan Katolikisme sebagai agama resmi Inggris. Selama pemerintahannya, upaya dilakukan untuk memulihkan ritus dan praktik-praktik Katolik yang telah dihapus selama masa pemerintahan Henry VIII dan Edward VI.
2. Undang-Undang Kebangkitan Agama: Pada tahun 1554, Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Kebangkitan Agama (Repeal of Religious Acts), yang membatalkan undang-undang pro-Protestan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Raja Henry VIII dan Raja Edward VI. Undang-undang ini mengembalikan kewenangan Gereja Katolik atas gereja-gereja di Inggris.
3. Pengadilan Terhadap Protestan: Ratu Mary Tudor giat melakukan pengadilan terhadap tokoh-tokoh Protestan yang menolak untuk kembali ke Katolikisme. Banyak pemimpin Protestan dieksekusi atau dihukum mati dalam pengadilan agama yang dikenal sebagai "Pengadilan Agama" atau "Bloody Assizes."
4. Penindakan terhadap Perkawinan Protestant: Ratu Mary Tudor mengeluarkan undang-undang yang membatalkan sejumlah perkawinan yang telah dilakukan selama masa pemerintahan Henry VIII dan Edward VI. Beberapa tokoh Protestan, termasuk pendeta dan bangsawan, dipaksa untuk

- membatalkan perkawinan mereka.
5. Pelarangan Alkitab Versi Inggris: Ratu Mary Tudor melarang pembacaan dan kepemilikan Alkitab dalam bahasa Inggris. Ini dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran ide-ide Protestan yang sering kali disebarkan melalui terjemahan Alkitab ke dalam bahasa umum.

Aturan-aturan ini mencerminkan upaya Ratu Mary Tudor untuk mengembalikan supremasi Katolik Roma di Inggris dan menekan perkembangan Reformasi Protestan yang telah dimulai sebelumnya.

Ratu Elizabeth I memainkan peran kunci dalam menetapkan *Thirty-Nine Articles* sebagai doktrin resmi agama di Inggris. Artikel-artikel ini, disusun pada akhir abad ke-16, merangkum keyakinan dan prinsip-prinsip Gereja Anglikan. Elizabeth I, yang memerintah dari tahun 1558 hingga 1603, melalui undang-undang parlemen dan konsili gereja, memastikan penerimaan dan implementasi resmi dari *Thirty-Nine Articles*. Keputusannya untuk mengadopsi doktrin ini menggambarkan upayanya untuk mencapai keseimbangan teologis yang dapat merangkul berbagai kelompok di dalam Gereja Anglikan.

Isi dari *Thirty-Nine Articles* mencerminkan pendekatan yang mencoba memadukan berbagai doktrin dari aliran-aliran Protestan yang ada pada saat itu. Artikel-artikel ini memadukan unsur-unsur doktrin Luther tentang membenaran oleh iman dengan keyakinan khas Calvinis mengenai takdir (*predestination*). Dalam hal membenaran, artikel tersebut mengakui pentingnya iman sebagai sarana untuk menerima anugerah keselamatan, yang sejalan dengan ajaran Martin Luther. Di sisi lain, dalam aspek takdir, doktrin Calvinis tentang predestinasi menekankan bahwa sebagian orang sudah dipilih sebelumnya untuk keselamatan, mencerminkan pengaruh dari pemikiran reformator John Calvin.

Dengan menggabungkan elemen-elemen kunci dari tradisi teologis Protestan, *Thirty-Nine Articles* menciptakan landasan doktrin resmi Gereja Anglikan. Meskipun masih menyisakan ruang bagi variasi interpretasi, dokumen ini memberikan dasar untuk kesatuan teologis dalam Gereja Anglikan, yang tetap menjadi bagian integral dari identitas agama Inggris dan warisan historis Gereja Inggris.

Di samping itu ia juga mengakui adanya pejabat gereja mulai uskup sampai pelayan-pelayan dalam acara ritual tradisional. Tujuannya adalah untuk mengayomi, menarik minat, dan sekaligus mewadahi sebanyak mungkin kaum Kristen (Henretta et al., 1877 : 29 -30). Melalui penekanan pada hierarki gereja, Elizabeth I berusaha menciptakan suatu lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi partisipasi luas dalam kehidupan gerejawi. Dengan memberikan tempat dan peran yang jelas kepada setiap tingkatan dalam hierarki gerejawi, Ratu Elizabeth I berupaya menciptakan fondasi yang inklusif bagi seluruh umat Kristen di Inggris. Pendekatan ini juga mencerminkan upayanya untuk memperkuat stabilitas dan konsistensi dalam Gereja Anglikan, menjadikan gereja tersebut sebagai entitas yang dapat mempersatukan berbagai spektrum keyakinan dan praktik keagamaan.

Pemahaman akan keberagaman dalam masyarakat Kristen, serta upaya untuk menciptakan struktur gerejawi yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan rohaniah, merupakan langkah strategis Ratu Elizabeth I dalam membangun dan memperkuat fondasi Gereja Anglikan selama pemerintahannya. Pendekatan ini membuktikan kebijaksanaannya dalam merancang suatu model gereja yang mampu merangkul divergensi keyakinan dan menyatukan beragam anggota umat Kristen di Inggris.

Di sisi lain, pada periode 1607–1609, sekelompok orang yang merasa terdesak dan teraniaya meninggalkan tanah Inggris di bawah kepemimpinan pendeta John

Robinson. Tindakan ini dipicu oleh keterbatasan kebebasan beragama di Inggris dan penindasan terhadap kelompok Protestan tertentu. Mereka pertama kali mendarat di Leiden, Belanda, dan di sana, mereka bergabung atau hidup berdampingan dengan masyarakat Calvinis yang lebih toleran. Meskipun menemukan relatif lebih banyak kebebasan di Belanda, kelompok ini masih merasa khawatir akan hilangnya identitas budaya Inggris mereka di tengah pengaruh kuat Calvinisme di Leiden.

Untuk mempertahankan identitas budaya Inggris mereka, sejumlah anggota kelompok ini, yang kemudian dikenal sebagai kaum Pilgrim, memutuskan untuk mencari tempat baru di Amerika. Pada tahun 1620, mereka berlayar dengan kapal Mayflower dan mendarat di Plymouth, Massachusetts, di mana mereka mendirikan pemukiman baru. Pemilihan tempat ini tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk kebebasan beragama, tetapi juga pada niat mereka untuk mempertahankan warisan budaya Inggris mereka sambil mendirikan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan mereka sendiri. Keputusan ini menandai awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai Perjalanan Pertama Pilgrim ke Amerika dan pembentukan koloni Plymouth.

Perjalanan kaum Pilgrim dan pendirian koloni di Plymouth menciptakan landasan bagi perkembangan awal koloni-koloni di Amerika Utara. Kedatangan mereka membawa elemen-elemen kunci seperti semangat kerja keras, keberanian, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri khas Perjanjian Mayflower. Mereka menciptakan pondasi untuk budaya kolonial awal yang mencerminkan campuran antara tradisi Inggris dan pengaruh Calvinis, yang pada gilirannya, akan membentuk identitas dan perkembangan sejarah Amerika.

Bab 4

Migrasi Kaum Puritan

Kaum Puritan, sekelompok Protestan Inggris yang berupaya memurnikan Gereja Inggris dari pengaruh Katolik Roma, terdorong meninggalkan Inggris menuju Amerika Serikat karena kombinasi faktor agama, sosial, dan politik. Pada awal abad ke-17, Gereja Inggris tidak sepenuhnya memuaskan keinginan kaum Puritan untuk melakukan reformasi dan penyederhanaan ekspresi Kekristenan. Mereka menghadapi penganiayaan agama dan merasa dipinggirkan oleh gereja yang disponsori negara.

Kebebasan beragama merupakan motivasi utama migrasi kaum Puritan ke Amerika Serikat. Keinginan untuk mengamalkan iman mereka tanpa campur tangan Gereja Inggris dan Kerajaan membuat mereka mencari perlindungan di tempat di mana mereka dapat mendirikan komunitas agama mereka sendiri berdasarkan interpretasi mereka terhadap Alkitab. Gagasan untuk menciptakan "kota di atas bukit", seperti yang diutarakan oleh John Winthrop, salah satu pemimpin kaum Puritan, memotivasi mereka untuk menciptakan model masyarakat di Dunia Baru yang akan menjadi contoh komunitas yang saleh dan saleh.

Faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam keputusan kaum Puritan untuk meninggalkan Inggris. Peluang ekonomi di Dunia Baru, termasuk potensi kepemilikan tanah dan otonomi agama, menarik mereka yang mencari kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Selain itu, iklim sosial dan politik di Inggris, yang ditandai dengan pertikaian dan penganiayaan agama, membuat prospek permulaan baru di Amerika menjadi lebih menarik.

Pembentukan Koloni Plymouth pada tahun 1620 dan

migrasi kaum Puritan ke Koloni Teluk Massachusetts pada tahun 1630 menandai dimulainya migrasi Puritan yang signifikan ke Amerika Serikat. Pengaruh mereka akan sangat membentuk koloni-koloni awal Amerika dan berkontribusi terhadap perkembangan lanskap agama, sosial, dan politik yang kemudian menjadi Amerika Serikat. Pencarian kaum Puritan akan kebebasan beragama dan upaya mereka untuk mewujudkan ekspresi Kekristenan yang lebih autentik memainkan peran penting dalam prinsip-prinsip dasar bangsa Amerika.

Pada umumnya kaum Puritan meninggalkan tanah Inggris dengan alasan mendapatkan kebebasan untuk menjalankan keyakinan religius mereka; menghindari pertentangan dalam diri mereka sendiri, yaitu di satu sisi mereka ingin tetap setia pada raja dan yang lain mereka tetap setia pula pada ajaran puritanisme; mereka percaya bahwa Tuhan akan menghukum bangsa yang tidak bersedia mematuhi perintah Tuhan untuk melakukan reformasi atau pembaharuan dalam gereja. Mereka juga meyakini bahwa hari penghakiman terakhir telah dekat. Sebab itu mereka mencari kehidupan dan perlindungan yang baru di New England, sambil menunggu kedatangan kembali Kristus untuk memulihkan kerajaan-Nya (*The Encyclopedia Americana*, 1829 : 30).

Pertama kali kaum Puritan mendarat atau menetap di Plymouth pada bulan Desember tahun 1620. Pada saat itu pula mereka memilih William Bradford sebagai gubernur pertama koloni tersebut. William Bradford dalam hasil karyanya *History of Plymouth Plantation* mengatakan bahwa koloni ini tidak pernah berkembang menjadi koloni yang besar, tetapi peringatan berdirinya koloni tersebut, dirayakan secara lebih besar daripada perayaan pendirian koloni lainnya (Baym et al., 1989).

Keberhasilan pertama kaum Puritan di koloni Plymouth menarik minat warga kaum Puritan lainnya untuk bermigrasi ke New England. Pada tahun 1628 sekelompok

kaum Puritan mendirikan pula pemukiman baru di Salem. Perpindahan besar-besaran kaum Puritan ke Amerika terjadi pada tahun 1630 di bawah pimpinan John Winthrop. Johnson (1997: 31) menyebutkan bahwa John Winthrop adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dalam memimpin perjalanan kaum Puritan ke Amerika.

Dengan memegang piagam resmi dari Raja Charles I, mereka mulai mendirikan dan membangun koloni baru di Massachussettes. John Winthrop pun terpilih menjadi gubernur pertama di koloni Massachusetts dan berkuasa selama lima belas tahun. Ia juga mengesahkan ajaran puritanisme sebagai agama yang didukung dan diakui oleh pemerintah. Para pendiri koloni pada saat itu berkeinginan untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu menjalankan kebebasan beragama. Winthrop mengatakan pula bahwa “kaum kolonis adalah penjaga terdepan dalam usaha pemulihan kembali Kerajaan Tuhan. Selain itu mereka ingin mewujudkan misi atau cita-cita mereka yaitu membangun “a city upon the hill ” (Herbert McClosky, et al., 1984 : 22).

Kalimat “Penjajah adalah garda terdepan dalam upaya memulihkan Kerajaan Tuhan” menunjukkan bahwa para penjajah memandang diri mereka sebagai pionir atau pemimpin dalam upaya spiritual untuk membangun kembali masyarakat yang selaras dengan apa yang mereka yakini sebagai tatanan ideal Tuhan atau Kerajaan di Bumi. Mereka memandang migrasi mereka ke koloni-koloni Amerika sebagai langkah penting dalam memenuhi misi ilahi ini.

Selain itu, mereka idak semata-mata didorong oleh keinginan untuk melarikan diri atau mencari peluang ekonomi di Dunia Baru, namun juga termotivasi oleh tujuan yang lebih dalam dan serangkaian cita-cita atau misi, yang menunjukkan landasan agama dan ideologi yang kuat yang mendorong tindakan mereka.

Penyebutan “membangun 'kota di atas bukit’” mengacu pada tujuan metaforis yang berakar pada kepercayaan Kristen mereka. Ungkapan “kota di atas bukit” adalah istilah yang digunakan oleh kaum Puritan awal John Winthrop, mengacu pada gagasan untuk menciptakan komunitas teladan yang akan menjadi contoh masyarakat yang berbudi luhur dan benar yang dipandu oleh interpretasi mereka terhadap prinsip-prinsip Kristen. Gagasan ini menggarisbawahi aspirasi mereka untuk membangun mercusuar moral dan spiritual, memberikan contoh bagi orang lain untuk diikuti.

Berdasarkan uraian di atas tampaklah bahwa kaum pendatang Inggris yang bermukim di Plymouth maupun Massachusetts, memiliki motivasi agama khususnya ajaran puritanisme yang kuat. Mereka meninggalkan Inggris dan bermigrasi ke Amerika karena tidak berhasil melakukan reformasi di negeri asal mereka. Di tempat yang baru ini mereka berharap untuk dapat mewujudkan impian mereka, membangun sebuah negara dengan pemerintahan sipil yang dikontrol oleh para pemimpin gereja (Grob dan Billias, 1982 : 25).

Selain itu Henretta et al. (1877: 48) mengatakan bahwa kepindahan kaum Puritan ke benua Amerika adalah karena alasan ekonomis atau didorong oleh kerakusan mereka akan tanah yang luas dan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta lahan garapan bagi anak-anak mereka.

BAB 5

Budaya Kaum Puritan

Aspek budaya Puritanisme di Amerika Serikat sangat terkait dengan keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Kaum Puritan, yang berupaya menciptakan masyarakat berdasarkan interpretasi mereka terhadap agama Kristen, meninggalkan dampak jangka panjang pada lanskap budaya koloni-koloni Amerika.

Pertama, semangat keagamaan kaum Puritan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, membentuk identitas budaya mereka. Penekanan pada hubungan pribadi dengan Tuhan dan gagasan tentang "panggilan" berarti bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan interaksi sosial, dilihat melalui kacamata agama. Kerja keras, disiplin, dan hemat dianggap sebagai kebajikan, yang mencerminkan keyakinan bahwa perilaku duniawi seseorang merupakan ekspresi keadaan spiritual mereka.

Kedua, komitmen kaum Puritan terhadap pendidikan dan literasi berdampak besar pada perkembangan budaya koloni Amerika. Pendirian Harvard College pada tahun 1636, misalnya, berakar pada keyakinan Puritan bahwa pendeta yang berpendidikan sangat penting untuk memahami dan mempraktikkan iman Kristen dengan benar. Komitmen terhadap pendidikan ini memupuk budaya literasi dan penyelidikan intelektual, yang memengaruhi perkembangan masyarakat kolonial yang terpelajar dan terpelajar.

Aspek budaya ketiga dari Puritanisme adalah pengaruhnya terhadap seni, khususnya sastra dan musik. Sastra puritan, seperti khotbah, buku harian, dan puisi, mencerminkan keprihatinan keagamaan dan pandangan dunia moralistik mereka. Anne Bradstreet, penyair

Amerika pertama yang diterbitkan, menulis puisi yang membahas pengalaman pribadi dan keyakinan agamanya. Namun, kaum Puritan umumnya skeptis terhadap seni, karena menganggap seni berpotensi mengganggu ketaatan beragama, sehingga mengarah pada budaya seni yang lebih terkendali.

Keempat, komitmen kaum Puritan terhadap kehidupan komunitas dan pendirian gereja-gereja kongregasi berkontribusi pada pengembangan budaya yang erat dan komunal. Kehadiran rutin di kebaktian gereja, penegakan kode moral, dan tanggung jawab komunal menumbuhkan rasa identitas dan akuntabilitas bersama. Fokus komunal ini memengaruhi interaksi sosial, struktur pemerintahan, dan perkembangan komunitas yang memiliki ikatan erat.

Terakhir, warisan budaya Puritanisme mencakup dampaknya terhadap gagasan individualisme dan etos kerja Amerika. Meskipun kaum Puritan menekankan kehidupan komunal, keyakinan mereka pada hubungan pribadi individu dengan Tuhan berkontribusi pada pengembangan rasa tanggung jawab individu dan hak pilihan moral. Gagasan bahwa kesuksesan seseorang dalam hidup merupakan indikasi perkenanan ilahi memperkuat munculnya etos budaya pencapaian individu dan etos kerja Protestan, yang menjadi inti nilai-nilai budaya Amerika.

Singkatnya, aspek budaya Puritanisme di Amerika Serikat dibentuk oleh semangat keagamaan, komitmen terhadap pendidikan, pengaruh terhadap seni, penekanan pada kehidupan komunitas, dan kontribusi terhadap pengembangan individualisme dan etos kerja. Unsur-unsur budaya ini, yang berakar kuat pada pengalaman kaum Puritan, memainkan peran mendasar dalam membentuk lanskap budaya koloni-koloni Amerika dan mempunyai dampak jangka panjang terhadap perkembangan masyarakat Amerika.

Kaum Puritan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang berada di Massachusetts pada masa kolonial. Mereka berasal dari tanah Inggris dan bermigrasi ke Amerika secara bertahap dengan tujuan utama untuk kebebasan beragama.

Sebagai suatu kelompok masyarakat tentunya mereka memiliki kebiasaan, sikap atau tingkah laku yang berbeda dengan sikap atau tingkah laku warga masyarakat lain yang berada di daerah tersebut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku maupun pola pikir manusia di dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang disebut dengan kebudayaan.

Lebih jelas lagi Tylor mengemukakan bahwa keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat disebut kebudayaan. Di samping itu, kebudayaan merupakan rujukan orientasi nilai, norma, aturan dan menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari anggota masyarakat dalam hidup berkelompok dan dalam kehidupan diri sebagai pribadi (Pelly, 1994: 23-31).

Demikian pula halnya dengan kaum Puritan yang meninggalkan tanah asal mereka tentunya tidak ingin kehilangan identitas budaya khas mereka. Meskipun mereka berada jauh dari Inggris, ciri khas tersebut tetap menjadi pedoman bagi mereka untuk bersikap atau bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Di dunia baru inilah mereka ingin mewujudkan cita-cita mereka menjalankan kebebasan beragama tanpa menghilangkan identitas asli mereka sebagai keturunan bangsa Inggris. Beberapa ciri khas yang berpengaruh terhadap berbagai aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan kaum Puritan di Amerika, pertama pengaruh Protestanisme, kedua warisan budaya bangsa Inggris, dan ketiga pengaruh sistem ekonomi kolonial.

Pengaruh Protestanisme

Telah dijelaskan di atas bahwa reformasi baik di bidang ekonomi dan keagamaan yang terjadi di Inggris turut berpengaruh terhadap pembentukan karakter warga kaum Puritan di Amerika. Gerakan ini pun telah melahirkan tokoh-tokoh terkenal, dua di antaranya adalah Martin Luther dan John Calvin.

Meskipun ada beberapa hal yang berbeda, bersumber dari pandangan dan pemikiran mereka berdua itulah Protestanisme lahir. Luther mengajarkan bahwa setiap orang dapat berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa perlu ada orang lain sebagai perantara dan menganjurkan agar setiap umat Kristen mempelajari sendiri Alkitab agar mereka dapat memahami benar-benar isi Alkitab itu.

Sementara itu Calvin mengajarkan bahwa setiap orang mewarisi dosa sejak lahir ke dunia ini. Berdasarkan hal ini, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri maupun orang lain. Keselamatan adalah anugrah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Pilihan tersebut merupakan kewenangan absolut Tuhan, yang tidak dipengaruhi atau menuntut persyaratan apapun.

Interpretasi demi interpretasi pun berkembang sehingga para pengikut Calvin percaya bahwa setiap orang harus berjuang untuk hidup dan berlomba-lomba untuk membuktikan dirinya sebagai orang pilihan Tuhan. Demikianlah semangat yang sama, individualisme dan kebebasan individual terbentuk pada para pengikut Calvin, termasuk warga masyarakat Puritan yang berada di Amerika.

Puritanisme ini merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan nilai-nilai khas yang menandai budaya bangsa Amerika. Melalui konsep perjanjian

(*covenants*) hubungan antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan Tuhan, diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang memiliki tanggungjawab yang sama dalam memelihara ketertiban dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat (Rossister, 1956 : 91 -93). Hubungan antara individu dengan individu lainnya dan hubungan antara individu dengan Tuhan diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama dalam memelihara ketertiban dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam konteks ini, perjanjian-perjanjian tersebut menciptakan kerangka kerja moral yang mendorong tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hidup bersama. Setiap individu dianggap memiliki peran dan tanggung jawab untuk memelihara ketertiban dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Perjanjian ini bisa mencakup aturan moral, etika, dan norma-norma perilaku yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai landasan untuk kehidupan bersama.

Perjanjian dengan Tuhan dalam konsep ini menunjukkan adanya dimensi spiritual dan moral yang mendasari perjanjian-perjanjian sosial. Individu diharapkan untuk mematuhi nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, konsep perjanjian menjadi instrumen untuk membangun masyarakat yang didasarkan pada moralitas, keadilan, dan keharmonisan yang bersumber dari hubungan antara individu dengan Tuhan. Dalam pandangan ini, setiap tindakan dan keputusan diarahkan untuk menciptakan tatanan sosial yang baik dan mendapatkan persetujuan dan keberkahan dari yang Maha Kuasa.

Warisan Budaya Bangsa Inggris

Kebebasan individual merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kaum Puritan

di Amerika. Hal ini karena mereka lama hidup di bawah tekanan dan dominasi golongan bangsawan serta para penguasa otoriter di Inggris, yang memiliki sikap permusuhan terhadap kebebasan (McKlosky dan Zaller, 1984 : 172). Kebebasan individual menjadi faktor yang sangat berpengaruh karena kaum Puritan sebelumnya mengalami tekanan dan dominasi dari golongan bangsawan dan penguasa otoriter di Inggris. Kehidupan di bawah pemerintahan Inggris yang otoriter dan terbatasnya kebebasan pribadi di sana mendorong kaum Puritan untuk mencari lingkungan yang memberikan ruang lebih besar bagi kebebasan individual.

Ketika mereka menetap di Amerika, kebebasan individual menjadi nilai yang dihargai dan diupayakan. Kaum Puritan mencari kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama mereka, dan pergi dari Inggris memberi mereka kesempatan untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan bebas dari tekanan penguasa otoriter. Oleh karena itu, kebebasan individual tidak hanya menjadi aspirasi pribadi, tetapi juga menjadi pilar dalam pembentukan masyarakat Puritan di Amerika yang lebih demokratis dan terbuka.

Pada umumnya golongan bangsawan dan para penguasa di Kerajaan Inggris tersebut menganggap rakyat sebagai orang-orang yang tidak berpengetahuan, liar, dan sulit untuk dikendalikan. Dengan demikian mereka dianggap tidak memiliki tanggungjawab untuk mengatur dirinya sendiri ataupun masyarakat. Itulah sebabnya dengan adanya pengaruh besar gerakan reformasi, mereka berupaya mengubah ajaran, tatanan kehidupan gereja yang kaku atau otoriter (gereja Katolik Roma), dan mereka pun menanggapi hal ini secara reaksional (Parrington, 1930 : 15).

Dalam hal teologi, pada umumnya bangsa Inggris tidak suka memikirkan hal-hal yang dogmatik, sesuai dengan karakter Anglo Saxon. Mereka lebih cenderung

memikirkan bentuk-bentuk upacara gereja yang indah serta hal-hal yang bersifat praktis (Berkhof dan Enklaar, 1983 : 231). Ini menunjukkan ciri khas teologi di kalangan bangsa Inggris yang cenderung menghindari pemikiran yang terlalu dogmatik. Keengganan ini tercermin dari karakter Anglo-Saxon, yang lebih suka memfokuskan perhatian pada aspek-aspek praktis dan ritual dalam konteks keagamaan. Dalam kerangka ini, teologi dianggap lebih baik diakses melalui pengalaman dan kepraktisan daripada melalui penelitian dogmatik yang mendalam. Pemikiran praktis ini dapat mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk menekankan pengalaman dan bentuk upacara yang indah sebagai bagian integral dari kehidupan keagamaan mereka.

Preferensi terhadap bentuk-bentuk upacara gereja yang indah dan hal-hal praktis dalam teologi bangsa Inggris dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan pengalaman keagamaan yang lebih terlibat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada keindahan upacara gereja menunjukkan keinginan untuk menciptakan pengalaman keagamaan yang membangkitkan perasaan kekaguman dan keberkahan. Di samping itu, perhatian pada hal-hal praktis mungkin mencerminkan dorongan untuk mengaitkan keyakinan keagamaan dengan pandangan hidup sehari-hari, memperkuat relevansi agama dalam kehidupan seorang individu.

Pemahaman teologi yang cenderung menghindari aspek dogmatik dapat mencerminkan pendekatan yang lebih terbuka dan fleksibel terhadap keyakinan keagamaan di kalangan masyarakat Inggris. Mungkin ada kecenderungan untuk menerima keragaman pandangan dan praktik keagamaan, dengan menempatkan penekanan lebih besar pada pengalaman bersama dan aspek-aspek yang dapat dihayati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan suasana keagamaan yang lebih dinamis dan terbuka terhadap interpretasi individual,

seiring dengan preferensi untuk ritus dan praktik-praktik yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Demikian pula halnya dengan kaum Puritan, ajaran dan pemikiran mereka yang Calvinis sejati itu dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya bangsa Inggris sehingga mereka cenderung lebih bersikap praktis. Hal ini nampak jelas terlihat dalam kehidupan mereka yang menjauhkan diri dari segala kemewahan dan kesenangan dunia. Mereka lebih mementingkan untuk mengevaluasi dirinya di hadapan Tuhan dan meng kuduskan hari Sabath (Berkhof dan Enklaar, 1983: 226).

Pengaruh Sistem Ekonomi Kolonial

Perekonomian Amerika pada periode kolonial sebagian besar bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan. Para pendatang yang umumnya berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, bebas untuk memiliki tanah dan mengolahnya menjadi tanah perkebunan. Setiap hari mereka bekerja keras untuk mengolah tanah dan sebagian waktunya digunakan untuk beribadah serta aktivitas lain.

Ketekunan dan kerja keras mereka membawa hasil-hasil yang cukup menggembirakan, dan hasil perkebunan mereka dipasarkan sampai ke luar negeri. Dengan demikian pertanian atau perkebunan menjadi pekerjaan yang komersial. Produksi kayu-kayuan dan jenis-jenis hasil produksi hutan lainnya juga mendatangkan keuntungan yang besar melalui kegiatan ekspor. Situasi ini membuat mereka semakin eksploitatif terhadap sumber-sumber daya alam (Bushman, 1967: 26).

Para pemimpin agama pada saat itu senantiasa menekankan dan memperingatkan dalam setiap acara keagamaan bahwa setiap orang harus berusaha memelihara keharmonisan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Kerja keras adalah panggilan Ilahi bagi

setiap orang yang meyakini. Hasil-hasil yang diperoleh sebaiknya tidak dipergunakan untuk kepentingan sendiri saja, melainkan dimanfaatkan juga untuk membantu orang lain yang hidup dalam serba kekurangan dan mendukung kegiatan-kegiatan gereja.

Di dalam pelaksanaannya, pesan yang disampaikan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para pendatang itu tidak hanya bekerja keras untuk kepentingan syiar agama saja, melainkan juga untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Ketekunan dan kerja keras itu secara perlahan-lahan mengalihkan perhatian mereka dari masalah-masalah agama dan gereja ke hal-hal yang lebih bersifat duniawi atau mengejar kekayaan untuk kepentingan individu. Mereka merasa bahwa kerja bukan lagi merupakan panggilan Ilahi, melainkan juga demi memperoleh kenikmatan dan kepuasan individu (Bellah et al., 1986: 218). Muncul pula perasaan dan sikap saling berlomba untuk mengejar kekayaan dan melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Ini dipengaruhi oleh keyakinan Calvinisme yang menekankan konsep takdir atau predestinasi, yaitu keyakinan bahwa sebagian kecil orang telah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan sementara yang lainnya ditakdirkan untuk kebinasaan. Pemahaman ini bisa mengarah pada pembenaran tindakan eksploitasi alam sebagai upaya untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan sebagai tanda berkat Tuhan.

Doktrin keselamatan oleh anugerah yang ditekankan dalam Calvinisme mungkin menciptakan pemahaman bahwa kesuksesan materi adalah tanda anugerah dan keselamatan. Dalam konteks ini, kaum Puritan yang serakah terhadap eksploitasi alam mungkin melihat kesejahteraan materi sebagai bukti keberkahan Tuhan. Oleh karena itu, keinginan untuk memperoleh kekayaan melalui eksploitasi alam bisa menjadi ekspresi dari keyakinan teologis mereka yang mendalam. Konsep Calvinisme tentang "pengelolaan" dunia sebagai tanggung

jawab manusia kepada Tuhan (stewardship) dapat menjadi landasan pembenaran untuk eksploitasi alam. Kaum Puritan mungkin memandang alam sebagai sumber daya yang diberikan Tuhan untuk dikelola oleh manusia. Keserakahan mereka terhadap eksploitasi alam bisa diartikan sebagai bentuk pengelolaan yang dianggap memenuhi tugas teologis untuk memperluas keberhasilan dan dominasi manusia atas ciptaan Tuhan. Inilah yang memunculkan sistem ekonomi yang kapitalistik yang mempunyai watak imperialistik.

Bab 6

Kehidupan Beragama Kaum Puritan di Amerika

Kehidupan beragama kaum Puritan di Amerika Serikat ditandai dengan komitmen yang kuat terhadap penafsiran mereka terhadap agama Kristen Protestan. Inti dari kepercayaan Puritan adalah gagasan tentang predestinasi, gagasan bahwa Tuhan telah menentukan siapa yang akan diselamatkan, menekankan pentingnya menjalani kehidupan yang saleh dan bermoral. Kaum Puritan sangat menekankan kesalehan pribadi dan berusaha menciptakan masyarakat yang mencerminkan cita-cita agama mereka.

Kehidupan keagamaan kaum Puritan berpusat pada ibadah berjamaah dan mempelajari Alkitab. Setiap komunitas memiliki gereja jemaatnya sendiri, dan kehadiran dalam kebaktian adalah wajib. Khotbah-khotbahnya, yang biasanya disampaikan oleh para pendeta terpelajar, berfokus pada prinsip-prinsip teologis, bimbingan moral, dan penerapan ajaran alkitabiah dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Puritan percaya pada pendekatan ibadah yang disiplin dan teratur, dan ibadah mereka ditandai dengan kesederhanaan, kekhidmatan, dan penekanan kuat pada kata-kata yang diucapkan.

Kehidupan keagamaan puritan juga melampaui gereja untuk mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Konsep “panggilan” atau panggilan merupakan bagian integral dari pemahaman mereka tentang pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari. Kaum Puritan memandang pekerjaan mereka bukan hanya sebagai sarana penghidupan tetapi sebagai cara untuk memenuhi panggilan ilahi mereka, yang mencerminkan komitmen mereka untuk menjalani kehidupan yang saleh dalam

segala aspek. Integrasi prinsip-prinsip agama secara holistik ke dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan bagi etos kerja Puritan yang khas, yang menekankan ketekunan, penghematan, dan tanggung jawab dalam urusan duniawi sebagai cerminan pengabdian spiritual. Secara keseluruhan, kehidupan beragama kaum Puritan di Amerika Serikat dicirikan oleh komitmen mendalam terhadap bentuk Kekristenan Protestan yang disiplin, bermoral, dan berorientasi pada komunitas yang meninggalkan dampak jangka panjang pada perkembangan budaya dan sosial di koloni-koloni Amerika.

Kaum Puritan di Amerika Serikat merupakan orang-orang yang aktif dan bersemangat dalam melakukan berbagai aktivitas hidup. Mereka berjuang untuk kelangsungan kehidupan di dunia baru dan niat utama mereka untuk beribadah pun tak terabaikan. Keyakinan ini begitu melekat dalam hati mereka karena mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan.

Berbagai hambatan, rintangan, kegagalan dan bahkan kekalahan yang mereka alami, tidak sedikit pun dapat mengecilkan hati dan semangat mereka demi mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Hal ini demi mewujudkan cita-cita mereka membangun suatu masyarakat atas dasar agama di Amerika. Cotton Mather mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan, baik itu hal yang sepele maupun besar dan mengandung bahaya merupakan pujian Tuhan asalkan dilakukan dengan semangat kebenaran (Werkmeister, 1949 : 18). Dalam pandangan Puritan, setiap aspek kehidupan, termasuk pekerjaan sehari-hari, dapat menjadi sarana untuk menyatakan kesetiaan dan dedikasi kepada Tuhan. Pentingnya semangat kebenaran dalam setiap tindakan mencerminkan nilai-nilai Puritan yang menekankan moralitas, integritas, dan ketaatan terhadap ajaran agama. Kehidupan sehari-hari dapat dianggap sebagai bentuk

ibadah, dan tindakan apapun dapat dianggap sebagai pujian kepada Tuhan jika dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan ajaran agama.

Sikap optimistis yang besar inilah yang mampu membuat mereka bertahan dan berani menghadapi berbagai cobaan hidup. Mereka yakin bahwa kemuliaan surgawi menanti mereka bila mereka mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup di dunia karena hal ini merupakan ujian bagi iman mereka. Bagi mereka, penderitaan dan penganiyaan sebagaimana kesuksesan dan kekayaan dipandang sebagai bagian dari rencana Ilahi, meskipun kadang terlalu sulit untuk menerimanya. Mereka percaya pula bahwa Tuhan telah menentukan nasib atau kondisi kehidupan manusia selama hidup di dunia, tinggal bergantung kepada manusia itu sendiri untuk memilih berbuat baik atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Di samping itu dalam melakukan berbagai aktivitas hidup, kaum Puritan senantiasa berpegang teguh pada prinsip dan etika mereka yaitu bekerja keras dan mengutuk kemalasan, menganjurkan untuk hidup hemat dan mengecam pemborosan, menjauhkan diri dari kesenangan duniawi, mematikan keinginan jasmani, bersikap jujur, sederhana, memiliki motivasi yang besar atau berkemauan keras, pengendalian diri, disiplin, dan taat pada prinsip atau taat kepada kehendak Ilahi (McClosky dkk.,1984: 104–105 dan Gabriel, 1991 :174).

Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai ini pun mengalami perubahan. Berbagai bentuk kesenangan dan kenikmatan dunia serta prestasi ekonomi menjadi ukuran status sosial seseorang. Warga masyarakat mulai kritis terhadap keadaan dan aktivitas orang lain. Peristiwa ini sebagaimana yang tertuang dalam kesusasteraan awal Amerika dalam tulisan Thomas Morton dan William Bradford tentang “The Incident at Merry Mount” yang memberikan informasi dan sekaligus sebagai ‘mental

evidence' mengenai intoleransi kaum Puritan pada masa kolonial di Amerika. Dalam karya tersebut, Morton dan Bradford menggambarkan bahwa pada saat itu masyarakat membuat 'maypole' yaitu tugu atau lambang yang digunakan sebagai tempat pemujaan untuk memeriahkan perayaan hari-hari penting, misalnya acara sebagai tanda rasa syukur kepada dewa yang telah memberikan hasil panen yang berlimpah, perdagangan senjata yang memperoleh keuntungan yang besar. Acara tersebut dilaksanakan secara sangat meriah, bernyanyi sambil bergandengan tangan dan menikmati berbagai macam minuman keras. Mereka menempelkan puisi pada *maypole* guna memperjelas tujuan dan arti penyelenggaraan acara tersebut.

Aktivitas ini mendapat perhatian dan kecaman keras dari kaum Puritan yang membenci segala bentuk kesenangan dan kenikmatan dunia yang berlebih-lebihan. Mereka menangkap dan menahan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, terutama Morton sebagai pemilik perkebunan. Ia dibawa ke Inggris guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap bertentangan dengan pernyataan raja. Dengan sangat angkuh ia membantah dan menolak segala tuduhan yang diberikan kepadanya. Setelah dinyatakan bebas, ia kembali lagi ke Amerika, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan lagi (Baym et al., 1989).

Peristiwa tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa semua orang dapat menjadi pengawas atas kesejahteraan dan kehidupan orang lain. Hooker mengatakan bahwa mereka merasa memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan orang lain dan menjadi hakim atas kesalahan yang dibuat oleh orang lain" (Werkmeister, 1949 : 19). Meskipun disatu pihak mereka berkeyakinan bahwa kesejahteraan dan kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang merupakan tanda bahwa Tuhan memberkati orang tersebut karena semangat dan sikap religiusnya yang tinggi.

Mitos Orang-orang Pilihan

Konsep keyakinan sebagai "the chosen people," yang diyakini sebagai pemilihan khusus oleh Tuhan, telah mendalam dan meluas di berbagai budaya dan agama. Namun, dalam konteks tertentu seperti yang diutarakan oleh Werkmeister (1949: 18), keyakinan ini dapat mengakibatkan dampak negatif, termasuk sikap fanatik, intoleransi, dan kemunafikan.

Pertama-tama, keyakinan sebagai "the chosen people" sering kali membawa dampak positif dalam memberikan identitas dan tujuan bagi komunitas agama tertentu. Pemahaman bahwa mereka dipilih oleh Tuhan dapat memberikan motivasi spiritual dan moral bagi para penganutnya. Hal ini dapat menjadi dasar moralitas yang kuat dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Namun, di sisi lain, keyakinan ini juga dapat menjadi sumber konflik dan intoleransi. Pemikiran bahwa satu kelompok dianggap sebagai "the chosen people" dapat merangsang sikap eksklusif dan merendahkan terhadap kelompok lain yang dianggap tidak dipilih. Hal ini bisa mengakibatkan tindakan intoleransi terhadap mereka yang memiliki keyakinan atau identitas berbeda, menciptakan konflik dan ketegangan antar komunitas.

Sikap fanatik juga dapat muncul sebagai konsekuensi dari keyakinan ini. Ketika seseorang atau kelompok merasa secara eksklusif dipilih oleh Tuhan, hal ini dapat menciptakan kecenderungan untuk melihat kebenaran mutlak dalam ajaran mereka, yang dapat berujung pada penolakan terhadap pandangan atau keyakinan lainnya. Fanatisme semacam ini dapat memicu tindakan ekstrem dan kekerasan atas nama keyakinan.

Intoleransi yang muncul dari keyakinan sebagai "the chosen people" juga dapat berkaitan dengan ketidakmampuan untuk menerima perbedaan dan keberagaman. Komunitas yang merasa dipilih oleh Tuhan

mungkin sulit menerima atau menghormati keyakinan dan identitas yang berbeda, sehingga menciptakan konflik antaragama dan antarbudaya. Selain itu, kemunafikan dapat muncul ketika keyakinan sebagai "the chosen people" tidak dihayati secara konsisten dalam praktik kehidupan sehari-hari. Seseorang atau kelompok dapat memandang diri mereka sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi perilaku mereka mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai moral atau etika yang dianjurkan oleh keyakinan tersebut.

Dalam sejarah, banyak contoh di mana keyakinan sebagai "the chosen people" menjadi dasar untuk tindakan kolonialisme atau imperialisme. Pembeneran bahwa satu kelompok memiliki hak eksklusif atas tanah atau sumber daya dapat memicu penindasan terhadap kelompok lain yang dianggap tidak dipilih. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua kelompok yang memandang diri mereka sebagai "the chosen people" mengadopsi sikap fanatik, intoleran, atau munafik. Banyak juga yang menerjemahkan keyakinan ini menjadi tanggung jawab moral yang lebih besar, seperti berkontribusi pada kesejahteraan umum atau berupaya menciptakan perdamaian.

Dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul dari keyakinan sebagai "the chosen people," dialog antaragama dan interkultural menjadi penting untuk membangun pemahaman bersama dan mengatasi kesalahpahaman. Diperlukan pendekatan yang membuka ruang untuk toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan dan identitas.

Para pelaut, petualang, pedagang dan pengusaha perkebunan adalah yang pertama kali menjadikan mitos mengenai bangsa Inggris sebagai bangsa terpilih" (Johnson, 1997 : 20). Keyakinan ini dapat diartikan sebagai perasaan bahwa tugas mereka untuk menjelajahi dunia dan memperluas wilayah kekuasaan Inggris adalah suatu tugas yang diberikan oleh Tuhan. Pedagang dan pengusaha

perkebunan Inggris, yang mungkin terlibat dalam eksplorasi dan ekspansi kolonial untuk mencari keuntungan ekonomi, bisa jadi menggunakan ideologi "bangsa terpilih" sebagai pembenaran moral dan spiritual atas tindakan ekonomi mereka. Konsep ini memberikan legitimasi kepada mereka untuk mengeksploitasi sumber daya dan penduduk lokal dengan keyakinan bahwa mereka adalah "bangsa terpilih" yang memimpin dan membimbing bangsa-bangsa lain.

Mitos tentang bangsa terpilih juga memberikan dorongan moral bagi para pelaut dan petualang, membentuk identitas kolektif mereka sebagai pionir dan penjelajah dunia yang membawa peradaban dan nilai-nilai Eropa ke tempat-tempat yang mereka kunjungi. Ini menciptakan suatu narasi heroik tentang eksplorasi dan penaklukan, di mana mereka melihat diri mereka sebagai agen dari "bangsa terpilih" yang membawa peradaban dan kemajuan ke wilayah-wilayah baru. Kepercayaan akan superioritas bangsa mereka dapat mendorong perlakuan yang tidak adil terhadap budaya, sumber daya, dan masyarakat pribumi yang mereka temui selama penjelajahan dan kolonisasi.

Penting untuk diingat bahwa sementara mitos bangsa terpilih dapat memberikan motivasi bagi pelaut dan pedagang Inggris, pandangan ini juga memberikan dasar untuk imperialisme dan ekspansi kolonial yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan dalam interaksi dengan bangsa dan budaya lain. Di tengah interpretasi yang beragam ini, penting untuk menyadari bahwa pemahaman mengenai bagaimana keyakinan bangsa terpilih dipergunakan dan diartikan oleh para pelaut, petualang, pedagang, dan pengusaha perkebunan Inggris selama periode sejarah tertentu dapat bervariasi dan sangat tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi pada waktu itu.

Undang-Undang Anti Bid'ah

Pada tahun 1645 keluar pula Undang-undang Anti Bid'ah. Isi undang-undang tersebut yaitu ancaman untuk mengucilkan siapa saja yang tidak mengakui keabadian jiwa, kebangkitan kembali, dosa warisan, penebusan Kristus dan baptis bagi anak-anak. Hukuman juga dilakukan bagi siapa saja yang menghina Kitab Suci dan pendeta, serta lalai menghadiri acara ritual keagamaan (Horton dan Edward, 1974 : 30 –31).

Undang-undang ini menetapkan serangkaian prinsip kepercayaan dan praktek keagamaan yang wajib diakui oleh masyarakat. Ancaman pengucilan diberlakukan terhadap mereka yang menolak untuk mengakui keyakinan tertentu, seperti keabadian jiwa, kebangkitan kembali, dosa warisan, penebusan Kristus, dan praktik pembaptisan bagi anak-anak. Selain itu, undang-undang ini menegaskan larangan menghina Kitab Suci dan pendeta, serta mengatur hukuman bagi mereka yang tidak menghadiri acara ritual keagamaan.

Undang-undang ini mencerminkan kontrol yang ketat terhadap kebebasan beragama dan penegakan ketertiban keagamaan di masyarakat pada saat itu. Ancaman pengucilan dan hukuman menunjukkan konsekuensi serius yang dihadapi oleh individu yang tidak mematuhi norma-norma keagamaan yang ditetapkan oleh penguasaan. Selain itu, Undang-undang Anti Bid'ah menciptakan suatu lingkungan di mana penolakan terhadap keyakinan dan praktik keagamaan yang ditetapkan dianggap sebagai tindakan subversif yang dapat merusak stabilitas sosial dan moralitas masyarakat.

Konteks sejarah ini menunjukkan adanya kontrol ketat terhadap interpretasi keagamaan dan nilai-nilai yang diakui oleh penguasaan pada waktu itu. Undang-undang ini mencerminkan dinamika politik dan keagamaan pada masa itu, di mana penegakan doktrin keagamaan tertentu

menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan dan stabilitas sosial.

Berbagai aktivitas warga masyarakat terus diawasi oleh peraturan yang kaku dan keras. Mereka percaya bahwa ajaran merekalah satu-satunya yang paling benar sebagai pengganti sistem agama Katolik Roma. Sikap-sikap ini pula yang menyebabkan mulai munculnya benih-benih perpecahan di dalam paham puritanisme itu sendiri.

Hubungan komunikasi antara pemukiman penduduk tidak berjalan lancar. Dengan demikian aktivitas kehidupan masyarakat mulai mandeg karena kontak budaya yang dapat memudahkan kehidupan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berita tersebar secara lambat dan hanya dari mulut ke mulut. Akibatnya kepentingan lokal merupakan hal yang dianggap paling tinggi dan setiap komunitas yang terdiri dari beberapa gelintir orang saja menjadi lahan yang subur bagi munculnya kecemburuan, prasangka, dan rasa antipati atau tidak senang terhadap kelompok lain.

Kepercayaan orang-orang terhadap tahayul menyebar luas ke mana-mana yang turut mempengaruhi situasi pada saat itu. Di mana-mana orang yang dituduh sebagai tukang sihir dikejar, diadili, dan dihukum secara kejam. Sikap kaum Puritan seperti ini merupakan wujud ketegasan mereka menolak ilmu sihir karena bertentangan dengan prinsip dasar ajaran yang mereka anut. Mereka dengan tegas mengutuk aktivitas atau ritual keagamaan tradisional yang bersifat magis dan menyembah berhala. Di samping itu kaum Puritan tanpa rasa belas kasihan mengucilkan dan menganiaya para Quaker karena kepercayaan kaum Quaker bahwa setiap orang memiliki pelita batin (Marsden, 1990). Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar ajaran kaum Puritan yang senantiasa berpegang teguh pada Bible. Mereka menolak pandangan bahwa Tuhan bersabda kepada manusia melalui indrawi manusia (Henretta, dkk.

1877: 30).

Peristiwa tragis yang terjadi di Massachusetts berpengaruh terhadap perkembangan ajaran puritanisme itu sendiri. Semua yang bersifat agung, keyakinan tentang belas kasih, kepercayaan terhadap keajaiban, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendak Ilahi secara perlahan-lahan melemah. Di samping itu pula perubahan-perubahan yang bersifat positif yaitu berkembangnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Para buruh yang mempunyai keterampilan menjadi warga kota yang makmur, kaya, dan terhormat berkat usaha dan kerja keras mereka, tetapi mereka tetap yakin bahwa kedua hal tersebut di atas merupakan rahmat dan anugrah Tuhan.

Bab 7

The Scarlet Letter:

Nuansa Intoleransi Kaum Puritan di Abad IX

Bab ini lebih khusus membahas masalah yang berhubungan dengan intoleransi kaum Puritan terhadap masyarakat Massachusetts pada masa kolonial. Berbagai peristiwa yang terjadi di daerah tersebut telah menarik minat para sastrawan Amerika untuk mengkaji dan mengungkapkannya melalui hasil-hasil karya sastra mereka. Salah satu sastrawan Amerika yang mengkaji masalah ini adalah Nathaniel Hawthorne. Keberadaan kaum Puritan pada saat itu yang terefleksi melalui hasil karyanya “The Scarlet Letter” digunakan sebagai *mental evidence* dalam membahas permasalahan ini.

Latar Belakang Kehidupan, Karier, dan Karya Sastra Nathaniel Hawthorne

Nathaniel Hawthorne lahir di kota Salem, Massachusetts pada tanggal 4 Juli 1804 dan meninggal dunia pada tahun 1864. Ayahnya bernama Nathaniel Hathorne, seorang nahkoda yang meninggal dunia di Dutch Guiana pada saat ia berusia 4 tahun dan ibunya bernama Elizabeth Manning Hathorne. Ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara, yang tertua bernama Elizabeth (1802) dan yang paling bungsu bernama Maria Louisa (1808). Ia menikah dengan Sophia Peabody pada tanggal 9 Juli 1842 dan dikaruniai tiga orang anak, Una (1844), Julian (1846) dan Rose (1851).

Nathaniel berasal dari keturunan keluarga Puritan William Hathorne yang sangat terkenal karena mengadili kaum Quaker. Hawthorne mengatakan bahwa kakeknya William Hathorne “*was a soldier, legislator, judge; he was a ruler in the church; he had all the Puritanic traits, both good and evil. He was likewise a better persecutor; as witness the Quakers...*” (Hawthorne, 1987 : 7-8).

Di samping itu pula salah seorang anak William Hathorne yang bernama John merupakan salah seorang tokoh terkemuka atau utama dalam perburuan tukang sihir di kota Salem pada akhir abad ke-17. Hawthorne dalam novel *The Scarlet Letter* mengemukakan bahwa keturunan pertama leluhur itu mewarisi pula kekejaman ayahnya. Anaknyanya (John) telah menarik perhatian masyarakat karena ia melakukan pembunuhan terhadap para tukang sihir. Perbuatan ini meninggalkan dosa yang tidak akan pernah terhapuskan (1989: 8).

Meskipun Hawthorne sering berada jauh di luar kota Salem, kenangan akan tempat ini merupakan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Berbagai tragedi berdarah yang dilakukan oleh para leluhurnya mempengaruhi perasaan dan pikiran Hawthorne, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk karya-karya sastra. Sebab itu karya-karyanya sering berisi kritik keras terhadap sikap kaum Puritan.

Wilder dkk. dalam buku "This is America's Story" mengatakan bahwa Nathaniel Hawthorne banyak menulis kehidupan di New England, yang kemudian diimplementasikan dalam karyanya "The Great Stone Face" dan novel "The House of the Seven Gables" (1983 : 363) . Para ahli sarjana pada abad ke- 20 mengatakan pula bahwa Hawthorne dihargai dan dipercaya atas hasil karya dan tulisannya yang sangat kritis tentang sejarah kolonial dibandingkan dengan masalah politik (Baym et al., 1989 : 1081 -1082).

Kematian ayahnya turut mempengaruhi situasi dan kondisi kehidupan keluarganya yang menyebabkan mereka pindah ke Maine pada tahun 1818. Sebagai seorang anak yang bersifat serius dan suka menyendiri, ia mempunyai hobi membaca. Sebab itu pada tahun 1821 ia masuk ke Bowdoin College di Brunswick, Maine. Pada tahun 1825 ia menyelesaikan studinya dan setelah itu

kembali lagi ke kota Salem. Gaya hidup maupun pola pikirnya banyak dipengaruhi oleh tiga teman akrabnya yaitu Franklin Pierce, Horatio Bridge dan Henry Wadsworth Longfellow.

Nathaniel Hawthorne pertama kali mulai belajar menulis sebuah novel pada saat ia kuliah di Bowdoin College. Ia menulis sebuah novel remaja “Fanshawe”, yang tokoh utamanya menyerupai Nathaniel dalam berbagai hal. Hasil karyanya tersebut diterbitkan pada tahun 1828 atas biaya sendiri dan tanpa mencantumkan nama pengarangnya. Ia menyesali tindakan tersebut dan berusaha memusnahkan semua kopian buku yang belum sempat terjual. Hasil karyanya tersebut kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Meskipun demikian ia tetap saja menulis dan menciptakan karya sastra, yang salah satu di antaranya adalah “Seven Tales of My Native Land.”

Pada tahun 1836 Hawthorne pindah ke kota Boston dan bekerja sebagai tenaga editor di *American Magazine of Useful and Entertaining Knowledge*. Perusahaan tersebut hanya beroperasi selama beberapa bulan saja dan setelah itu bangkrut. Hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap situasi dan kondisi kehidupannya. Sebab itu pada tahun berikutnya ia menerbitkan hasil karyanya “Twice Told Tales” yang terjual lebih dari seribu eksemplar dalam jangka waktu dua belas bulan saja.

Meskipun ketenarannya sebagai seorang penulis mulai meningkat, ia menyadari bahwa ia tidak dapat membiayai kehidupan keluarganya hanya dengan menulis saja. Sebab itu ia menerima tawaran kerja sebagai juru ukur di kantor Pabean pada tahun 1839. Setelah itu kariernya meningkat lagi sebagai pengawas distrik Salem, tetapi nasib malang pun menyimpannya lagi. Pada tahun 1849 ia diberhentikan dari jabatannya karena pengaruh pergantian kekuasaan politik yang sedang bergejolak saat itu. Situasi ini pun sangat berpengaruh terhadap kehidupan Hawthorne dan keluarganya.

Pada tahun 1850 ia menerbitkan hasil karyanya kembali “The Scarlet Letter” yang mendapat perhatian dan sambutan hangat dari masyarakat. Berkat hasil karyanya tersebut ia mampu membeli sebuah rumah bagi keluarganya. Setelah itu menyusul pula dua karya sastra lainnya “The House of the Seven Gables” yang diterbitkannya pada tahun 1851 dan “The Blithedale Romance” yang dipublikasikan pada tahun 1852. Berkat hasil karya-karya sastranya tersebut, Hawthorne menjadi pengarang terkenal.

Pada bulan Maret 1853 ia beserta keluarganya pindah ke Inggris. Ia diangkat menjadi konsul Amerika di Liverpool dan Manchester. Pada tahun 1860 ia masih sempat menerbitkan hasil karya “The Marble Faun”. Di samping itu juga ia masih tetap mencatat berbagai pengalaman suka maupun duka selama berada di Inggris, perjalanannya ke Italia, dan Prancis. Setelah berakhir masa tugasnya di Inggris ia kembali lagi ke Massachusetts, tempat ia terus berkarya sampai ia meninggal pada tahun 1864.

Novel ‘The Scarlet Letter’

“The Scarlet Letter” merupakan suatu karya Hawthorne yang besar, yang melukiskan situasi kehidupan sosial keagamaan dan kemasyarakatan kaum Puritan pada masa kolonial di Massachusetts, Amerika. Di samping itu pula novel ini sekaligus mengungkapkan kritikan atau kecaman terhadap nilai-nilai ajaran kaum Puritan yang dianggapnya tidak pernah hilang atau luntur.

Hasil karya Nathaniel Hawthorne ini pertama kali dipublikasikan dalam bentuk novel pada tahun 1850 dan secara terus menerus dicetak kembali. Berkat keterampilan atau kemahiran Nathaniel Hawthorne di dalam mengekspresikan ide-idenya, novel ini masuk dalam peringkat sepuluh besar karya sastra atau novel Amerika

(Magill, 1989: 795). Selain itu pula novel ini banyak mendapat pujian dari para kritikus sastra, khususnya di Amerika.

Inspirasi atau ilham yang muncul di dalam pikiran Hawthorne di dalam menulis “The Scarlet Letter” ini merupakan suatu hal yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran kisah ini (Hawthorne, 1989: 2). Pernyataan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa karya sastra bukan lahir dari alam pikiran yang kosong. Karya sastra hanya dapat dipahami secara menyeluruh apabila dihubungkan dengan aspek sosial budaya yang melatarbelakanginya.

Sebagai suatu karya sastra, novel menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain yang bersifat imajinatif (Nurgiyantoro, 2000 : 4). Selain itu pula novel dipandang sebagai hasil dialog, yang “mengangkat dan mengungkapkan kembali berbagai permasalahan hidup dan kehidupan tersebut setelah melewati penghayatan yang intens, seleksi subjektif, dan diolah dengan daya imajinatif dan kreatif pengarang” (Nurgiyantoro, 2000 : 71).

Guna lebih menarik minat dan sekaligus mensosialisasikan pesan yang ingin disampaikan dalam novel ini, pada tahun 1995 Roland Joffe memproduksi hasil karya Hawthorne ini ke dalam bentuk film. Hal ini dilakukan karena film merupakan sebuah kebudayaan populer, yang banyak diminati oleh warga masyarakat dari berbagai kalangan usia.

Dengan demikian diharapkan bahwa pesan yang terdapat dalam film ini dapat terwujud. Di samping itu juga film secara terus-menerus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, baik dari segi teknik pembuatan dan

penyajian, agar lebih menarik untuk dilihat dan diteliti dari berbagai sudut pandang.

Salah satu aspek kehidupan sosial masyarakat kaum Puritan yang terlihat dalam film “The scarlet Letter” ini adalah mengenai intoleransi kaum Puritan yang berkembang pada masa kolonial di Massachusetts, Amerika. Selain itu juga tema yang disampaikan dalam film ini yaitu mengisahkan pelanggaran moral yang dilakukan oleh salah seorang warga masyarakat. Perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran yang mereka anut tersebut, dilakukan oleh seorang perempuan berparas cantik yang hidup di kalangan kaum Puritan di kota Boston pada tahun 1650-an.

Pada awalnya Hester Prynne dituduh sebagai salah seorang yang menjelek kitab Injil dalam suatu pertemuan yang mayoritas dihadiri oleh kaum perempuan. Ia membantah dan menentang setiap pertanyaan yang diberikan oleh para hakim dan pemimpin kaum Puritan pada saat itu. Tuduhan tersebut beralih pada kecurigaan para hakim mengenai kondisi fisik Hester Prynne yang menimbulkan berbagai pemikiran atau tanggapan negatif, berdasarkan laporan salah seorang warga masyarakat. Ia yang diduga sudah menjadi janda, dicurigai telah mengandung anak di luar pernikahan. Atas tuduhan ini, ia dipaksa untuk mengungkapkan dosa dan menyebutkan nama ayah anak yang ada di dalam kandungannya, di hadapan seluruh warga masyarakat di daerah tersebut. Ia mengakui tuduhan tersebut, tetapi dengan tegas ia menolak untuk menyebutkan nama ayah anak yang berada di dalam kandungannya. Hal ini makin menimbulkan kemarahan Gubernur Bellingham yang berkuasa di koloni Massachusetts pada saat itu.

Sementara suaminya Roger Chillingworth yang diperkirakan telah meninggal dunia, secara tiba-tiba keluar dari hutan. Ia menyaksikan keberadaan istrinya berdiri di atas panggung, yang dipaksa untuk mengakui perbuatan

dosa yang telah dilakukannya. Berdasarkan penolakan pengakuan dosa tersebut, Hester Prynne dipenjara dan harus mengenakan huruf “A” (adultery) yang berwarna merah tua di dadanya, seumur hidup.

Hukuman berat yang diberikan oleh para tokoh masyarakat dan agama terhadap warga masyarakat, tidak hanya berlaku bagi yang melakukan pelanggaran moral seperti ini. Hawthorne menjelaskan bahwa mungkin saja ada pelayan yang malas atau seorang anak yang tidak berbakti terhadap kedua orang tuanya, diserahkan ke penguasa sipil dan diberikan hukuman cambukan. Begitu pula dengan orang Quaker, para tukang sihir, atau penganut aliran murtad lain, akan diusir ke luar kota (Massachusetts). Apabila mereka kembali lagi, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat (1989: 47 -48). Pada saat itu pula belum ada hukum resmi yang diterapkan di daerah tersebut sehingga amat tercampur aduk antara aturan hukum dan agama. Hawthorne menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dianggap bertentangan atau menyimpang dari ajaran kaum Puritan, dihukum sesuai dengan penilaian masyarakat. Ia menyoroti bahwa hukuman yang diterima oleh seseorang di dalam masyarakat Puritan sangat bergantung pada penilaian kolektif masyarakat tersebut. Artinya, kepatuhan terhadap ajaran Puritan menjadi parameter utama dalam menentukan apakah seseorang melanggar norma atau tidak. Sistem ini menciptakan suasana di mana norma-norma moral dan agama sangat dijunjung tinggi, dan hukuman didasarkan pada persepsi kelompok.

Hawthorne juga menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Puritan, konsep kesalahan atau penyimpangan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum formal, tetapi lebih kepada evaluasi moral dan sosial oleh masyarakat. Hukuman tidak hanya merupakan akibat dari pelanggaran hukum formal, melainkan juga hasil dari penilaian sosial terhadap kesalahan moral dan spiritual.

Pendekatan ini mencerminkan kekakuan dan ketatnya kontrol sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Puritan. Dalam konteks ini, "bertentangan" atau "menyimpang" dari ajaran Puritan tidak hanya mencakup pelanggaran hukum yang konkret, tetapi juga mencakup tindakan atau sikap yang dianggap tidak sesuai dengan norma moral dan agama yang dianut oleh masyarakat Puritan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Puritan sangat memantau perilaku individu secara holistik, dan hukuman dapat diberikan tidak hanya karena pelanggaran hukum, tetapi juga karena ketidaksesuaian dengan nilai-nilai moral Puritan. Pernyataan ini memberikan gambaran tentang bagaimana kepatuhan terhadap norma-norma agama dan moral di masyarakat Puritan dapat memainkan peran sentral dalam menentukan hukuman.

Ahlstrom dalam buku "A Religious History of the American People" mengemukakan bahwa "... *although there was as yet no law against Quakers in Massachusetts, the two (Quaker Woman, Mary Fisher, and Ann Austin) were hurried off jail, stripped of all their clothing, and inspected for tokens of witchcraft. After five weeks, the captain of the Swallow was placed under a 100-pound sterling bond to carry them back to Barbados* (1989: 47 -48)". Kalimat tersebut merinci suatu peristiwa historis di Massachusetts di mana dua Quaker, Mary Fisher dan Ann Austin, mengalami perlakuan yang tidak adil meskipun pada saat itu belum ada hukum yang melarang keberadaan Quaker di negara bagian tersebut. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang Quaker, tindakan yang diambil terhadap keduanya mencerminkan sikap intoleransi terhadap kelompok agama tersebut.

Meskipun belum ada undang-undang yang melarang Quaker, tindakan represif terhadap Mary Fisher dan Ann Austin sangat jelas. Mereka segera dibawa ke penjara, tanpa adanya dasar hukum yang jelas untuk tindakan tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa

walaupun mungkin tidak ada undang-undang secara eksplisit, tetapi sikap anti-Quaker sudah mewarnai kebijakan lokal. Perlakuan terhadap keduanya mencakup pemerasan lebih lanjut, di mana mereka tidak hanya dipenjarakan tetapi juga dikurung tanpa pakaian dan diperiksa mencari tanda-tanda sihir. Inspeksi semacam ini mencerminkan ketakutan dan paranoia yang melibatkan asumsi yang salah terhadap keyakinan Quaker, sering kali diidentifikasi secara keliru sebagai praktik sihir atau kepercayaan sesat.

Masa penahanan yang panjang – lima minggu – menunjukkan ketidakadilan lebih lanjut. Penghukuman ini seolah-olah tidak sebanding dengan pelanggaran yang mungkin dituduhkan kepada mereka, mengingat belum ada undang-undang yang dilanggar. Ini menyoroti betapa seriusnya ketidaksetujuan terhadap Quaker pada waktu itu. Perintah agar kapten kapal Swallow menjamin pengembalian Mary Fisher dan Ann Austin ke Barbados dengan membayar jaminan 100 pound sterling menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya bersifat lokal tetapi juga melibatkan otoritas pemerintah. Ini menandakan bahwa intoleransi terhadap Quaker bukan hanya bersifat terisolasi, tetapi juga memiliki dukungan dan keterlibatan dari pihak berwenang. Ini adalah gambaran tentang ketidaksetujuan dan perlakuan tidak adil terhadap Quaker di Massachusetts pada periode waktu tertentu, meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus melarang mereka pada saat itu. Kejadian ini mencerminkan atmosfer ketegangan agama dan ketidaksetujuan yang dapat ditemui dalam sejarah kolonial Amerika.

Dari berbagai macam ilustrasi yang digambarkan melalui novel dan film *The Scarlet Letter*, kita dapat melihat kondisi kehidupan sosial keagamaan dan kemasyarakatan kaum Puritan pada masa kolonial di Massachusetts, Amerika. Lebih khusus lagi melalui hasil karya Nathaniel Hawthorne ini, dapatlah memberikan

gambaran kepada kita mengenai intoleransi kaum Puritan terhadap keyakinan atau ajaran lain pada masa kolonial di Massachusetts, Amerika.

Kisah Intoleransi dalam Novel Scarlet Letter

Kaum Puritan yang datang ke Amerika pada abad ke-17 merupakan pemukim-pemukim awal di koloni Massachusetts, Amerika. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang berpendidikan dan mempunyai prinsip yang tegas. Sebab itu mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebudayaan Amerika. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan mereka datang ke Amerika di antaranya adalah untuk memurnikan ajaran Kristen sesuai dengan kitab Injil.

Nathaniel Hawthorne dalam novel dan film “The Scarlet Letter”, menggambarkan pula bahwa kaum Puritan meninggalkan tanah Inggris dan pindah ke Amerika semata-mata adalah untuk kebebasan menjalankan ajaran agama tanpa merasa takut dianiaya.

Setelah mereka hidup dan menetap di dunia baru, sikap mereka sangat jauh berbeda. Mereka secara terang-terangan menolak ajaran atau keyakinan lain yang bertentangan dengan ajaran yang mereka anut. Mereka menganiaya kaum Quaker, memburu orang-orang yang dicurigai sebagai tukang sihir, dan bahkan mengusir atau mengucilkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka.

Tindakan yang mereka lakukan ini sama sekali tanpa didasari oleh sikap kasih dan sayang terhadap sesama manusia. Berbagai bentuk penganiayaan kaum Puritan terhadap para misionaris kaum Quaker ini juga terjadi di daerah Massachusetts.

Corbett et al. dalam buku “Politics and Religion in the United States” menjelaskan bahwa mereka melarang para

misionaris kaum Quaker untuk mengadakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan penyebaran ajaran para kaum Quaker tersebut, tetapi para misionaris kaum Quaker tetap menjalankan aktivitas mereka. Akibatnya para pemimpin kaum Puritan pun menghukum mereka, dengan cara memotong telinga atau melubangi lidah mereka dengan menggunakan besi panas; bahkan ada yang sampai di hukum mati. Antara tahun 1659 dan 1661 para pemimpin kaum Puritan menghukum mati sebanyak empat orang kaum Quaker yang telah berani menentang mereka. Tindakan ini mencerminkan tingginya ketegangan antara dua kelompok agama yang memiliki keyakinan dan doktrin yang berbeda di Massachusetts pada waktu itu. Para pemimpin Puritan, yang mendominasi pemerintahan dan masyarakat, merasa terancam oleh kehadiran dan penyebaran ajaran Quaker yang dianggap menyimpang dari norma-norma Puritan. Sebagai tanggapan terhadap perlawanan dan penentangan yang dilakukan oleh kaum Quaker, para pemimpin Puritan mengambil langkah-langkah ekstrem dengan menghukum mati anggota kelompok tersebut.

Hukuman mati terhadap kaum Quaker pada periode ini mencerminkan intoleransi agama yang kuat dan keinginan para pemimpin Puritan untuk mempertahankan supremasi ideologi mereka. Tindakan ini juga mencerminkan bagaimana kebijakan pemerintah diarahkan untuk memastikan bahwa setiap bentuk oposisi atau ajaran yang dianggap bertentangan dengan keyakinan Puritan dapat dipadamkan secara tegas dan drastis. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati menunjukkan ketidakmampuan masyarakat Puritan pada saat itu untuk menerima perbedaan keyakinan dan pendekatan yang tidak sejalan dengan norma-norma mereka, bahkan jika itu berarti mengambil langkah-langkah ekstrem. Hukuman ini menjadi bagian dari sejarah Amerika yang menyoroti kompleksitas hubungan antara kebebasan beragama dan intoleransi di masa kolonial.

Werkmeister mengemukakan pula bahwa penyiksaan terhadap seorang Quaker, yang telanjang sebatas pinggangnya dan diikat pada kereta yang sedang berjalan kencang, punggungnya sobek dan berdarah terkena batu, salju dan es di sepanjang jalan yang dilewati (1989: 47-48). Peristiwa tragis ini sungguh tidak menggugah hati dan pikiran orang yang melihatnya, untuk mempertanyakan dan melawan sistem yang tidak manusiawi itu.

Peristiwa tragis lainnya yang dilakukan oleh kaum Puritan, dapat dilihat dalam film *The Scarlet Letter*.

Salah seorang tokoh yang muncul dalam film tersebut Mrs. Hibbins, dikejar-kejar oleh sepasukan tentara karena dicurigai melakukan praktek ilmu sihir. Ia melarikan diri dan bersembunyi di rumah Mrs. Prynne.

Mrs. Hibbins: The military. They have gone into my house and called me a witch. I have been named as a witch.

Pada saat itu juga muncullah sepasukan tentara, yang mendobrak pintu rumah Mrs. Prynne.

Hester Prynne: What's the meaning of this intruder?

Major: Step inside, woman. You know, the witch is in here.

Hester Prynne: Nobody inside, but myself, my child, and Miss Mituba. So when eyes you have no line, please go.

Pada saat yang bersamaan, datang pula pendeta Dimmesdale ke rumah Hester Prynne.

Major: Reverend Dimmesdale. It appear that we have cornered there is a witch. Here, in Mrs. Prynne's cottage.

Dimmesdale: If there is a witch inside this house major. I am sure, I found her.

Major: Right.

Pada akhirnya sepasukan tentara tersebut menemukan Mrs. Hibbins yang sedang bersembunyi di rumah Mrs. Prynne. Mereka menyeret, membawa, dan menyiksa Mrs. Hibbins selama dalam perjalanan menuju pusat kota. Situasi penangkapan terhadap Mrs. Hibbins dapat dilihat pada gambar 1. (The Scarlet Letter)



Gambar 1. Penangkapan terhadap salah seorang yang dicurigai melakukan praktek ilmu sihir (Sumber : Film The Scarlet Letter).

Fenomena sosial seperti ini berkembang pesat pada masa kolonial di Massachusetts, Amerika. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai konflik yang mengarah kepada sikap kemunafikan bagi setiap anggota masyarakat di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Di satu sisi kelihatannya warga masyarakat baik individu ataupun kelompok berpura-pura sangat taat beribadah, tetapi sesungguhnya mereka tidak taat beribadah.

Meskipun orang –orang seperti ini tidak mempunyai ikatan spiritual yang murni dengan Tuhan, mereka tetap menjaga dan menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara sesama warga masyarakat dan

ikut serta dalam gereja-gereja di daerah jajahan.

Seorang sejarawan Amerika mengatakan bahwa ketegangan ini adalah sentral dalam usaha membangun suatu bangsa yang didasarkan pada anggapan bahwa hukum moral Tuhan dan alam adalah yang paling berkuasa dan bahwa semua orang pertama kali terikat pada hukum, bukan keluarga, masyarakat maupun negara mereka (Kammen, 1985 : 78). Konsep bahwa hukum moral Tuhan dan alam memiliki kekuasaan tertinggi menunjukkan pengaruh dominan ajaran agama dalam membentuk dasar moral masyarakat. Keyakinan bahwa setiap individu terikat pertama-tama pada hukum moral, dan bukan pada keluarga, masyarakat, atau negara, menunjukkan bahwa moralitas individu dipandang sebagai dasar yang mendahului kedudukan sosial dan politiknya.

Sementara nilai-nilai moral dan agama dianggap sebagai fondasi utama, konflik muncul ketika berbagai keyakinan dan interpretasi moral bersaing untuk mendominasi dan membentuk arah bangsa. Pemahaman ini mencerminkan dinamika sosial yang memperjuangkan harmoni antara kebebasan individu dalam meresapi nilai-nilai moral dan kebutuhan akan kerangka sosial yang dapat membentuk dan menjaga persatuan nasional. Dengan memprioritaskan hukum moral Tuhan dan alam sebagai fondasi yang universal dan mendahului hukum negara, masyarakat diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai moral yang bersifat lebih luas dan mengatasi pembagian sosial. Meskipun menciptakan ketegangan, pandangan ini juga dapat dianggap sebagai upaya untuk menciptakan dasar moral bersama yang diharapkan menjadi perekat identitas nasional di Amerika. Pandangan tersebut di atas dapat dilihat gambarannya dalam salah satu episode film *The Scarlet Letter*.

Pada saat itu Hester Prynne baru saja tiba di Massachussetts dan untuk sementara ia tinggal atau bergabung dengan warga masyarakat Puritan yang lebih

dulu tiba di daerah tersebut. Pada saat makan malam bersama, ia terlibat dalam percakapan dengan beberapa orang tokoh terkemuka kaum Puritan di Massachusetts.

*Mrs. Stonehall: Mrs. Pryne, I hope you will be staying with us here, until your husband's arrival.
Hester Pryne: You must be kind Mrs. Stonehall, but I am intended on how should my own, as soon as possible. (sic !)*

Clergyman: Are thy alone?

Hester Pryne: Why, yes?

Mrs. Stonehall: It's not considered pitying for a young woman to live alone here.

Hester Pryne: But my husband has set me on his preparatory place with his arrival here. So that's what I intend to do.

Gov. Bellingham: Mrs. Pryne, the roles we live may think abruptly to newcomer.

But we have learned in the hard way without absolute order in all matters. We can not hope to survive here.

Clergyman: Roles, Mrs. Pryne, order, survival.

Hester Pryne: Would you have me to disobey my husband?

(The Scarlet Letter)

Pernyataan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa betapa kerasnya peraturan dan tata tertib yang mengatur setiap individu ataupun kelompok di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang terjadi pada saat itu di Massachusetts, Amerika. Semua orang harus patuh dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan di daerah tersebut. Apabila seseorang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku maka ia tidak akan selamat. Dengan kata lain keselamatan yang diterima seseorang haruslah ditunjukkan dengan kesalehan dan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.

Para pemimpin kaum Puritan memandang bahwa diri mereka sendiri sebagai penjaga dan pemelihara ajaran

yang murni. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Winthrop bahwa "*social stability required religious uniformity*" (Henretta et al., 1993: 54). Stabilitas sosial dalam suatu masyarakat memerlukan keseragaman atau kesatuan dalam hal keyakinan agama. Untuk mencapai stabilitas sosial yang diinginkan, penting untuk memiliki keseragaman atau konsistensi dalam keyakinan agama yang dianut oleh anggota masyarakat.

Dalam konteks sejarah atau kajian sosial tertentu, pernyataan ini mungkin mengacu pada situasi di mana pemerintah atau pemimpin masyarakat percaya bahwa adanya keseragaman agama di antara warganya dapat menjadi faktor penyatuan dan pemeliharaan ketertiban sosial. Ini bisa mencakup dorongan untuk menciptakan suatu bentuk hegemoni agama atau melibatkan upaya untuk menindak atau mengontrol kelompok-kelompok agama yang dianggap mengancam stabilitas sosial. Namun pendekatan semacam ini dapat menimbulkan isu-isu terkait kebebasan beragama dan pluralitas dalam masyarakat. Keinginan untuk mencapai stabilitas sosial melalui uniformitas agama sering kali berpotensi melanggar hak individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka sendiri. Sebaliknya, masyarakat yang lebih pluralistik dan menghargai kebebasan beragama dapat mencapai stabilitas sosial melalui kerangka kerja yang mengakui dan menghargai keberagaman keyakinan.

Selain hal di atas, Winthrop juga yakin dan percaya bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin kaum Puritan, semata-mata adalah untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan. Hal ini tentunya merupakan bukti kepada negara bahwa semua kewajiban yang dilakukan adalah untuk negara juga dan sebagai ibadah kepada Tuhan (Kammen, 1985: 73).

Sikap kaum Puritan seperti ini dilakukan untuk menjaga agar misi mereka ke dunia baru tetap pada jalur yang sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Usaha

untuk tetap menjaga kemurnian agama mereka itulah yang menimbulkan intoleransi, pengusiran atau pengasingan, penganiayaan bagi anggota masyarakat yang tidak taat dan patuh terhadap ajaran mereka.

Sikap intoleransi lainnya yang sangat menonjol pada saat itu adalah mereka merasa memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengawasi kehidupan orang lain. Chidester mengatakan bahwa *“people had to live in a family setting rather than singly, their personal behavior and dress were carefully regulated, and they were expected to monitor each other’s moral behavior”* (Corbertt et al.,1999 : 35). Kalimat ini mengacu pada suatu konteks sosial di mana, menurut Chidester, masyarakat atau kelompok tertentu menerapkan aturan dan kontrol yang ketat terhadap perilaku pribadi dan penampilan fisik individu. Individu diharapkan atau diwajibkan untuk hidup dalam setting keluarga daripada hidup sendiri. Ini dapat mencerminkan nilai-nilai atau norma sosial yang menekankan pentingnya struktur keluarga dalam membentuk kehidupan sosial dan moral masyarakat tersebut. Tidak hanya pola hidup keluarga yang diatur, tetapi juga perilaku pribadi dan penampilan fisik individu. Hal ini dapat mencakup peraturan terkait etika, moralitas, dan norma-norma perilaku pribadi yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok tersebut. Individu diharapkan untuk saling memantau perilaku moral satu sama lain. Hal ini menciptakan dinamika sosial di mana kontrol sosial bukan hanya dilakukan oleh otoritas eksternal, tetapi juga oleh sesama anggota masyarakat. Pengawasan terhadap moralitas individu dapat berkontribusi pada pemeliharaan norma sosial yang diinginkan.

Pernyataan tersebut di atas dapat dilihat dalam film *The Scarlet Letter*, yaitu pada saat Hester Prynne pertama kali tiba di Massachusetts. Segala tingkah lakunya diawasi dan diperhatikan oleh tokoh masyarakat dan agama serta kalangan rakyat biasa. Salah satu di antaranya dapat dilihat dalam percakapan di bawah ini.

Clergyman: Madam, you would be well not to use lace in your breast making.

Hester Prynne: Sure.

(The Scarlet Letter)

Pernyataan tersebut di atas jelas memberikan gambaran pada kita bahwa untuk berbagai aspek atau aktivitas kehidupan warga masyarakat di daerah tersebut, mereka senantiasa mengatur dan mengawasinya. Hal ini dilakukan baik terhadap perseorangan maupun kelompok untuk menjaga stabilitas sosial kehidupan bermasyarakat. Mereka percaya bahwa stabilitas sosial tercipta atau terjamin berkat adanya keseragaman religious. Di samping itu juga semangat untuk bekerja keras menjadi suatu wujud keberadaan iman orang tersebut. Dengan demikian, kerja keras bagi kaum Puritan bukanlah sekedar untuk hidup, melainkan sebagai ibadah dan hidup itu sendiri.

Moses Rischin mengatakan bahwa “kerja keras adalah berkat dan bukan sebagai kutukan” (1968 : 23 –30). Sebab itu kerja keras haruslah dipandang sebagai suatu panggilan dan bukan merupakan suatu beban. Pernyataan ini mencerminkan pandangan positif terhadap usaha keras, mempromosikan pemahaman bahwa melalui kerja keras, seseorang dapat mencapai prestasi dan keberhasilan. Kerja keras seharusnya dipandang sebagai suatu panggilan untuk menjalani tugas atau peran yang diberikan kepadanya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Dengan menganggap kerja keras sebagai panggilan, seseorang mungkin akan lebih termotivasi dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam menjalankan tanggung jawabnya, sehingga menciptakan hasil yang lebih baik. Dengan pandangan ini, masyarakat diharapkan untuk mengubah persepsi mereka terhadap usaha keras, tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai jalan untuk mencapai kemajuan dan pertumbuhan pribadi.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti dedikasi, komitmen, dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dapat membantu seseorang meraih keberhasilan dan merasakan keberkahan dalam hidupnya.

Kerja keras bagi kaum Puritan adalah jalan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam hidup. Hal ini sering ditegaskan oleh para pemimpin kaum Puritan melalui “sermon-sermon, surat kabar, pidato-pidato politik, dan karya-karya sastra Amerika pada masa awal kolonisasi” (Pitt, 1976 : 194). Seremoni keagamaan, surat kabar, pidato politik, dan karya sastra pada masa awal kolonisasi Amerika menjadi saluran penting untuk menegaskan pesan ini kepada masyarakat, memotivasi mereka untuk menjalani kehidupan dengan tekun dan integritas moral, sekaligus mencapai kesuksesan. Komunikasi ini berfungsi sebagai alat untuk membentuk pandangan dan nilai-nilai masyarakat Puritan terkait dengan pekerjaan. Dengan menyebarkan pesan melalui berbagai medium, para pemimpin Puritan berusaha menciptakan budaya yang menghargai usaha keras sebagai fondasi utama untuk mencapai tujuan hidup yang sukses dan bermakna.

Prinsip kerja keras kaum Puritan ini pun terlihat dalam film *The Scarlet Letter*. Semua warga masyarakat bekerja keras bukan karena etika kaum Puritan mengajarkan hal itu, melainkan untuk mempertahankan kehidupan mereka; bahkan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pada saat itu pula belum ada peralatan teknologi yang canggih untuk menggarap areal perkebunan sehingga mereka menggunakan tangan sendiri untuk mengerjakannya.

Dalam salah satu episode film tersebut diceritakan pula tentang ketegasan pelaksanaan prinsip kerja keras ini yaitu pada saat Hester Prynne dan beberapa anggota rombongan kaum Puritan lainnya tiba di Massachusetts, Amerika. Pada saat itu salah seorang perempuan memperkenalkan Mrs. Prynne kepada Gubernur

Bellingham, yang kebetulan menyambut kedatangan kaum Puritan yang tiba dari Inggris.

Traveler (woman): Governor Bellingham, allow me to introduce a young woman with this traveling with us.

Hester Prynne : I am Hester Prynne.

Gov. Bellingham: Apologize. A coarseness on my hands, here in the colonies everyone must work hard.

Hester Prynne: I am forward to work harder, governor. I should read it some in nineteen ninety-two. I have been trained with both my hands.

Clergyman: Thou can spoke this description.

Hester Prynne: Yes, I have read both testament. My husband told me.

(The Scarlet Letter)

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa ketertiban, ketaatan yang kuat pada prinsip dan pentingnya kemauan keras serta pengendalian diri merupakan hal yang utama.

Sebaliknya emosi yang tidak terkendali, spontanitas, bahkan kesantiaian dipandang sebagai kecurigaan dan kebencian. Itulah sebabnya warga masyarakat tidak berani menentang dan me lawan aturan serta hukum yang berlaku di daerah itu. Mereka lebih baik memilih untuk beribadah, bekerja keras dan berupaya untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran puritanisme.

Sejalan dengan perkembangan zaman, terjadilah perubahan nilai. Lambat laun kerja keras bukan lagi dipandang sebagai panggilan Ilahi semata, melainkan juga untuk mengejar kekayaan material. Produksi sumber daya alam pun melimpah dan sebagian besar mereka menjadi kaya.

Bab 9

The Crucible: Situasi Kehidupan Beragama Kaum Puritan Massachusetts di Masa Kolonial

Untuk itu pembahasan yang lebih jelas mengenai hal ini dimulai dengan latar belakang kehidupan dan karya sastra Arthur Miller. Bagian kedua membahas salah satu aspek kehidupan beragama yakni intoleransi kaum Puritan pada masa kolonial dengan menggunakan hasil karya Arthur Miller sebagai “mental evidence” dalam penulisan ini.

Latar Belakang Kehidupan, Karier, dan Karya Sastra Arthur Miller

Arthur Aster Miller lahir di Manhattan pada tanggal 17 Oktober 1915. Ia berasal dari keturunan keluarga Yahudi. Istri pertamanya adalah Mary Grace Slattery yang dinikahinya pada tahun 1940 dan dikaruniai dua anak Jane dan Robert. Pada tahun 1956 ia bercerai dengan istri pertamanya, kemudian menikah dengan seorang artis film terkenal Marilyn Monroe pada tahun 1957. Usia perkawinannya dengan Marilyn Monroe tidak berlangsung lama. Pada tahun 1960 secara resmi ia berpisah dengan Marilyn Monroe. Selama dua tahun ia hidup sendiri, kemudian pada tahun 1962 ia menikah lagi dengan seorang photographer Inge Morath dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rebecca.

Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses dan ibunya adalah seorang yang mempunyai hobi membaca. Pada tahun 1929 usaha ayahnya mengalami kepailitan. Keadaan ini sangat mempengaruhi kehidupan keluarga mereka. Akhirnya mereka pindah ke kota Brooklyn, tempat Arthur Miller menyelesaikan studi Sekolah Menengah Umum (SMU).

Semasa studinya ia dikenal sebagai siswa yang kurang mampu dari segi kehidupan ekonomi. Keadaan ini berpengaruh terhadap kehidupannya sehingga ia tidak begitu bersemangat untuk belajar dan mengikuti pelajaran di sekolah. Miller lebih tertarik dengan bidang olahraga dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Ia tidak pernah memperoleh nilai yang baik terutama mata pelajaran Aljabar. Dengan demikian ia senantiasa mendapat perhatian dan kontrol yang tinggi dari gurugurunya. Miller secara jujur mengatakan bahwa sampai dengan usia 17 tahun, ia tidak pernah membaca buku yang lebih sulit daripada Tom Swift, Rover Boy, dan beberapa hasil karya Dickens (McNicholas, 1981 : 87).

Setelah menyelesaikan studinya di SMU, ia menggeluti berbagai macam pekerjaan di antaranya: bekerja di bagian pergudangan mobil Tenth Avenue, Manhattan. Sebagian dari gaji yang diperoleh di bengkel mobil tersebut, disisihkan atau ditabung untuk membiayai kuliahnya. Selain itu juga ia rajin membaca "The Brother Karomov" (1926). Hasil karya ini berdampak baik terhadap dirinya dan ia tertarik serta berkeinginan untuk menjadi seorang penulis.

Pada tahun 1934 ia diterima sebagai mahasiswa jurusan jurnalistik di Michigan University, kemudian pada tahun 1936 ia pindah ke jurusan bahasa Inggris. Selain sebagai mahasiswa di Michigan University, ia dikenal juga sebagai seorang wartawan. Hal ini berkat terbitan hasil karyanya yang sebagian besar mengisahkan pengalaman masa lalunya.

Untuk menyalurkan hobinya itu, ia rajin menulis naskah drama. Ia sempat meraih kemenangan Hopwood Playwriting Award untuk hasil karyanya sendiri yang berjudul "Honors at Down" (1936) dan "No Villain" (1937). Pada tahun 1938, beberapa hasil karyanya dalam bidang drama, dipentaskan di Ann Arbor dan Detroit sebelum ia tamat. Di Michigan University inilah menjadikan Miller

mampu menempatkan dirinya di jajaran para penulis naskah drama terkenal.

Pada tahun 1938 ia menyelesaikan studinya di Michigan University dengan menyandang gelar B.A. Setelah itu ia kembali ke kota New York, bergabung dengan Federal Theatre Project untuk mengembangkan bakat dan hobinya. Selama bergabung dengan Federal Theatre Project ia menulis naskah komedi, tetapi naskah komedi tersebut tidak dapat disiarkan atau dipentaskan karena kesulitan dana.

Pada waktu itu, ia juga menulis naskah drama “Cavalcade of America” dan “Columbia Workshop”, yang disiarkan melalui radio dengan durasi penyiaran selama setengah jam. Miller merasakan bahwa drama yang disiarkan melalui radio sangat bermanfaat guna mempelajari dan memperbaiki kembali dialog yang ada dalam drama tersebut. Di satu pihak ia merasa bahwa pihak produser tidak memberikan kebebasan kepada Miller untuk mengungkapkan idenya secara bebas. Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi Miller untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Akhirnya sebagian dari hasil karya Miller tersebut diterbitkan.

Ketidakbebasan dalam menulis naskah radio memberikan manfaat dan motivasi yang besar bagi Miller untuk menulis naskah drama. Pada tanggal 29 Januari 1947 ia memproduksi “All My Sons” yang dipertunjukkan sebanyak 328 kali. Hal ini menempatkan Miller sebagai seorang dramawan terkenal. Ia pun memperoleh penghargaan “Drama Critics Circle Award”. Pada tahun 1949 ia memproduksi “Death of a Salesman” dengan 742 kali pertunjukan. Hasil karyanya ini pun mendapat penghargaan Pulitzer Prize dan menempatkan Miller sebagai ahli drama Amerika yang sangat terkenal.

Hasil karya Miller berikutnya adalah “The Crucible”, yang diterbitkan tahun 1953. Ia menulis “The

Crucible” ketika Amerika berada dalam era McCarthy yang ditandai dengan sikap saling curiga dan menuduh bahwa orang lain merupakan orang yang pro-komunis. Banyak kawan Miller yang dituduh sebagai komunis. Pada tahun 1956, Miller sendiri diajukan di hadapan *The House of Un-American Activities Committee* dengan tuduhan sebagai orang komunis. Ia dinyatakan bersalah, kemudian pada tahun 1957 keputusan ini dicabut ketika permohonan naik bandingnya diterima dan ia dinyatakan bebas oleh pengadilan tersebut.

“The Crucible” merupakan hasil karya Arthur Miller yang memperoleh penghargaan *Gold Medal Award* dari *The National Institute of Arts and Letters*. Drama ini dipentaskan lebih dari 600 kali dan merupakan drama terpopuler kedua dari seluruh hasil karya Arthur Miller. Berbakat pengalaman dan kemahiran Arthur Miller di dalam menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk karya sastra, maka “The Crucible” sangat populer di Eropa.

Wellek dan Warren (1962: 227) mengatakan bahwa drama adalah merupakan salah satu dari tiga sastra modern di samping puisi dan fiksi. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya drama sebagai bentuk ekspresi sastra yang memiliki posisi khusus dalam kanon sastra modern. Drama, sebagai salah satu genre sastra, mengeksplorasi pengalaman manusia melalui dialog dan tindakan yang dipentaskan di atas panggung. Drama memanfaatkan elemen teatrikal untuk menyampaikan cerita, memungkinkan audiens untuk terlibat secara langsung dengan karakter dan konflik dalam cara yang berbeda dibandingkan dengan puisi atau fiksi. Pengakuan terhadap drama sebagai salah satu bentuk sastra penting melibatkan pengakuan atas kemampuannya untuk menciptakan narasi dan memerankan kisah melalui performa panggung. Sebagai bentuk sastra modern yang berdiri berdampingan dengan puisi dan fiksi, drama menunjukkan kemampuannya untuk mencerminkan kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia dalam

konteks waktu dan budaya. Lebih lanjut Soebagio Sastrowardoyo mengatakan bahwa drama adalah sebuah karya sastra yang dapat menyinggung dan menghadapkan kita pada masalah-masalah kehidupan yang besar, misalnya masalah hidup dan mati, masalah hak dan kewajiban, masalah kemauan dan nasib, masalah kemasyarakatan dan individu serta masalah Tuhan dan kemanusiaan (Oermarjati, 1971 : 80).

Penjelasan tersebut di atas sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Arthur Miller melalui hasil karyanya “The Crucible”. Berbagai masalah kehidupan sosial keagamaan dan kemasyarakatan kaum Puritan pada masa kolonial di Massachusetts, disajikan secara menarik dalam bentuk drama. Pada tahun 1996 hasil karya Arthur Miller “The Crucible” untuk pertama kali dipublikasikan ke dalam bentuk film. Hal ini tentunya untuk lebih mensosialisasikan dan sekaligus menginformasikan pesan yang ada di dalam film tersebut. Dengan kata lain film ini mengandung aspek kebudayaan dan sekaligus berisikan pendidikan yang baik serta sebagai hiburan bagi masyarakat. Sebab itu film ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempelajari dan menelaah kembali kehidupan kaum Puritan pada masa kolonial di Massachusetts, Amerika.

Film ini pada dasarnya mengungkapkan histeria massa untuk memburu orang-orang yang dituduh mempraktekkan ilmu sihir, yang terjadi di kota Salem pada akhir abad ketujuhbelas. Kisah ini dimulai ketika beberapa gadis dari kalangan kaum Puritan menuduh orang lain sebagai tukang sihir; padahal sesungguhnya tuduhan ini tidak mempunyai alasan yang kuat dan mengakibatkan banyak warga kota yang dihukum gantung.

Salah seorang yang dituduh menjadi pemimpin aktivitas pemujaan setan di hutan adalah Tituba. Ia adalah seorang dari kalangan kulit hitam yang berasal dari

Barbados dan seorang budak milik pendeta Parris. Perlakuan terhadap Tituba merupakan suatu tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Ia disiksa dan dicambuk oleh pendeta Parris yang memaksanya untuk mengakui semua tuduhan yang diberikan kepadanya, berdasarkan penjelasan dari Abigail, kemenakan pendeta Parris.

Di samping itu pula ada beberapa anggota masyarakat lainnya yang dihukum gantung karena dicurigai sebagai tukang sihir. Salah seorang di antaranya bernama Rebecca Nurse yang berusia 70 tahun. Ia adalah seorang yang taat dalam menjalankan ajaran Kristen, tetapi namanya termasuk dalam daftar nama-nama orang yang dituduh melakukan hubungan dengan setan. Sebagian warga masyarakat tidak percaya akan keterlibatan Rebecca Nurse dalam kasus ini, tetapi para hakim tetap menjatuhkan vonis untuk menghukum gantung Rebecca Nurse.

Kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Puritan pada masa kolonial di Amerika, merupakan sumber inspirasi bagi Miller untuk mengimplementasikannya ke dalam bentuk drama “The Crucible”. Di samping itu pula melalui hasil karyanya ini, ia dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai salah satu aspek dari kehidupan beragama kaum Puritan pada saat itu di kota Salem, Amerika.

Intoleransi Kaum Puritan Abad Ke -20

Telah dikemukakan oleh Nathaniel Hawthorne dalam film “The Scarlet Letter” bahwa kedatangan kaum Puritan ke New England adalah untuk kebebasan menjalankan ajaran agama tanpa merasa takut dianiaya. Boorstin (1958: 12) dalam buku “The Americans: The Colonial Experiences” mengemukakan pula bahwa “sejak semula kedatangan kaum Puritan ke benua Amerika, juga didorong oleh impian untuk membangun sebuah masyarakat baru yang sempurna.” Pernyataan ini

mencerminkan pandangan bahwa kaum Puritan tidak hanya melarikan diri dari penganiayaan agama di Inggris, tetapi juga membawa aspirasi besar untuk menciptakan tatanan sosial dan keagamaan yang ideal di tanah baru. Kedatangan kaum Puritan ke Amerika Serikat pada abad ke-17 diikuti oleh upaya keras mereka untuk mendirikan koloni-koloni yang berlandaskan nilai-nilai Puritanisme. Mereka membayangkan masyarakat baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan, moralitas, dan tata kelola yang sesuai dengan keyakinan mereka. Impian ini mencerminkan visi mereka tentang sebuah "city upon a hill," suatu masyarakat yang diharapkan menjadi teladan bagi dunia dalam hal kebenaran dan moralitas.

Dalam konteks sejarah kolonial Amerika, impian kaum Puritan ini membentuk dasar bagi pembentukan masyarakat yang mencakup institusi-institusi berdasarkan pada prinsip-prinsip Puritanisme. Gagasan tentang membangun masyarakat yang sempurna juga dapat dilihat sebagai dorongan untuk menciptakan ketertiban sosial dan spiritual yang dianggap mendekati idealisme keagamaan mereka. Namun interpretasi dan penerapan konsep "kesempurnaan" ini tidak selalu menciptakan keberagaman dan toleransi. Upaya menciptakan masyarakat yang sesuai dengan standar Puritan dapat membawa konsekuensi seperti penganiayaan terhadap individu yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan norma-norma Puritan. Sebagai hasilnya, impian mereka memunculkan tantangan dan kompleksitas dalam pembentukan identitas Amerika awal yang masih terus dipelajari dan dibahas hingga saat ini.

Werkmeister dalam buku "A History of Philosophical Ideas in America" mengemukakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakannya dengan sangat sempurna dan baik, tetapi manusia itu sendiri yang menjadikan segala sesuatunya menjadi tidak baik. Hal ini tentunya didorong oleh adanya kekuasaan dan keinginan yang tidak terkontrol. Dengan

demikian mereka menjadi koruptor dan pembuat dosa. Perbuatan dosa yang mereka lakukan sangat banyak sehingga mereka pantas untuk menerima hukuman yang sangat berat (1949 : 18).

Berdasarkan hal ini mereka senantiasa berupaya keras untuk mengisi kehidupan dengan kesalehan, kesederhanaan, kerja keras, dan kedisiplinan yang tinggi sehingga tidak ada peluang bagi dosa untuk memasuki kehidupan mereka (Tuveson, 1968: 195). Mereka sangat kuat menegakkan nilai-nilai spiritual ini terhadap warga masyarakat agar supaya dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Melalui khotbah-khotbah warga masyarakat dihibau untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi dan harus taat kepada kehendak Ilahi. Lambat laun prinsip-prinsip seperti ini kemudian mengarah ke sikap fanatisme, intoleransi, dan kemunafikan.

Situasi seperti ini jelas terlihat pada karakter salah seorang tokoh kaum Puritan yang muncul dalam film “The Crucible”. Salah seorang tokoh dalam film tersebut yaitu Pendeta Parris secara terang-terangan memaksakan kepada orang lain untuk mengamalkan dan mematuhi ajaran Puritan yang mereka anut. Di samping itu juga sesama warga masyarakat saling mengawasi berbagai aktivitas dan tingkah laku anggota masyarakat lain di kota Salem, Amerika.

Mrs. Putnam : I never heard you worried so on this society, Mr. Proctor. I do not think I saw you at Sabath meeting since snow flew.

John Proctor: I have trouble enough without I come five mile to hear him preach only hellfire and bloody damnation. Take it to heart, Mr. Parris. There are many others who stay away from church these days because you hardly ever mention God any more
Reverend Parris: Why, that's a drastic charge! You people seem not to comprehend that a minister is the

Lord's man in the parish; a minister is not to be so lightly crossed and contradicted.

Mrs. Putnam : Aye !

Reverend Parris: There is either obedience or the church will burn like hell is burning!

(The Crucible)

Sikap fanatisme dan ketidaktoleransian yang terlalu keras seperti ini mengakibatkan ajaran puritanisme semakin tidak disukai atau diterima oleh warga masyarakat. Guna menghindari pertentangan atau perselisihan yang akan terjadi di antara warga masyarakat dengan para tokoh agama yang berkuasa pada saat itu, beberapa warga masyarakat menghindari untuk mengikuti berbagai acara ritual yang diharuskan oleh ajaran kaum Puritan, misalnya kewajiban untuk menghadiri upacara hari Sabat.

Akibat adanya situasi yang berkembang seperti ini, berbagai masalah lainnya bermunculan. Kepercayaan terhadap ilmu sihir atau pun tahayul menyebar luas ke mana-mana. Sikap saling menuduh atau curiga mencurigai di antara sesama warga masyarakat berkembang pesat. Akibatnya orang-orang yang dicurigai sebagai tukang sihir ditangkap, diadili, dan dihukum secara kejam. Pada umumnya hukuman yang diterima oleh para tersangka berupa hukum gantung di lapangan terbuka dan disaksikan oleh warga masyarakat di daerah tersebut. Sebagian warga masyarakat ada yang menentang atau menolak keputusan ini karena mereka yakin tuduhan tersebut tidak beralasan atau tidak benar. Meskipun keputusan itu bertentangan dengan hati nurani mereka, mereka tidak dapat membantu atau menyelamatkan orang-orang yang dituduh melakukan praktek terlarang itu. Akhirnya mereka pun dengan terpaksa menerima perlakuan ini dan menyaksikan pelaksanaan hukum gantung bagi para tersangka. Sebagai salah satu contoh : pelaksanaan hukum gantung bagi para tersangka yang muncul dalam film "The Crucible" dapat dilihat dalam

gambar 2.



Gambar 2. Hukuman gantung terhadap orang yang dicurigai melakukan praktek ilmu sihir (Sumber: Film The Crucible).

Henretta dkk. (1993: 57) dalam buku “America’s History” mengatakan bahwa antara tahun 1647 dan 1662, penguasa sipil di Massachusetts dan Connecticut menghukum gantung empat belas orang yang dituduh mempraktekkan ilmu sihir. Sebagian besar orang-orang yang dihukum gantung tersebut adalah perempuan. Peristiwa paling tragis terhadap perburuan tukang sihir di kota Salem terjadi tahun 1692. Pemerintah menangkap sebanyak 175 orang laki-laki maupun perempuan yang dicurigai sebagai tukang sihir, tetapi hanya sekitar 22 orang saja yang dieksekusi mati. Masa ini adalah periode sejarah Amerika Serikat awal di mana kepercayaan pada ilmu sihir dan kepanikan terhadap perempuan dianggap terlibat dalam praktik tersebut menyebabkan tindakan hukuman yang sangat keras.

Pada periode ini, tindakan hukuman gantung diarahkan terutama kepada individu yang dituduh mempraktekkan ilmu sihir, dan yang menarik perhatian adalah bahwa sebagian besar dari mereka yang dihukum gantung adalah perempuan. Hal ini mencerminkan dinamika gender yang kental dalam persekusi sihir pada

masa tersebut, di mana perempuan seringkali diidentifikasi sebagai pihak yang dapat "bersekutu dengan iblis" atau terlibat dalam praktik-praktik supranatural yang dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat.

Penghukuman yang begitu keras dan fokus pada perempuan menggambarkan tingginya tingkat paranoia dan ketakutan yang berkembang pada saat itu terhadap segala sesuatu yang dianggap berbau sihir atau supernatural. Ini juga mencerminkan kecenderungan penindasan dan persekusi terhadap individu-individu yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan keagamaan yang dominan pada saat itu.

Penting untuk dicatat bahwa periode ini dikenal sebagai periode Persekusi Witch Hunt di Amerika Serikat, di mana ratusan orang, terutama perempuan, dituduh melakukan sihir dan menghadapi hukuman yang keras, termasuk penganiayaan dan hukuman mati. Pernyataan ini memberikan gambaran singkat tentang ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi selama masa itu, serta mencerminkan tantangan dan kesulitan dalam mencapai keadilan dan toleransi pada periode awal sejarah Amerika Serikat.

Peristiwa tragis seperti ini merupakan salah satu bentuk perwujudan sikap intoleransi kaum Puritan pada saat itu. Mereka menganggap bahwa ilmu sihir merupakan aliran sesat dan mereka pun sangat membenci hal ini. Sebab itu tanpa belas kasihan sedikitpun mereka menangkap warga masyarakat yang dicurigai melakukan praktek terlarang itu. Berbagai peristiwa yang terjadi di kota Salem pada saat itu, kemudian diimplementasikan dalam bentuk karya sastra "The Crucible" oleh seorang dramawan terkenal Arthur Miller.

Salah satu episode dalam film tersebut mengisahkan kekejaman pemerintah dan sekaligus kaum Puritan dalam memburu, mengadili, dan menghukum warga

masyarakat yang dituduh sebagai tukang sihir.

Francis Nurse : We are desperate, sir; we come here three days now and cannot be heard.

Dep.Gov.Danforth : Who is this man ?

Francis Nurse : Francis Nurse, Your Excellency.

John Hale : His wife's Rebecca that were condemned this morning.

Dep.Gov.Danforth : Indeed! I am amazed to find you in such uproar. I have only good report of your character, Mr Nurse.

Francis Nurse : Excellency, we have proof for your eyes; God forbid you shut them to it. The girls, sir, the girls are frauds.

Dep.Gov.Danforth : What's that ?

Francis Nurse : We have proof of it, sir? They are all deceiving you.

Judge Hathorne : This is contempt, sir, contempt!

Dep.Gov.Danforth : Peace, Judge Hathorne. Do you know who I am, Mr. Nurse ?

Francis Nurse : I surely do, sir, and I think you must be a wise judge to be what you are.

Dep.Gov.Danforth: And do you know that near to four hundred are in the jails from Marblehead to Lynn, and upon my signature? And seventy-two condemned to hang by that signature.

Francis Nurse : Excellency, I never thought to say it to such a weighty judge, but you are deceived.

(The Crucible)

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa dengan tangan besi mereka memimpin komunitas masyarakat Puritan di Massachusetts, Amerika. Hal ini tentunya dilakukan karena mereka merasa bahwa diri mereka adalah sebagai penjaga dan pemelihara ajaran kaum Puritan yang murni.

Dikemukakan oleh Corbett et al. dalam buku

“Politics and Religion in the United States” yaitu mereka berkeyakinan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan untuk membangun masyarakat atas dasar hukum Ketuhanan (1999: 38). Maksudnya, nilai-nilai agama dianggap memiliki peran sentral dalam membentuk visi tentang tata kelola masyarakat. Adanya perjanjian dengan Tuhan menegaskan komitmen spiritual dalam membimbing dan memberdayakan pembentukan masyarakat. Penyebutan hukum Ketuhanan menunjukkan bahwa dasar hukum dan norma-norma dalam masyarakat ini dianggap berasal dari prinsip-prinsip agama atau ajaran Tuhan. Artinya, kepercayaan tersebut mungkin mengarah pada upaya untuk menggabungkan nilai-nilai agama ke dalam struktur hukum dan kebijakan pemerintah, menciptakan suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan interpretasi mereka terhadap kehendak Tuhan. Pernyataan ini bisa menjadi titik awal untuk memahami bagaimana agama dan politik saling terkait dalam pembentukan identitas dan prinsip-prinsip masyarakat di Amerika Serikat.

Berdasarkan situasi seperti ini muncul pula beberapa permasalahan lainnya, misalnya masalah peranan lembaga peradilan di dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di daerah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari kalangan warga masyarakat mengenai tugas terpenting dari pengadilan, apakah menuntut orang-orang yang tidak bersalah ataukah melindungi mereka yang melakukan kesalahan. Sementara itu kepercayaan terhadap tukang sihir semakin merajalela dan menimbulkan kegelisahan bagi warga masyarakat.

Prinsip para penguasa yang berada di lembaga peradilan dalam menerapkan hukum yang berlaku di daerah tersebut, menimbulkan berbagai protes dari kalangan warga masyarakat. Mereka yang melakukan protes ini, sebagian besar berasal dari warga masyarakat menengah ke bawah. Mereka pulalah yang banyak ditangkap karena dituduh melakukan praktek ilmu

sihir.

Kejadian seperti ini dapat dilihat pula pada salah satu episode film “The Crucible”. Salah seorang tokoh yang muncul dalam film tersebut Mrs. Martha Corey, dituduh sebagai tukang sihir. Ia ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tuduhan yang diberikan kepadanya.

Judge Hathorne : Now, Martha Corey, there is abundant evidence in our hands to show that you have given yourself to the reading of fortunes. Do you deny it ?
Martha Corey : I am innocent to a witch. I know not what a witch is.
Judge Hathorne : How do you know, then, that you are not a witch?
Martha Corey : If I were, I would know it.
Judge Hathorne : Why do you hurt these children?
Martha Corey : I do not hurt them. I scorn it!
(The Crucible)

Pada saat itu pula Giles Corey yang menghadiri persidangan atas tuduhan yang diberikan kepada istrinya, menolak tuduhan tersebut. Sambil berteriak ia melampiaskan kemarahannya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan serta pengawalan ketat para pengawal.

Giles Corey : I have evidence for the court!
Dep.Gov.Danforth : You will keep your seat!
Giles Corey : You're hearing lies, lies! They be tellin' lies about my wife, sir.
Judge Hathorne : How do you dare come roarin' into this court! Are you gone daft, Corey?
Arrest him, excellency!
Giles Corey : You'll not call me daft! I have

*evidence. Why will you not hear my evidence ?
 Dep.Gov.Danforth : How do you imagine to help
 her cause with such contemptuous riot? Now be
 gone. Your old age alone keeps you out of jail for
 this. It is disruption, Mister. This is the highest
 court of the supreme government of this province. (*
The Crucible)

Pada akhirnya Giles Corey tidak dapat membantu dan menyelamatkan istrinya dari tuduhan serta hukuman yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Malahan sebaliknya Giles Corey juga dihukum secara kejam karena dianggap telah menghina pengadilan. Peristiwa menyedihkan mengenai pelaksanaan hukuman yang diberikan pada Giles Corey dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Hukuman terhadap orang yang dianggap menghina pengadilan
 (Sumber: Film "The Crucible")

Berbagai kasus seperti ini terlihat melalui peran dan karakter yang muncul dalam film "The Crucible". Warga masyarakat yang berusaha membela diri dan menunjukkan bukti-bukti yang kuat, tidak diperdulikan oleh para hakim yang memimpin atau menangani masalah tersebut. Selain itu tidak seorang pun warga masyarakat yang dapat membantah dan sekaligus melawan

hukum yang telah ditetapkan oleh para hakim serta para penguasa di daerah tersebut. Akhirnya mereka pun berpasrah diri menerima hukuman yang diberikan oleh para hakim. Satu demi satu dihukum gantung di lapangan terbuka dan disaksikan oleh warga masyarakat di daerah tersebut.

Bab 10

Kesimpulan

Dua karya sastra klasik Amerika, "The Crucible" karya Arthur Miller dan "The Scarlet Letter" karya Nathaniel Hawthorne, dapat memberikan pelajaran penting bagi Amerika dalam membangun budaya toleransi dan demokrasi. Dalam "The Crucible", ketakutan massa dan histeria di dalam masyarakat Puritan Amerika yang membawa kepada persekusi kaum perempuan yang dianggap terlibat dalam sihir mendorong pentingnya kewaspadaan terhadap manipulasi opini publik dan bahwa budaya toleransi memerlukan kritisisme terhadap tuduhan tanpa dasar serta penghormatan terhadap hak asasi manusia; sedangkan "The Scarlet Letter" menggambarkan dampak stigma sosial dan pengucilan terhadap Hester Prynne, seorang perempuan yang dihukum karena perzinahan yang mengajarkan tentang perlunya penoleran terhadap kesalahan dan kesalahan manusia, serta menggugah kesadaran akan hak individu untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pelajaran ini dapat membantu Amerika membangun budaya yang lebih inklusif dan memahami bahwa kesalahan manusia tidak seharusnya menghakimi seluruh eksistensi seseorang. Kedua karya tersebut mencerminkan gagasan tentang betapa berbahayanya fanatisme agama dan fundamentalisme dalam masyarakat. Untuk membangun budaya toleransi, Amerika perlu menilai pentingnya pluralisme agama dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan publik tidak didasarkan pada kepercayaan atau praktik agama tertentu.

"The Crucible" dan "The Scarlet Letter" menyoroti peran perempuan dalam masyarakat Puritan yang patriarki. Pembelajaran dari keduanya adalah pentingnya memberdayakan perempuan, menghormati hak-hak mereka, dan mempromosikan kesetaraan gender untuk membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.

Kelima, karya-karya ini menunjukkan bahaya ketidakadilan dalam sistem hukum. Pembelajaran yang dapat diambil adalah perlunya menjaga independensi sistem hukum, menjamin hak fair trial, dan memastikan bahwa kebijakan hukum tidak diskriminatif. Demokrasi yang sehat memerlukan perlindungan terhadap hak individu dan penegakan hukum yang adil.

Tema dosa, penebusan, dan pengampunan dalam "The Scarlet Letter" memberikan pelajaran tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua dan mengintegrasikan individu yang telah melakukan kesalahan kembali ke dalam masyarakat. Ini dapat membantu Amerika membangun budaya yang memahami bahwa orang dapat tumbuh dan berubah, dan mendorong rehabilitasi daripada pengucilan permanen. Kedua karya sastra ini juga menunjukkan bahaya otoritarianisme dan penindasan opini yang berbeda. Amerika perlu mengambil pelajaran tentang pentingnya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan toleransi terhadap perbedaan pandangan untuk membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Dari uraian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa melalui film "The Scarlet Letter" dan "The Crucible" Nathaniel Hawthorne dan Arthur Miller menampilkan sikap kaum Puritan yang bermigrasi dari Inggris ke Amerika karena menentang sikap pemerintah serta gereja yang tidak demokratis. Setelah berada di Massachusetts, Amerika untuk menemukan kebebasan menjalankan keyakinan religius yang dianutnya menjadikan mereka mengeksploitasi kebebasan orang lain sehingga demokrasi yang dituntut oleh mereka menjadi sebuah paradoks. Paradoks disini berarti disatu pihak mereka menginginkan kebebasan tetapi pada sisi lainnya mereka tidak menginginkan kebebasan orang lain untuk menentukan keyakinannya. Mereka pun malah menghukum orang yang tidak sependapat atau sekeyakinan dengan ajaran yang mereka anut seperti yang

terimplementasikan dalam kedua hasil karya sastra ini.

Disamping itu Nathaniel Hawthorne dan Arthur Miller menentang sikap intoleransi kaum Puritan yang memburu dan menghukum secara kejam orang-orang yang tidak sependapat atau sekeyakinan dengan ajaran yang mereka anut. Sikap kaum Puritan seperti ini sangat bertentangan dengan Ideologi Bangsa Amerika yaitu demokrasi, kesamaan kedudukan, dan kebebasan sebagaimana yang tercantum dalam Declaration of Independence, yaitu “all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness” (Fossum et al., 1981 : 5). Kalimat ini mengindikasikan bahwa sikap serakah kaum Puritan terhadap eksploitasi alam bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar ideologi Amerika Serikat, terutama demokrasi, kesetaraan kedudukan, dan kebebasan. Demokrasi, sebagai ideologi dasar Amerika, menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan kesetaraan di hadapan hukum, sedangkan keserakahan kaum Puritan dapat menyebabkan konsolidasi kekayaan dan kekuasaan dalam kelompok tertentu.

Nilai-nilai kesetaraan kedudukan yang dicanangkan dalam ideologi Amerika, terutama yang dinyatakan dalam *Declaration of Independence*, menekankan bahwa semua orang diciptakan sama oleh penciptanya. Sikap serakah kaum Puritan yang mungkin menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip ini, karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang setara dalam hal eksploitasi alam dan pencapaian kekayaan. Selain itu, konsep kebebasan dalam *Declaration of Independence*, yang mencakup hak-hak fundamental seperti kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan, dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada semua individu.

Keserakahan kaum Puritan yang mengarah pada eksploitasi alam untuk mencapai kekayaan dan keberhasilan materi mungkin dapat melanggar hak-hak tersebut, terutama jika tindakan mereka merugikan masyarakat luas atau merusak lingkungan. Pengakuan bahwa hak-hak fundamental harus diberikan secara merata dan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama dalam masyarakat bertentangan dengan praktek eksploitasi alam yang mungkin hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Selain itu Nathaniel Hawthorne dan Arthur Miller menginterpretasikan suatu sikap tentang agama bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda meskipun terhadap agama yang sama. Dalam negara yang demokrasi, setiap pemikiran dan keyakinan yang berbeda keberadaannya diakui serta memiliki kedudukan yang sama. Sebab itu intoleransi kaum Puritan menunjukkan suatu sikap tirani dalam negara yang menghargai demokrasi dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan. Hal inilah yang mengundang perhatian Nathaniel Hawthorne dan Arthur Miller mengeritik sikap kaum Puritan yang arogan itu.

Pola kehidupan kaum Puritan yang sangat berpegang teguh pada prinsip dan etika yang mereka anut berdasarkan atas ajaran John Calvin (Protestanisme) yang paling keras menyebabkan atau mewariskan bangsa Amerika menjadi bangsa yang kapitalis. Salah satu faktor penting yang menumbuhkan sikap atau perilaku seperti ini adalah kerja keras bagi setiap individu yang sangat dihargai dan dianggap suci. Betapapun kasar dan hinanya pekerjaan itu, memberi status terhormat kepada seseorang dan merupakan perikehidupan yang lazim.

Daftar Pustaka

- Ahlstrom, Sydney E. *A Religious History of the American People*. New Haven and London : Yale University Press, 1972.
- American Heritage Dictionary of The English Language*. Third Ed. Vol. 2. Houghton Mifflin Company, 1992.
- Baym, Nina, Rona ld Gottesman, Laurence B. Holland, David Kalstone, Francis Murphy, Hershel Parker, William H. Pritchard, Patricia B. Wallace. *The Norton Anthology of American Literature*. Third Edition: Volume 1. New York: W. W. Norton & Company, 1989.
- Bellah, Robert N. *Habits of Hearts, Individualism and Commitment in American Life*. New York : Harper and Row Publishers, 1986.
- Berkhorf, H dan I. H. Enklaar. *Sejarah Gereja*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 1983.
- Boorstin, Daniel J. *The Americans: The Colonial Experiences*. New York : Random House Inc., 1958.
- Budianta, Melani. "Sastra dan Pembentukan Bangsa: Pengalaman Amerika". *Jurnal Studi Amerika*. Volume VI Januari/ Juli 2000. Jakarta: Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, 2000. 73-82.
- Bushman, Richard L. *From Puritan to Yankee: Character and Social Order in Connecticut, Massachusetts*. Harvard University Press, 1967.
- Corbett, Michael and Julia Mitchell Corbett. *Politics and Religion in the United States*. New York &

- London: Garland Publishing Inc., 1999.
- Fossum, H. Robert and John K. Roth. *The American Dream. British Association for American Studies*, 1981.
- Gabriel, Ralph H. *Nilai-nilai Amerika: Pelestarian dan Perubahan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991.
- Gaustad, Edwin Scott. *A Religious History of America*. New York: Harper and Row Publishers, 1966.
- Grob, Gerald N. dan George Athan Billians. *Interpretative of American History, Patterns and Perspective*. New York : Macmillan Publishing Co. Inc., 1982.
- Gross, Theodore L. *A Nation of Nations: Ethnic Literature in America*. New York : The Free Press, 1971.
- Hawthorne, Nathaniel. *The Scarlet Letter*. New York: A Tom Doherty Associates Book, 1989.
- Henretta, A. James, W. Elliot Brownlee, David Brody, Susan Ware. *America's History*. New York : Worth Publishers, 1993.
- Horton, Rood W. dan Herbert W. Edwards. *Background of American Literary Thought*. New Jersey : Prentice Hall. Inc., 1974.
- Johnson, Paul. *A History of the American People*. New York : Harper Collins Publishers, 1997.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kammen, Michael. *Bangsa yang Penuh Paradoks*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,

1985.

- Magill, Frank N. *Masterpieces of World Literature*. Edisi I. New York : Herper & Row Publishers, 1989.
- Marsden, George M. *Religion and American Culture*. San Diego : Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1990.
- McClosky, Herbert dan John Zaller. *The American Ethos: Public Attitudes Toward Capitalism and Democracy*. Massachusetts : The Twenty Century Fund. Inc., 1984.
- McDowell, Treimane. *American Studies the Minesota Program*. Minnesota University Press, 1969.
- McNicholas, John. *Twentieth Century American Dramatists*. Michigan : A Brucoli Clark Bokk Gale research Company, 1981.
- Meredith, Robert. *American Studies :Essay on Theory and Method*. Ohio : Charles E. Merril Publishing & Co, 1968.
- Miller,Arthur. *TheCrucible*. New York : Bantam Books Inc., 1959.
- Muhni, Djuhertati Imam. *American Society and Culture*.
- Compilation. Yogyakarta : Program Study Pegkajian Amerika, 2000.
- Nurgiyantoro, Burhan. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Oemarjati, Boen S. *Bentuk dan Lakon dalam Sastra Indonesia*. Jakarta : Gunung Agune, 1971.
- Parrington, Vernon Louis. *Main Current in American Thought*. New York : Harcourt Brace & Company Inc., 1930.

- Pelly, Usman dan Asih Menanti. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Pitt, Leonard. *We Americans*. Book I. New York: Scott, Foresman and Company, 1976.
- Potter, David M. *Bangsa yang Makmur: Kemakmuran Ekonomi dan Watak Amerika*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990.
- Rischin, Moses. *The American Gospel of Success*. Chicago: Quadrangle Books Inc., 1968.
- Robinson, B.A. *Religious Intolerance*. 3 December 2001. <http://www.religioustolerance.org/reintoll.htm>
- Rossister, Clinton. *The First American Revolution*. New York: Harcourtbrace & World Inc., 1956.
- Sempreora, Margot. *Literature and Film: The Scarlet Letter*. 19 Maret 2000. <http://www.webster.edu/fact/scarlet.html> .
- Sumijati, As. *Manusia dan Dinamika Budaya : dari Kekerasan sampai Barata yuda*. Yogyakarta : Fakultas Sastra UGM Bekerja sama dengan BIGRAF Publishing, 2001.
- The Encyclopedia Americana: International Edition*. Danbury, Connecticut: Americana Corporation International Headquarters, 1829.
- The Crucible*. Dir. Roland Joffe. With Demi Moore, Garry Oldman, and Robert Duvall. Cinergi Pictures, 1995.
- The Scarlet Letter*. Dir. Nicholas Hytner. With Winona Ryder, Daniel Day-Lewis, Joan Allen, and Paul Scofield. Twentieth Century Fox, 1996.

- Tuveson, Ernest Lee. *Redeemer Nation, The Idea of America's Millennial Role*. Chicago: The University of Chicago Press, 1968.
- Van Den End. *Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 1986.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. *Theory of Literature*. New York: A Harvest Book Harcourt, Brace & World inc., 1962.
- Werkmeister, W. H. *A History of Philosophical Ideas in America*. New York : The Ronald Press Company, 1949.
- Wiersma, William. *Research Methods in Education*. Boston: Simin & Schuster Inc., 1991.
- Wilder, Howard B., Robert P. Ludlum, Harriett McCune Brown. *This is America's Story*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1983.
- Williams, Robin M., Jr. *American Society: A Sociological Interpretation*. New York: Alfred. A . Knopf, 1960.

Lampiran 1 . Ringkasan Film The Scarlet Letter

The Scarlet Letter

Pada sekitar tahun 1666 sebuah kapal Mayflower berlabuh di teluk Massachusetts membawa penumpang yang sebagian besar adalah para tokoh agama dan warga kaum Puritan lainnya. Mereka meninggalkan tanah Inggris dengan tujuan utama untuk menjalankan kebebasan beragama tanpa merasa takut dianiaya.

Pada saat mereka tiba di Massachusstes, mereka diterima oleh Gubernur koloni Massachusetts (Gubernur Bellingham), para pemimpin kaum Puritan, dan warga masyarakat lainnya. Sebagian besar orang-orang yang tergabung dalam rombongan tersebut sudah saling mengenal dengan warga kaum Puritan yang lebih dahulu berada di Massachusetts.

Salah seorang anggota yang turut serta dalam rombongan tersebut, Hester Prynne secara kebetulan belum dikenal oleh warga kaum Puritan yang berada di daerah itu, termasuk Gubernur koloni Massachusetts. Ia kemudian diperkenalkan kepada Gubernur Bellingham (Gubernur koloni Massachusetts) oleh salah seorang istri pendeta yang turut serta dalam rombongan itu. Secara halus Gubernur Bellingham menolak untuk berjabatan tangan dengan Hester Prynne dengan alasan bahwa tangannya agak kasar akibat bekerja keras.

Pernyataan ini secara tidak langsung merupakan salah satu ungkapan halus dengan maksud untuk lebih mempertegas kepada para pendatang baru bahwa “semua warga masyarakat di Massachusetts bekerja keras dengan menggunakan tangan sendiri”. Sebab pada saat itu belum ada peralatan teknologi canggih yang dapat digunakan untuk mengolah areal tanah pertanian. Secara spontan Hester Prynne menjawab bahwa ia telah mengetahui prinsip kerja keras, termasuk mengenai hal “perjanjian”. Suaminya

telah mengajarkan hal itu sebelum ia meninggalkan tanah Inggris.

Situasi kehidupan sosial warga masyarakat di daerah tersebut senantiasa diisi berbagai aktivitas hidup sehari-hari termasuk beribadah. Warga masyarakat di daerah tersebut saling berlomba untuk memperoleh hal yang terbaik dalam hidupnya. Hal ini merupakan suatu keharusan yang harus ditaati dan juga se bagai bagian daripada ibadah. Di samping itu warga masyarakat di daerah itu saling mengawasi antara satu dengan yang lain. Semua orang diwajibkan mengikuti berbagai acara ritual gereja seperti perayaan hari sabat. Hal lain yang turut menjadi perhatian sesama warga masyarakat yaitu dilarang untuk hidup bermewah -mewah, termasuk dilarang menggunakan renda di dada. Hester Pryne yang menggunakan perhiasan renda di dadanya pada saat tiba di daerah tersebut, terkejut mendengar teguran yang dilontarkan oleh seseorang bahwa ia dilarang menggunakan renda di dada. Secara spontan ia pun menaati peraturan tersebut.

Pada saat perjamuan makan malam, pembicaraan selingan pada saat itu meliputi berbagai hal yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di Massachusetts terma suk tentang kehidupan keagamaan. Saat itu pula Mrs. Stonehall (istri salah seorang pendeta) menyarankan kepada Hester Pryne untuk sementara tinggal dengan mereka sambil menunggu kedatangan suaminya. Hester Pryne menolak hal itu dengan alasan bahwa suaminya sengaja telah mengirimnya terlebih dahulu ke Massachushttes untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka di dunia baru, termasuk kedatangan suaminya di daerah tersebut.

Semua tamu yang hadir dalam perjamuan makan malam, terkejut mendengar alasan yang dikemukakan oleh Hester Pryne. Setelah itu seorang pendeta menjelaskan bahwa semua orang yang tinggal di daerah tersebut harus patuh, taat, dan menjaga tata tertib agar dapat hidup selamat di

dunia baru.

Setelah beberapa lama Hester Prynne menetap atau tinggal di daerah tersebut ia menerima berita buruk. Suaminya Roger Cillingworth dikabarkan meninggal dunia karena kapal yang mereka tumpangi menuju ke dunia baru diserang oleh kaum Indian. Berita duka yang disampaikan oleh pendeta Dimmesdale, diterimanya dengan ikhlas. Setelah itu ia hidup sendiri dan hanya ditemani oleh seorang budak, di sebuah rumah yang tempatnya berada di tepi pantai. \

Lebih lanjut lagi kedekatan hubungannya dengan pendeta Dimmesdale semakin akrab; bahkan mengakibatkan Hester Prynne mengandung. Berita ini telah telah sampai atau diketahui oleh Gubernur Bellingham dan para tokoh agama kaum Puritan di daerah tersebut berdasarkan laporan salah seorang warga masyarakat. Hester Prynne pun menerima surat panggilan dari pemerintah setempat, untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di samping itu ia dituduh telah menghina kitab Injil dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh sebagian besar ibu-ibu. Dengan tegas Ia menolak tuduhan telah menghina kitab Injil dan menolak untuk menyebutkan nama ayah anak yang berada didalam kandungannya. Akibatnya ia harus menggunakan huruf “A” (*adultery*) didadanya seumur hidup dan dipenjarakan berdasarkan tuduhan hamil di luar nikah. Di dalam penjara ini pun ia melahirkan anaknya “Pearl” dengan dibantu oleh Mrs. Hibbins.

Berkat kedekatannya dengan Mrs. Hibbins yang dicurigai melakukan praktek sihir dan tanda sihir yang terdapat dipusar anaknya Pearl, maka mereka berdua dipenjarakan serta harus menerima keputusan yang telah ditetapkan yaitu hukuman gantung. Pada saat menghadapi pelaksanaan hukum gantung tersebut, secara tiba-tiba pendeta Dimmesdale bersaksi bahwa anak yang ada dalam kandungan Hester Prynne adalah anaknya. Sebab itu ia yang harus menerima hukuman gantung tersebut. Masyarakat

pun terkejut mendengar pengakuan ini.

Beberapa menit sebelum petugas melaksanakan tugas eksekusi bagi pendeta Dimmesdale dan orang-orang yang dituduh melakukan praktek ilmu sihir, tiba-tiba diserang oleh kaum Indian. Akibatnya eksekusi ini tidak terlaksana dan situasipun berubah menjadi peperangan antara kaum Puritan dengan kaum Indian. Dalam peristiwa tersebut Hester Prynne, Pendeta Dimmesdale dan si kecil Pearl selamat. Mereka pun akhirnya hidup berbahagia.

Lampiran 2 . Ringkasan Film The Crucible

The Crucible

Film ini menceritakan tentang histeria massa untuk memburu orang-orang yang dicurigai melakukan praktek ilmu sihir. Aktivitas pemujaan setan atau ilmu sihir ini sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar ajaran kaum Puritan. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-17 di Salem, Amerika.

Kisah ini dimulai dengan peristiwa Abigail, Betty, Merry Warren, dan beberapa gadis lainnya di kota Salem terlibat dalam aktivitas pemujaan setan yang dilakukan di hutan. Aktivitas itu dipimpin oleh Tituba, budak pendeta Parris yang berasal dari Barbados. Pendeta Parris yang secara kebetulan mendapati mereka, secara tiba-tiba keluar dari semak-semak. Mereka sangat terkejut dan masing-masing bersembunyi dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Sejak peristiwa itu, Betty anak pendeta Parris pingsan dan belum sadarkan diri.

Di samping itu pula pada saat dilakukannya upacara pemujaan setan tersebut Abigail (keponakan pendeta Parris) meminum darah ayam dengan tujuan untuk mendapat kekuatan membunuh Elizabeth Proctor. Ia mengancam akan membunuh teman-temannya yang berani membocorkan rahasia ini. Para penduduk kota tidak mengetahui dengan tepat peristiwa itu, tetapi isu tentang praktek ilmu sihir telah menyebar luas ke mana-mana.

John Proctor yang kebetulan telah mengetahui peristiwa ini, datang ke rumah pendeta Parris untuk melihat kondisi kesehatan Betty yang sebenarnya. Pada saat itu pula Abigail berada di rumah tersebut dan berusaha merayu kembali John Proctor, tetapi John Proctor tidak memperdulikannya. Proctor adalah seorang petani yang pernah terlibat affair dengan Abigail pada saat istrinya Elizabeth Proctor menderita sakit yang berkepanjangan.

Para tokoh kaum Puritan dan masyarakat yang berada di daerah tersebut berdatangan ke rumah pendeta Parris, untuk berdoa dan memohon kesembuhan Betty. Berbagai pengobatan telah dilakukan tetapi Betty tidak sadar-sadar juga. Akhirnya pendeta Parris mengundang pendeta John Hale. Ia adalah seorang yang ahli dalam meneliti peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pemujaan setan (ilmu sihir) dan ia pun ingin mempertunjukkan keahliannya di hadapan warga masyarakat.

John Hale meneliti dan memeriksa Betty serta mendesak kepada Abigail untuk mengungkapkan aktivitas yang mereka lakukan di hutan. Akhirnya Abigail pun menceritakan peristiwa itu dan menuduh Tituba (budak pendeta Parris) sebagai orang yang mengajak para gadis itu melakukan praktek terlarang. Karena takut digantung, Tituba mau bertobat dan menuduh Goody Good dan Goody Osborne sebagai tukang sihir.

Sementara itu Abigail dan Betty yang sudah siuman mengaku bahwa diri mereka telah dikenai ilmu sihir dan mereka pun mau bertobat. Mereka kemudian menyebut beberapa nama yang mereka pernah lihat bersama sang iblis. Warga masyarakat yang dituduh melakukan praktek ilmu sihir berdasarkan laporan Abigail, Betty, dan Tituba ditangkap, dipenjarakan dan dihukum secara kejam.

Beberapa hari kemudian wakil Gubernur Danforth (wakil Gubernur di koloni Massachusetts) berkunjung ke daerah Salem untuk melihat jalannya persidangan terhadap para tersangka yang dicurigai melakukan praktek terlarang itu. Empat belas orang telah ditahan atas tuduhan melakukan praktek ilmu sihir. Disamping itu pula telah beredar berita mengenai hukuman gantung yang diberlakukan terhadap para tersangka yang melakukan praktek ilmu sihir. Situasi ini makin meresahkan warga masyarakat di daerah tersebut.

Salah seorang warga masyarakat yang ditangkap melakukan praktek terlarang itu yakni Elizabeth Proctor. Ia dibawa ke pengadilan dengan kondisi tangannya diborgol. John Proctor menolak perlakuan tersebut, tetapi para petugas

tidak menghiraukannya. Sebab itu John Proctor pun menghadap para hakim, Gubernur Danforth, dan para tokoh agama kaum Puritan untuk bersaksi membela tuduhanyangdiberi kan kepada istrinya. Ia pun berusaha melawan kasus yang dibawa oleh Abigail beserta teman-temannya itu. John Proctor sebenarnya tidak ingin terlibat dengan masalah ini. Hubungan antara John Proctor dengan istrinya Elizabeth Proctor masih diliputi ketegangan karena Elizabeth Proctor belum sepenuhnya dapat memaafkan John Proctor karena hubungannya dengan Abigail.

Untuk menguatkan ketidakbenaran tuduhan yang dilakukan kepada para tersangka termasuk Elizabeth Proctor, John Proctor pun menghadirkan saksi Marry Warren. Ia adalah salah seorang yang turut serta mengikuti acara ritual yang dilakukan di hutan. Ia bersaksi menentang Abigail dan teman-temannya serta mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Abigail itu tidak benar. Ia pun memberikan sebuah boneka kepada Elizabeth Proctor sebagai barang bukti. Boneka tersebut diperumpamakan sebagai Elizabeth Proctor dan dipakai oleh Abigail sebagai media untuk menjadikan Elizabeth Proctor merasa sakit karena boneka tersebut ditusuk-tusuk dengan jarum.

Selain John Proctor datang pula warga masyarakat lain yang menyampaikan keberatan dan perlawanannya terhadap kasus yang dituduhkan kepada istri-istri mereka. Mereka itu adalah Giles Corey dan Francis Nurse. Mereka pun membawa petisi yang ditandatangani oleh 91 orang warga kota yang isinya kesaksian atas kebaikan karakter para istri mereka. Gubernur Danforth pun tidak mengindahkan pernyataan tersebut; bahkan sebaliknya menahan Giles Corey serta memberikan hukuman yang kejam karena ia dianggap telah menghina pengadilan. Di samping itu para tersangka yang dituduh melakukan praktek terlarang itu tetap menjalani hukuman gantung yang telah ditetapkan bagi mereka, di lapangan terbuka dan disaksikan oleh warga masyarakat.